



JURNAL ILMIAH PLANOKRISNA

Vol. 17 No. 1 Juni 2021

ISSN : 2302 - 9307

Interaksi Wilayah Provinsi Sumatera Barat

Oleh : Siska Amelia, ST., MT

Analisis Penanganan Kemacetan Lalu Lintas Koridor Jalan Jatiwaringin Kota Bekasi

Oleh : Fauziya Bagawat Sari, ST., MT

Analisis Kesesuaian Rencana Pemanfaatan Ruang Perkotaan Dengan Pola Penggunaan Lahan (Studi Kasus Kecamatan Jati Asih)

Oleh : Herlin Sukmarini, ST., M.Si

Optimalisasi Penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Penanganan Pemanfaatan Ruang Kawasan Resapan Air (Studi Kasus : Kawasan Resapan Air Kabupaten Ciamis)

Oleh : Dr. Zefri, M.Si

Backlog Penyediaan Rumah Di Provinsi Jawa Barat

Oleh : Ir. Toni Rusmarsidik, MUM

Analisis Ketersediaan Pelayanan Kesehatan Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19 Di Kota Bekasi

Oleh : Ir. Reny Savitri, MT

**Penerbit
PRODI TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH & KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
JAKARTA**

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Dr. Harjono Padmono Putro, S.Kom., M.Kom
(Dekan Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana)

Penasehat

DR. Ir. H. Budiyo S, M.Si

Pemimpin Redaksi

Ir. Sutaryo, M.Si

Tim Redaksi

DR. Zefri, M.Si
DR. Samuel Th. Salean, M.Si
Herlin Sukmarini, ST, M.Si
Heru Dian Setiawan, ST, M.Si

Penyunting Ahli

Dr. Hotma Napitupulu, SH, MM
Siska Amelia, ST, MT
Ir. Reny Savitry, MT

Kesekretariatan

Dwi Oktafiana, S.Sos, M.Si
Rindy Novry Sistyanti, ST

ALAMAT PENERBIT

Universitas Krisnadwipayana
Jl. Kampus UNKRIS Jatiwaringin, Jakarta 13077
Gedung G (Fakultas Teknik) Lantai 2 Ruang Seketariat Prodi Teknik PWK
Telepon : 021-84998529
E-Mail : pwk.ftunkris@gmail.com

PENGANTAR REDAKSI

Bismillahir rahmanir rahiim.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena dengan pertolongan-Nya, Jurnal Ilmiah Plano Krisna Vol. 17 No. 1, Juni 2021 akhirnya dapat terbit. Dengan hadirnya Jurnal Plano Krisna, diharapkan semua tulisan ilmiah yang berkaitan dengan bidang keilmuan Perencanaan Wilayah & Kota dapat dipublikasikan secara luas, baik di kalangan ilmuwan Perencanaan Wilayah & Kota, maupun masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, dengan hadirnya Jurnal Plano Krisna dapat menjadi sarana publikasi bagi tulisan-tulisan ilmiah yang dihasilkan oleh civitas academica Prodi Teknik Perencanaan Wilayah & Kota Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana, baik Dosen maupun Mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan skripsinya.

Jurnal Ilmiah Plano Krisna menerima tulisan ilmiah berupa hasil-hasil penelitian, dan atau kajian ilmiah yang menjelaskan konsep keilmuan dan ide-ide baru mengenai bidang keilmuan bidang Perencanaan Wilayah & Kota.

Demikianlah prakata dari redaksi, semoga Jurnal Ilmiah Plano Krisna dapat bermanfaat dan dapat ikut serta berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Perencanaan Wilayah & Kota.

Wassalam,

Redaksi

KETENTUAN PENULISAN

1. Tulisan ilmiah diketik computer pada kertas A4 (210x297 mm) dengan margin atas, bawah = 3 cm, dan margin kanan, kiri = 3,5 cm, spasi = 1 (single) untuk abstrak dan bentuk huruf Times New Roman dengan ukuran = 12.
2. Jumlah kata dalam judul Bahasa Indonesia maksimal = 12 kata dan bila dalam Bahasa Inggris, berjumlah maksimal = 10 kata
3. Nama penulis makalah dicantumkan setelah judul, dengan ketentuan :
 - a. Bila terdapat lebih dari satu nama, maka nama penulis utama dicantumkan terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan nama – nama penulis lainnya
 - b. Jumlah maksimal penulis = 3 orang
4. Tulisan diawali dengan abstrak berupa satu paragraph dalam Bahasa Indonesia Abstrak adalah esensi isi keseluruhan tulisan secara utuh dan lengkap.
5. Sistematika isi tulisan mengikuti kaidah keilmuan, minimal tersusun dari pendahuluan, teori – teori yang mendukung penelitian atau kajian ilmiah, hasil – hasil penelitian atau kajian ilmiah, kesimpulan dan daftar pustaka
6. Tata letak isi penulisan menggunakan format dua lajur (kolom)
7. Ketentuan mengenai daftar pustaka adalah
 - a. Dicantumkan berurutan, dimana urutan pertama adalah referensi yang dikutip pertama kali dalam isi tulisan, dan seterusnya
 - b. Susunannya mengikuti urutan berikut (dipisahkan dengan koma) :
 - 1) Penulis, bila lebih dari tiga penulis, berikutnya ditulis etc dll (dkk)
 - 2) Judul referensi (judul buku atau judul dalam jurnal ilmiah)
 - 3) Tahun penerbitan buku atau tahun publikasi tulisan ilmiah
 - 4) Nama penerbit (buku) atau nama jurnal ilmiah referensi (disertai dengan nomor, volume, bulan terbit, dan halaman referensi)

DAFTAR ISI

Sampul Depan.....	i
Susunan Dewan Redaksi.....	ii
Alamat Penerbit.....	ii
Pengantar Redaksi.....	iii
Ketentuan Penulisan.....	iv
Daftar Isi.....	v
I. Interaksi Wilayah Provinsi Sumatera Barat Oleh : Siska Amelia, ST., MT	1 - 9
II. Analisis Penanganan Kemacetan Lalu Lintas Koridor Jalan Jatiwaringin Kota Bekasi Oleh : Fauziya Bagawat Sari, ST., MT	10 - 17
III. Analisis Kesesuaian Rencana Pemanfaatan Ruang Perkotaan Dengan Pola Penggunaan Lahan (Studi Kasus Kecamatan Jati Asih) Oleh : Herlin Sukmarini, ST., M.Si	18 - 34
IV. Optimalisasi Penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Penanganan Pemanfaatan Ruang Kawasan Resapan Air (Studi Kasus : Kawasan Resapan Air Kabupaten Ciamis) Oleh : Dr. Zefri, M.Si	35 - 49
V. Backlog Penyediaan Rumah Di Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus Pasar Minggu, Jakarta Selatan) Oleh : Ir. Toni Rusmarsidik, MUM	50 - 81
VI. Analisis Ketersediaan Pelayanan Kesehatan Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Di Kota Bekasi Oleh : Ir. Reny Savitri, MT	114 - 132

Interaksi Wilayah Provinsi Sumatera Barat

Siska Amelia¹

Abstrak

Pembangunan harus diarahkan kepada terjadinya pemerataan (*equity*), pertumbuhan (*efficiency*) dan keberlanjutan (*sustainability*) yang berimbang dalam pembangunan ekonomi. Dalam upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan diperlukan upaya-upaya pengembangan kawasan yang disesuaikan dengan potensi, kondisi dan permasalahan pada wilayah bersangkutan. Provinsi Sumatera Barat yang memiliki ragam potensi dan permasalahan sehingga tingkat pertumbuhan wilayah juga sangat beragam. Berdasarkan tahapan pembangunan menurut teori Rostow, Provinsi Sumatera Barat masuk dalam tahapan lepas landas bahkan ada beberapa wilayah yang masih ada dalam tahapan prasyarat lepas landas. Dalam melihat tingkat pertumbuhan dan kekuatan hubungan antar wilayah dengan melihat interaksi wilayah dengan model gravitasi. Untuk melihat kekuatan hubungan antar wilayah berdasarkan jarak dan variabel jumlah penduduk, pendapatan per kapita dan jumlah utilitas perkotaan dengan unit analisis adalah kabupaten/kota. Hasil analisis memperlihatkan bahwa kekuatan hubungan berdasarkan variabel jumlah penduduk, pendapatan per kapita dan jumlah utilitas perkotaan tidak selalu dipengaruhi oleh kedekatan wilayah tersebut dengan pusat pemerintahan atau pusat kegiatan ekonomi. Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah provinsi dan pusat agar tercipta pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

Kata kunci: ekonomi wilayah; pengembangan wilayah; model gravitasi

Abstract

Development must be directed towards balanced equity, growth (efficiency) and sustainability in economic development. In an effort to realize equitable development, efforts to develop the region are needed that are adapted to the potential, conditions and problems of the area concerned. West Sumatra Province which has a variety of potentials and problems so that the regional growth rate is also very diverse. Based on the stages of development according to Rostow's theory, West Sumatra Province is in the take-off stage and there are even some areas that are still in the prerequisite stage for takeoff. In looking at the growth rate and the strength of the relationship between regions by looking at the interaction of the region with the gravity model. To see the strength of the relationship between regions based on distance and population size variables, per capita income and the number of urban utilities, the analysis unit is regency / cities. The results of the analysis show that the strength of the relationship based on the variables of population, per capita income and the number of urban utilities is not always influenced by the proximity of the area to the center of government or the center of economic activity. Dharmasraya Regency, Pasaman Regency, Pasaman Barat Regency need special attention by the provincial and central governments in order to create growth and equitable development

.Keywords: regional economy; area regional development; gravity model

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan perubahan mendasar struktur sosial, sikap masyarakat, institusi-institusi

nasional, menjaga akselerasi pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan pengentasan kemiskinan (Todaro 2000). Pembangunan harus

diarahkan kepada terjadinya pemerataan (*equity*), pertumbuhan (*efficiency*) dan keberlanjutan (*sustainability*) yang berimbang dalam pembangunan ekonomi (Rustiadi *et al.* 2018).

Tahapan pembangunan sebagaimana yang dikemukakan oleh Rostow terdiri dari lima tahapan. Tahapan tersebut terdiri dari 1) tahap masyarakat tadisional, 2) tahap prasyarat lepas landas, 3) tahap lepas landas, 4) tahap menuju kematangan dan 5) tahap konsumsi tinggi. Pada tahap masyarakat tradisional dimana tingkat produksi per kapita dan tingkat produktivitas para pekerja masih sangat rendah sehingga hasil tidak disimpan atau diperdagangkan, sektor pertanian masih mendominasi kehidupan masyarakat, belum mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tahap ini juga pengaruh hubungan kekeluargaan dan kesukuan masih sangat besar terhadap organisasi masyarakat dan dalam menentukan kedudukan seseorang serta kebijakan yang dibuat masih dipengaruhi oleh tuan tanah yang berkuasa di daerah.

Tahap prasyarat lepas landas kehidupan masyarakat tidak lagi didominasi oleh pertanian tetapi sudah mulai berkembang industri khususnya industri pertambangan. Pada tahap ini sudah mulai ada pengaruh dari luar wilayah sehingga teknologi dan ilmu pengetahuan mulai berkembang dalam upaya peningkatan hasil produksi pertanian. Dengan adanya perkembangan tersebut maka perlu adanya pendanaan dari luar. Pola kehidupan masyarakat juga berubah dimana hasil produksi tidak hanya sebatas konsumsi tetapi masyarakat mulai berfikir untuk menabung dan berinvestasi. Pada tahapan ini juga mulai bermunculan lembaga-lembaga dan organisasi tingkat nasional dan elit-elit baru. Perubahan yang terjadi tersebut di negara-negara Eropa, Asia Timur, Timur Tengah dan Afrika dengan merombak masyarakat tradisional yang sudah ada. Sedangkan untuk negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Selandia Baru perubahan tersebut dilakukan tanpa merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada.

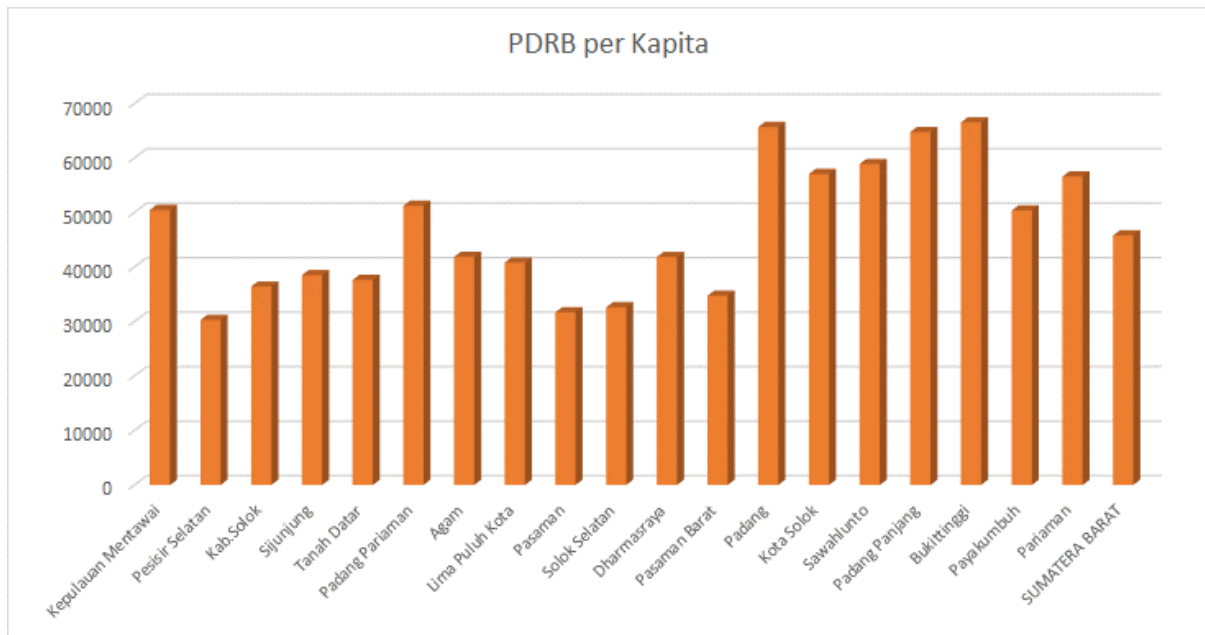
Tahap lepas landas dimana pada tahap ini industrialisasi semakin meningkat, terjadi perkembangan satu atau beberapa industri dengan tingkat laju pertumbuhan yang tinggi. Tingkat tabungan dan investasi juga semakin meningkat, laju investasi dan tabungan meningkat 5-10 persen dari pendapatan nasional. Pada tahapan ini juga terjadi peningkatan pertumbuhan regional dan terjadi

penurunan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian. Ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi semakin berkembang serta semakin berkembang pula industri manufaktur.

Pada tahap menuju kematangan keadaan perekonomian terus menerus bertumbuh yang terkadang bersifat fluktuatif. Pada tahap ini teknologi modern semakin berkembang diberbagai sektor kegiatan-kegiatan perekonomian. Industri baru semakin berkembang dengan sangat pesat dan meninggalkan industri-industri lama, sehingga barang yang dulunya berasal dari luar wilayah sudah mampu di produksi dalam wilayah sendiri. Tingkat tabungan dan investasi semakin meningkat dengan persentase 10-20 persen dari pendapatan nasional.

Tahap konsumsi tinggi merupakan tahapan pembangunan tertinggi menurut teori Rostow. Pada tahap ini pendapatan perkapita masyarakat meningkat sampai pada titik dimana sebagian besar masyarakat mampu membeli barang-barang konsumsi tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Proporsi tenaga kerja pada tahap ini yang terbesar adalah di bidang jasa. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan politik pada tahap ini juga semakin besar dimana setiap wilayah berlomba-lomba memperbesar pengaruh dan kekuasaannya terhadap wilayah lainnya. Pada tahap ini juga tercipta *welfare state* dimana terciptanya kemakmuran yang lebih merata untuk masyarakat dengan menciptakan pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem perpajakan yang progresif.

Berdasarkan tahapan pembangunan Rostow tersebut, Provinsi Sumatera Barat masih berada dalam tahapan lepas landas bahkan ada beberapa wilayah yang ada di Sumatera Barat masih dalam tahapan prasyarat lepas landas. Hal tersebut dapat kita lihat pada beberapa wilayah di Sumatera Barat masih menggunakan teknologi konvensional dalam peningkatan hasil produksi pertaniannya belum menggunakan teknologi moderen. Beberapa wilayah lainnya inovasi teknologi dalam upaya peningkatan hasil produksi pertanian sudah meningkat dan industri-industri manufaktur juga mulai berkembang. Beberapa wilayah memiliki pendapatan perkapita yang cukup tinggi, sedangkan wilayah lainnya masih memiliki pendapatan perkapita yang rendah. Tahapan ini merupakan masa transisi dimana prasyarat-prasyarat pertumbuhan swadaya dibangun atau diciptakan (Jhingam 2016).



Sumber: Provinsi dalam angka, 2020

Gambar 1. Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan data pendapatan per kapita masyarakat dapat kita lihat beberapa wilayah memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah dari pendapatan per kapita provinsi. Kabupaten/kota yang memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah dari pendapatan per kapita provinsi adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Pasaman, Solok Selatan dan Pasaman Barat. Dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan perlu dilakukan pengembangan kawasan yang disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan kondisi wilayah yang bersangkutan (Sumpeno 2011). Pengembangan kawasan atau wilayah merupakan gambaran tentang pengembangan wilayah sebagai hubungan yang harmonis antara sumber daya alam, manusia dan teknologi dengan memperhitungkan daya tampung lingkungan dalam memberdayakan masyarakat.

Untuk mendapatkan gambaran pengembangan wilayah dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan, maka perlu untuk melihat interaksi wilayah. Interaksi wilayah digunakan untuk melihat kekuatan hubungan dan tingkat perkembangan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini diperlukan dalam membuat prioritas kebijakan pembangunan, dimana kebijakan pembangunan difokuskan pada kabupaten/kota yang memiliki pendapatan per kapita yang masih di bawah pendapatan per kapita provinsi. Dalam melihat interaksi wilayah kabupaten/kota dengan menggunakan model gravitasi. Konsep dasar model gravitasi adalah menitikberatkan pada ukuran dan

jarak satu wilayah dengan wilayah lainnya dengan menghitung kekuatan relatif dari hubungan antar wilayah (Muta'ali 2015).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk melihat gambaran pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Metode kuantitatif dilakukan dengan mengkaji berbagai penelitian yang terkait dengan pengembangan wilayah. Informasi dan data yang dikumpulkan terkait dengan data kependudukan, jumlah utilitas perkotaan dan pendapatan per kapita kabupaten/kota. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu data provinsi dan kabupaten/kota dalam angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Alat analisis yang digunakan adalah model gravitasi, Dalam model gravitasi wilayah dianggap sebagai suatu massa sehingga hubungan antar wilayah disamakan dengan hubungan antar massa. Setiap massa wilayah mempunyai daya tarik sehingga akan terjadi saling mempengaruhi antar wilayah.

Dalam penelitian ini untuk melihat interaksi wilayah kabupaten/kota akan menghasilkan ragam model gravitasi berdasarkan jumlah penduduk, utilitas

perkotaan dan pendapatan per kapita kabupaten/kota dan jarak antar wilayah. Menurut Warpani (1980) dan Muta'ali (2015) massa dalam model gravitasi terdiri dari massa 1 dan massa 2, dimana massa 1 adalah tetap dan massa dua akan beragam. Pada penelitian ini yang menjadi massa 1 adalah Kota Padang yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat dan massa 2 adalah kabupaten/kota lainnya yang ada di Sumatera Barat. Hasil perhitungan model gravitasi akan memperlihatkan kabupaten/kota mana yang mempunyai interaksi yang kuat dengan pusat pemerintahan berdasarkan variabel jumlah penduduk, jumlah utilitas perkotaan dan pendapatan per kapita. Formula yang digunakan dalam model gravitasi adalah:

$$I_{12} = g \frac{m_1 m_2}{r^b_{12}}$$

Keterangan:

- I12 = interaksi antar wilayah 1 dan 2
- m1 = massa wilayah 1
- m2 = massa wilayah 2
- r12 = jarak antar wilayah 1 dan 2
- b = konstanta jarak, tergantung dari nilai aksesibilitas wilayah dimana semakin baik aksesibilitas maka semakin kecil konstanta, sehingga potensi interaksinya semakin besar. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Vooheers (Muta'ali 2015) membuat konstanta pangkat jarak berdasarkan tujuan perjalanan, yaitu bekerja = 0.5, sosial = 3, serta untuk berbelanja, bisnis, rekreasi dan lain-lain = 2

g = konstanta proporsional (misal nilainya 1)

Nilai I_{12} menunjukkan interaksi antar wilayah atau eratnya hubungan antara wilayah pusat dengan wilayah lainnya, dimana semakin tinggi nilai I_{12} maka semakin erat hubungannya antara wilayah pusat dengan wilayah lainnya, sehingga semakin tinggi pula aktivitas ekonomi pada wilayah tersebut (Muta'ali 2015). Menurut Nyoman dan Utama (2011) wilayah yang mempunyai nilai I_{12} tinggi memiliki ciri sebagai wilayah pusat, wilayah strategis dan tingkat keterhubungan wilayah yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Sumatera Barat terletak di pesisir barat Pulau Sumatera dengan luas wilayah 42,2 ribu km² atau setara dengan 2,21 persen dari luas Indonesia. Secara geografis Sumatera Barat berada pada 0^o 54' Lintang Utara dan 3^o 30' Lintang Selatan dan antara 98^o 36' – 101^o 53' Bujur Timur.

Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dengan Kota Padang sebagai ibukota provinsi. Kota Padang sebagai ibukota provinsi merupakan wilayah yang paling banyak diminati sebagai daerah hunian mencapai 17,33 persen dari total penduduk Sumatera Barat. Sedangkan berdasarkan kepadatan penduduk, Kota Bukittinggi yang memiliki kepadatan lebih tinggi di bandingkan Kota Padang. Hal tersebut disebabkan karena perkembangan Kota Bukittinggi yang cukup pesat di sektor wisata yang menyebabkan tingginya penyerapan tenaga kerja.

Tabel 1. Jumlah Penduduk, Pendapatan per Kapita dan Utilitas Perkotaan Kabupaten/Kota

No	KABUPATEN	Jumlah Penduduk	Pendapatan Per Kapita (juta)	Utilitas Perkotaan
1	KEP. MENTAWAI	92021	50.46	123
2	PESISIR SELATAN	463923	30.27	230
3	SOLOK	373414	36.39	80
4	SIJUNJUNG	237376	38.48	143
5	TANAH DATAR	348219	37.6	66
6	PADANG PARIAMAN	415613	51.22	78
7	AGAM	491282	41.83	143
8	LIMA PULUH KOTA	382817	40.79	88
9	PASAMAN	281211	31.68	66
10	SOLOK SELATAN	171075	32.59	86
11	DHARMASRAYA	247579	41.81	76
12	PASAMAN BARAT	443722	34.71	122
	KOTA			

No	KABUPATEN	Jumlah Penduduk	Pendapatan Per Kapita (juta)	Utilitas Perkotaan
13	PADANG	950871	65.68	517
14	SOLOK	71010	57.04	58
15	SAWAHLUNTO	62524	58.88	101
16	BUKITTINGGI	130773	66.52	141
17	PADANG PANJANG	53693	64.75	131
18	PAYAKUMBUH	135573	50.37	111
19	PARIAMAN	88501	56.59	102

Sumber: Provinsi dan Kabupaten Dalam Angka, 2020

Berdasarkan jumlah penduduk wilayah yang mempunyai jumlah penduduk terbesar adalah Kota Padang sebesar 950.871 jiwa dan yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Kota Padang Panjang sebesar 53.693 jiwa. Pendapatan per kapita tertinggi adalah Kota Bukittinggi sebesar 66,52 juta yang diikuti Kota Padang sebesar 65,68 juta dan Kota Padang Panjang sebesar 64,75 juta. Wilayah yang mempunyai pendapatan per kapita paling rendah adalah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 30,27 juta. Sedangkan utilitas perkotaan yang terdiri dari jumlah rumah sakit, jumlah hotel, jumlah restoran dan jumlah perguruan tinggi, wilayah yang memiliki utilitas perkotaan terbanyak adalah Kota Padang sebanyak 517 unit. Wilayah yang memiliki utilitas perkotaan yang sedikit adalah Kota Solok sebanyak 58 unit.

Dalam model gravitasi penentuan massa untuk melihat interaksi wilayah sangat bergantung pada

tujuan yang ingin di capai dalam suatu penelitian (Muta'ali 2015). Hasil dari beberapa penelitian yang telah dilakukan variabel yang umum digunakan sebagai massa adalah jumlah penduduk, pendapatan wilayah, pendapatan per kapita, kesempatan kerja, besaran investasi, potensi wilayah dan berbagai variabel ekonomi lainnya. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan sebagai massa adalah jumlah penduduk, pendapatan perkapita dan jumlah utilitas perkotaan yang terdiri dari jumlah rumah sakit, jumlah hotel, jumlah restoran, jumlah perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan model gravitasi diperoleh interaksi wilayah setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari variabel jumlah penduduk, pendapatan per kapita dan jumlah utilitas perkotaan (tabel 2)

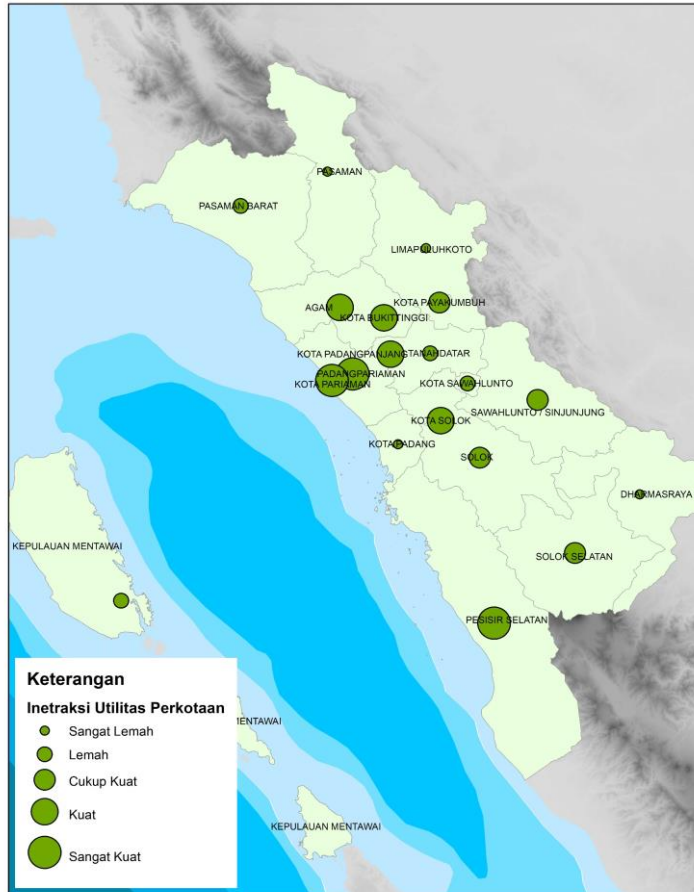
Tabel 2. Hasil Perhitungan Interaksi Wilayah

No	Kabupaten/Kota	Jarak	J ²	Interaksi Jumlah Penduduk	Interaksi Pendapatan per Kapita	Inetraksi Utilitas Perkotaan
1	KEP. MENTAWAI	174	30276	2.89	0.11	2.10
2	PESISIR SELATAN	77	5929	74.40	0.34	20.06
3	SOLOK	87	7569	46.91	0.32	5.46
4	SIJUNJUNG	127	16129	13.99	0.16	4.58
5	TANAH DATAR	102	10404	31.83	0.24	3.28
6	PADANG PARIAMAN	35	1225	322.61	2.75	32.92
7	AGAM	114	12996	35.95	0.21	5.69
8	LIMA PULUH KOTA	172	29584	12.30	0.09	1.54
9	PASAMAN	169	28561	9.36	0.07	1.19
10	SOLOK SELATAN	106	11236	14.48	0.19	3.96
11	DHARMASRAYA	210	44100	5.34	0.06	0.89
12	PASAMAN BARAT	172	29584	14.26	0.08	2.13
13	PADANG	0	0	0.00	0.00	0.00
14	SOLOK	65	4225	15.98	0.89	7.10
15	SAWAHLUNTO	148	21904	2.71	0.18	2.38

Padang Pariaman. Kabupaten/ kota yang memiliki kekuatan hubungan yang kuat dengan pusat pemerintahan adalah Kabupaten Agam, Kota Solok dan Kabupaten Tanah Datar.

dibandingkan kabupaten/ kota lainnya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Martines dan Masron, hasil analisis memperlihatkan kekuatan hubungan variabel jumlah utilitas perkotaan Kabupaten Pasaman mempunyai kekuatan hubungan yang sangat lemah terhadap pusat pemerintahan (Kota Padang). Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah utilitas perkotaan yang ada di Kabupaten Pasaman lebih sedikit dibandingkan kabupaten/ kota lainnya. Kelengkapan infrastruktur suatu wilayah menjadi alasan masyarakat untuk memilih tempat tinggal.

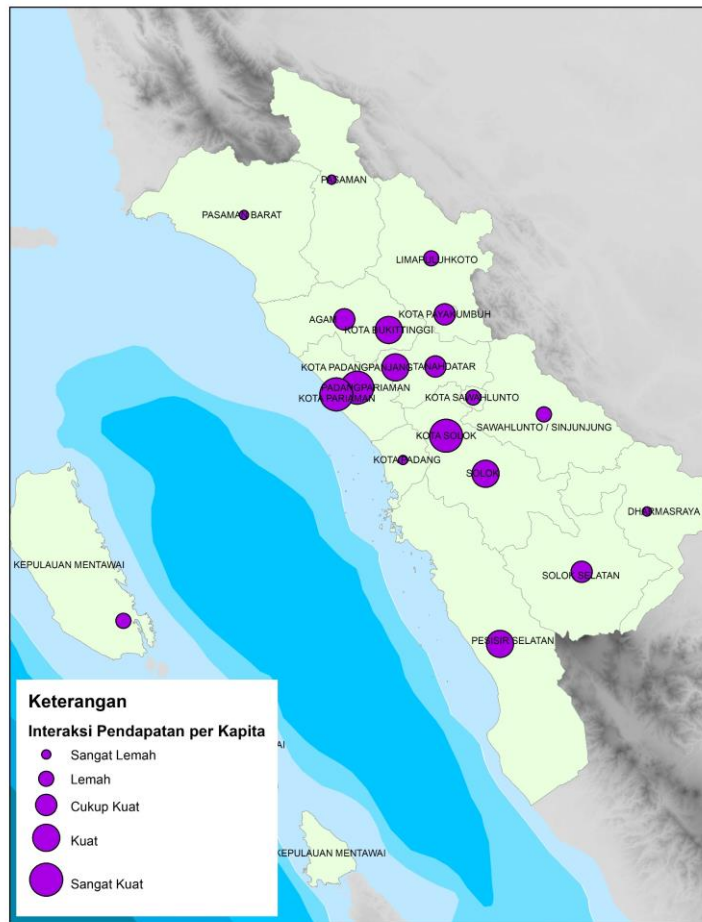
Wilayah yang mempunyai kekuatan hubungan yang sangat kuat berdasarkan variabel utilitas perkotaan adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Wilayah yang mempunyai kekuatan hubungan dalam kelas kuat adalah Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Padang Panjang. Wilayah yang mempunyai kekuatan hubungan yang sangat lemah adalah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pasaman. Wilayah yang mempunyai kekuatan hubungan lemah adalah Kota Sawahlunto dan Kabupaten Tanah Datar.



Gambar 3. Inetraksi Wilayah Variabel Jumlah Utilitas Perkotaan

Berdasarkan hasil analisis interaksi wilayah dengan variabel jumlah utilitas perkotaan dapat di lihat ada keterkaitan jumlah utilitas perkotaan dengan jumlah penduduk sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Martines dan Masron (2020). Salah satu alasan masyarakat untuk memilih tempat tinggal adalah kelengkapan infrastruktur di suatu wilayah. Hal ini dapat kita lihat Kabupaten Dharmasraya yang memiliki jumlah utilitas perkotaan yang lebih sedikit dibandingkan kabupaten/kota lainnya memiliki jumlah penduduk yang lebih kecil dibandingkan kabupaten/ kota lainnya.

Hal tersebut juga terjadi untuk wilayah Kabupaten Pasaman. Kabupaten Pasaman mempunyai kekuatan hubungan yang lemah dengan pusat pemerintahan (Kota Padang). Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk di Kabupaten Pariaman yang lebih kecil



Gambar 4. Inetraksi Wilayah Variabel Pendapatan per Kapita

Berdasarkan hasil analisis interaksi wilayah variabel pendapatan per kapita dapat dilihat wilayah-wilayah yang mempunyai kekuatan hubungan yang sangat kuat dengan pusat pemerintahan (Kota Padang) adalah Kota Solok, Kota Pariaman dan Kabupaten Pariaman. Wilayah yang mempunyai kekuatan hubungan yang masuk dalam kelas kuat adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi. Wilayah yang mempunyai kekuatan hubungan yang cukup kuat adalah Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok Selatan dan Kota payakumbuh

Sedangkan wilayah-wilayah yang mempunyai kekuatan hubungan yang lemah terhadap pusat pemerintahan (Kota Padang) adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Sawahlunto. Wilayah yang mempunyai kekuatan hubungan yang sangat lemah adalah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Hal tersebut menunjukkan pendapatan per kapita

pada wilayah tersebut mempunyai nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

Secara besaran nilai pendapatan per kapita yang terkecil adalah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 30,27 juta, tetapi dengan jarak yang cukup dekat dengan pusat pemerintahan (Kota Padang) menyebabkan kekuatan hubungan Kabupaten Pesisir Selatan masuk dalam kelas kuat. Hal tersebut disebabkan karena adanya pergerakan aktifitas ekonomi dari Kota Padang ke Kabupaten Pesisir Selatan.

KESIMPULAN

Penelitian ini untuk melihat kekuatan hubungan antar kabupaten/ kota dengan pusat pemerintahan yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, pendapatan per kapita dan jumlah utilitas perkotaan yang terdiri dari jumlah rumah sakit, jumlah restoran, jumlah hotel dan jumlah perguruan tinggi. Hasil analisis dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan prioritas dalam pengembangan wilayah.

Kekuatan hubungan wilayah serta pembangunan di suatu wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh kedekatan wilayah tersebut dengan pusat pemerintahan atau pusat kota tetapi dipengaruhi juga oleh hal lain. Faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tinggal di suatu wilayah adalah adanya jumlah utilitas perkotaan atau infrastruktur di suatu wilayah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Martines dan Masron (2020), Amelia (2019), Kuncoro dan Rahajeng (2005). Hal lain yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk tinggal di suatu wilayah adalah tingkat keamanan wilayah bersangkutan (Hanim dan Ragimun 2015, Kuncoro dan Rahajeng 2005, Limanlı 2015), teknologi (Melliger dan Lilliestam 2021).

Hasil analisis intraksi wilayah variabel jumlah penduduk memperlihatkan kekuatan hubungan yang lemah dan sangat lemah adalah Kabupaten Pasaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya dan Kota Sawahlunto. Hasil analisis interaksi wilayah variabel utilitas perkotaan memperlihatkan kekuatan hubungan yang lemah dan sangat lemah adalah Kabupaten Dharmasraya,

Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Sawahlunto. Kabupaten/ kota tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah maupun pusat karena pada wilayah tersebut keberadaan utilitas perkotaan yang masih sangat minim, hal tersebut menyebabkan wilayah-wilayah tersebut menjadi wilayah yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil analisis interaksi wilayah variabel pendapatan per kapita memperlihatkan kekuatan hubungan lemah dan sangat lemah dengan pusat pemerintahan adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Sawahlunto. Pada wilayah-wilayah tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian pada wilayah tersebut agar terjadi peningkatan pendapatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, S. 2019. The Stimulant Assistance Program Of Self-Help Housing In Attempts To Improve The Living Quality Of Middle-Class In Indonesia The Stimulant Assistance Program Of Self-Help Housing In Attempts To Improve The Living Quality Of Middle-Class In Indonesia. 24(August), 55–64. doi.org/10.9790/0837-2408035564
- Badan Pusat Statistik. 2020. Kabupaten Dalam Angka. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2020. Provinsi Dalam Angka. Jakarta
- Friedman, John dan Alloson. 2008. Regional Economic Development and Planning. Mars. MIT Press
- Hanim, A., & Ragimun, R. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investasi Di Daerah : Study Kasus Di Kabupaten Jember Jawa Timur. Kajian Ekonomi Dan Keuangan, 14(3), 3–20. doi.org/10.31685/kek.v14i3.55)
- Kuncoro. M., Rahajeng. A. 2005. Daya Tarik Investasi dan Pungli di DIY. Jurnal Ekonomi Pembangunan volume 10 no. 2 hal 171-184
- Kurniati, E., & Rahardjo, N. 2015. Evaluasi Metode Klasifikasi dalam Pembuatan Peta Kepadatan Penduduk DIY dengan Permukaan Statistik dan Uji Proporsi. Bumi Indonesia
- Limanlı, Ö. (2015). Determinants of R&D Investment Decision in Turkey. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 195, 759–767. doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.471
- Martinez, R., & Masron, I. N. 2020. Jakarta: A city of cities. *Cities*, 106 (July). doi.org/10.1016/j.cities.2020.102868
- Melliger, M., & Lilliestam, J. 2021. Effects of coordinating support policy changes on renewable power investor choices in Europe. *Energy Policy*, 148(PB), 111993. doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111993
- Muta'ali, L. 2015. Teknik Analisis Regional; Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan. Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFGe) Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- Nyoman, N., Andriyani, S., & Utama, M. S. 2011. Analisis pusat pertumbuhan di kabupaten karangasem. *Jurnal EP Unud*, 4(4), 220–229
- Rustiadi, R., Saefulhakim, S., Panuju, D.R. 2018. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta
- Supeno, Wahjudin. 2011. Perencanaan Desa Terpadu, Edisi Kedua, Penerbit Read. Aceh
- Warpani. S. 1980. Analisis Kota dan Daerah. Penerbit ITB. Bandung

ANALISIS PENANGANAN KEMACETAN LALU LINTAS KORIDOR JALAN JATIWARINGIN KOTA BEKASI

Fauziya Bagawat Sari, ST. MT

Abstrak

Jalan Jatiwaringin merupakan jalan arteri sekunder, yang secara geografis menghubungkan jalan penghubung antara Kota Bekasi dengan Kota Jakarta. Posisi ini membawa pengaruh bagi perkembangan Jalan Jatiwaringin ditandai oleh perkembangan aktivitas sosial yaitu pendidikan, perdagangan, perkantoran dan jasa. Meningkatnya aktivitas sosial mempunyai pengaruh besar terhadap tingginya bangkitan lalu lintas yang ada di Jalan Jatiwaringin, hal tersebut dapat dilihat dari nilai VCR mencapai 1,03 pada jam sibuk pagi dan sore, faktor tersebut menunjukkan kemacetan lalu lintas tinggi. Dari analisis, manajemen lalu lintas di ruas Jalan Jatiwaringin banyak jalan masuk Studi ini mencoba mencari faktor faktor yang mempengaruhi rendahnya derajat pelayanan Jalan Jatiwaringin serta mengusulkan bentuk penanganan masalah kemacetan lalu lintas yang dapat membantu kelancaran perjalanan di Jalan Jatiwaringin

Kata kunci: Kemacetan; Lalu Lintas; Arteri Sekunder

Abstract

Jalan Jatiwaringin is a secondary arterial road that geographically connects the connecting road between Bekasi City and Jakarta City. This position had an impact on the development of Jalan Jatiwaringin which was marked by the development of social activities, namely education, trade, offices and services. The increase in social activity has a major effect on the high traffic flow on Jalan Jatiwaringin, that could be seen from the VCR value of 1.03 during morning and evening rush hours, this factor indicated high traffic congestion. From the analysis, the traffic management on Jalan Jatiwaringin has many roads. This research tries to find the factors that influence the low level of service on Jalan Jatiwaringin and proposes a form of congestion handling that can help smooth travel on Jalan Jatiwaringin

Keywords: Congestion; Traffic; Secondary Artery

PENDAHULUAN

Masalah lalu-lintas dilihat dari kerangka system transportasi perkotaan, mempunyai keterkaitan antara system jalan raya dan kendaraan yang ada dengan kebutuhan pergerakan akibat pola kegiatan perkotaan. Pola kegiatan perkotaan ini sangat ditentukan oleh tiga factor, yaitu faktor penduduk, factor kegiatan ekonomi dan factor pemanfaatan ruang (Herbert G. Kariel, Exploration in Sosial Geography, 1972 : 311). Peningkatan salah satu faktor

tersebut di atas tentunya akan membawa dampak bagi faktor lainnya, yang pada akhirnya akan meningkatkannya pergerakan barang dan manusia. Peningkatan kebutuhan pergerakan ini seharusnya diimbangi pula dengan peningkatan system jalan raya dan kendaraan sebagai sarana pergerakan.

Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035, kedudukan Jalan Jatiwaringin dalam Struktur Kota

Bekasi berfungsi sebagai pusat kegiatan Jasa dan perdagangan dan konsentrasi pendidikan skala regional dan wilayah permukiman dengan kepadatan tinggi.

Disepanjang Jalan Jatiwaringin terdapat kegiatan perdagangan, perkantoran serta fasilitas pendidikan, yaitu berupa pasar, pertokoan, bank, restoran, kantor swasta dan kantor pemerintah serta fasilitas pendidikan berupa SD, SMP, SMU serta Perguruan Tinggi. Selain itu terdapat pertokoan yang mempunyai skala pelayanan luas, seperti Giant, Mall Pondok Gede dan Pasar Pondok Gede

Masalah kemacetan lalu lintas seringkali terjadi pada kawasan yang mempunyai intensitas kegiatan dan penggunaan lahan yang tinggi. Selain itu, kemacetan lalu lintas terjadi karena volume lalu lintas tinggi yang disebabkan bercampurnya lalu lintas menerus (*trough traffic*), lalu lintas regional dan local. Bilamana sifat kemacetan lalu lintas tersebut merupakan suatu kejadian yang rutin, akibatnya bukan saja akan mempengaruhi inefisiensi penggunaan sumber daya, tetapi juga dapat mengganggu kegiatan di lingkungan yang ada. Selain itu, berdampak luas pula terhadap kelancaran kegiatan sosial ekonomi kota. Demikian juga yang terjadi di Jalan Jatiwaringin yang menghubungkan antara Kota Bekasi dengan Kota Jakarta setiap hari kerja maka ruas jalan ini selalu terjadi kemacetan lalu lintas. Panjang ruas Jalan Jatiwaringin secara keseluruhan 3 Km mempunyai Rumija sebesar 16 meter terdiri atas dua arah –empat lajur.

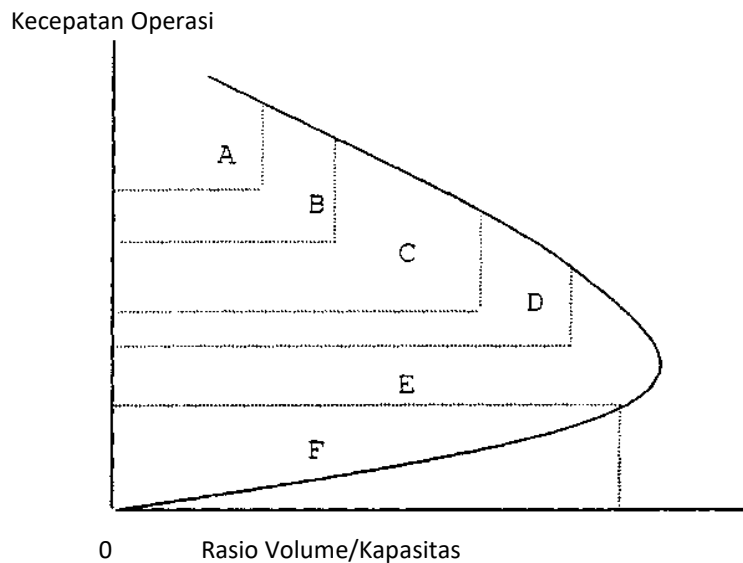
Landasan Teori

Highway capacity manual menetapkan 6 tingkat pelayanan, yaitu mulai dari A sampai F. masing-masing tingkat pelayanan tersebut memiliki karakteristik

operasi lalu lintas tersendiri. Secara umum karakteristik arus lalu lintas masing-masing tingkat pelayanan jalan adalah sebagai berikut :

- Tingkat pelayanan A (arus bebas)
Keadaan arus bebas dengan volume rendah dan kecepatan tinggi. Dalam bergerak, kendaraan tidak terpengaruh oleh arus lalu lintas. Tundaan pada persimpangan minimal. Pada derajat pelayanan ini pengemudi dapat memilih kecepatan yang dikehendaki walaupun ada pembatas kecepatan maksimum dan kondisi geometrik jalan.
- Tingkat pelayanan B
Pada tingkat pelayanan ini, keadaan arus lalu lintas stabil dengan kecepatan yang mulai dibatasi oleh keadaan lalu lintas. Kemampuan untuk bergerak relatif tidak terganggu, dan tundaan tidak begitu banyak
- Tingkat pelayanan C
Keadaan lalu lintas masih stabil, tetapi kecepatan dan kebebasan bergerak lebih banyak dipengaruhi oleh volume lalu lintas yang tinggi dan relatif lebih terbatas dibandingkan dengan tingkat pelayanan B.

Gambar 1. Grafik Tingkat Pelayanan dan Perbandingan Volume Terhadap Kapasitas Jalan



Sumber : Highway Capacity Manual (1985), hal 80-81.

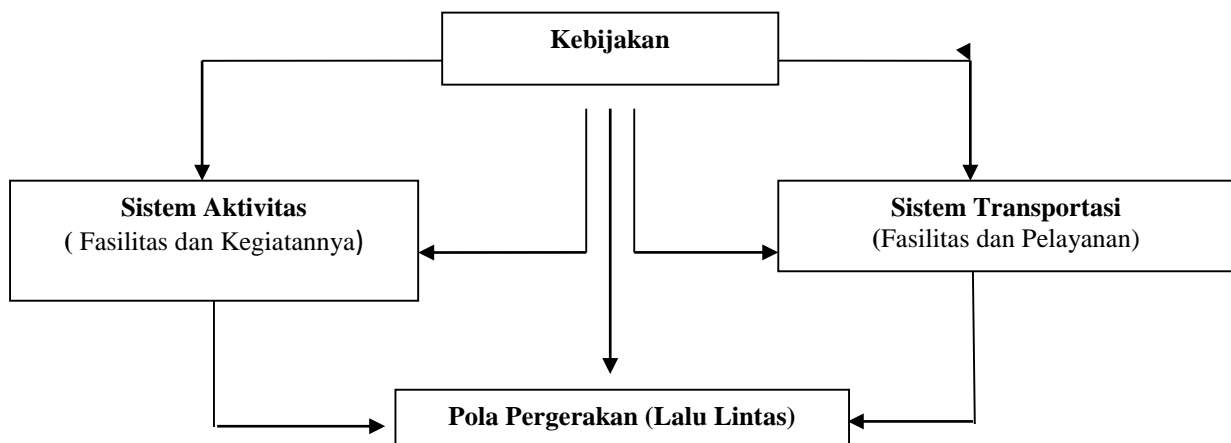
METODE PENELITIAN

Pendekatan pada penelitian ini berdasarkan pemahaman dengan menggunakan **Teori Hubungan dengan Kerangka Dasar Transportasi**, yang mana untuk mengatasi kemacetan lalu-lintas dengan menganalisis tingkat pelayanan jalan, system aktivitas penduduk, penggunaan lahan dan kebijakan

yang ada. Variabel-variabel tersebut mempunyai hubungan sebab akibat satu sama lain. Pendekatan terhadap permasalahan transportasi dilakukan dengan memahami bahwa arus lalu-lintas timbul karena adanya interaksi antara sistem aktivitas (demand system), system transportasi (supply system) dan kebijakan. Sistem aktivitas mencakup fasilitas dan pelayanan transportasinya.

Gambar 2.

Hubungan Sistem Aktivitas, Sistem Transportasi dan Kebijakan



Sumber : Koesbiantoro, Sistem Transportasi Perkotaan, 1987:32

Metode Pengumpulan Data.

Teknik Pengumpulan Data Primer.

Data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus (Masri Singarimbun, 1989, hal 12). Teknik pengumpulan data yang diterapkan berupa survey lapangan yaitu lebar jalan, hambatan samping, volume lalu lintas, survey waktu tempuh dan komunikasi langsung melalui interview/wawancara dengan sampel terpilih.

Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain meskipun data yang terkumpul tersebut sesungguhnya merupakan data asli (Winarno Surakhmad, 1980, hal 163). Keuntungan dari penataan data ini adalah tidak diperlukannya lagi pengeluaran dana untuk mengumpulkan data di lapangan yang banyak memakan waktu dan energi (Masri Singarimbun, 1989, hal 12).

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari instansi dan lembaga terkait yaitu : Dinas Perhubungan, Biro Pusat Statistik, Dinas Tata Ruang, Kantor Kecamatan. Data tersebut meliputi dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi.

Metode Survey

Analisis terhadap kemacetan lalu lintas terhadap Jalan Jatiwaringin membutuhkan data mengenai volume lalu lintas harian rata rata . Untuk memperoleh data tersebut, maka perlu dilakukan suatu metode survey lapangan, yaitu metode *traffic counting*. Metode ini dilakukan untuk mengetahui secara nyata besaran pergerakan yang ada di persimpangan yang ada di jalan utama, yaitu jalan Jatiwaringin yang dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dipergunakan untuk menganalisis guna mengetahui tingkat pelayanan jalan (*LOS*) Jalan Jatiwaringin. Objek yang disurvei dalam perhitungan lalu lintas ini adalah :

- Jumlah kendaraan yang lewat (volume) dalam satuan waktu 15 (lima belas) menit . Kendaraan yang di survey, dalam formulir sudah dikelompokkan jenisnya menjadi 12 jenis kendaraan sesuai dengan format URMS (Urban Road Managemen System).
- Kecepatan kendaraan, kecepatan gerak dan rata-rata.
- Kepadatan arus lalu-lintas

Untuk mendukung penelitian ini, survey dilakukan pada hari kerja dengan periode selama 6 jam pengamatan mulai pukul 06.00 sampai jam 20.00.

Metode Analisis Penelitian

$$C = C_o \times FC_w \times FC_{sp} \times FC_{sf} \times FC_{cs}$$

Dimana	:
C	= Kapasitas aktual (smp/jam)
C _o	= Kapasitas dasar (smp/jam)
FC _w	= Faktor penyesuaian lebar jalan
FC _{sp}	= Faktor arah (hanya untuk individu road)
FC _{sf}	= Gesekan samping dan factor penyesuaian bahu/kerb jalan
FC _{cs}	= Faktor besarnya kota

Analisis Bunga Berganda.

Untuk perhitungan proyeksi volume lalu lintas akan mempergunakan **Model Bunga Berganda** (Warpani, Suwarjoko, 1980)

$$V_t = V_o (1 + r)^n$$

Dimana :
V _t = volume lalu-lintas pada tahun t
V _o = volume lalu-lintas awal
r = laju pertumbuhan arus lalu-lintas
n = tahun k n

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengamatan survey yang dilakukan, penyebab kemacetan yang sering terjadi di Jalan Jatiwaringin adalah sebagai berikut :

Banyaknya Arus Kendaraan

Volume lalu lintas merupakan gambaran permintaan terhadap lalu – lintas pada suatu jalan, sedangkan kapasitas jalan merupakan bagian dari volume lalu-lintas maksimum yang dapat ditampung pada periode waktu tertentu. Ukuran ini penting dalam menilai sampai dimana pengoperasian jalan pada saat tertentu, yang biasanya dinilai dari rasio antara volume (sebagai gambaran dari kemampuan jalan untuk mengakomodasi

Analisis Kapasitas jalan.

Untuk dapat menghitung besarnya kapasitas jalan (*Highway Capacity Manual* 1985) dapat dipergunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

lalu-lintas). Suatu jalan dikatakan telah menemui masalah jika ratio antara volume dan kapasitas telah melebihi 1, yang artinya jalan ini telah melampaui lalu-lintas di atas kemampuannya. Hal ini dicerminkan dengan menurunnya kecepatan kendaraan, dan selanjutnya akan menurunkan tingkat pelayanan jalan tersebut.

Arus kendaraan yang melewati Jalan Jatiwaringin cukup banyak. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan (Tabel 1) tentang jumlah arus kendaraan ruas Jalan Jatiwaringin. Banyaknya kendaraan yang melewati Jalan Jatiwaringin karena jalan ini adalah salah satu jalan penghubung antara Kota Jakarta dengan Kota Bekasi dan sekitarnya.

Tabel 1. Rasio Volume dan Kapasitas Jalan Jatiwaringin- Jalan Pondok Gede Pagi dan Sore

Waktu Pengamatan	Volume (SMP/Jam)	Kapasitas	V/C	Tingkat Pelayanan Jalan
06.00-08.00	2800	3450	0,84	E Aliran lalu-lintas baik, stabil, dengan perlambatan masih diterima.
12.00-13.00	2690	3450	0,78	D Mulai ada gangguan gangguan lalu lintas. Aliran mulai tidak stabil.
14.00-16.00	3123	3450	0,91	E Volume pelayanan berada pada kapasitas, aliran mulai tidak stabil.
18.00-20.00	3570	3450	1,03	F Volume pelayanan lebih besar dari kapasitas telah mengalami kemacetan total

Sumber : Hasil Perhitungan Tahun 2021.

Dari Tabel 1 di atas terlihat bahwa jalan Jatiwaringin menunjukkan V/C macet, pada fluktuasi jam sibuk pagi pukul 06.00 – 08.00 dan sore pukul 16.00 – 20.00 terjadi kemacetan karena pola guna lahan di wilayah studi adalah pusat kegiatan jasa dan perdagangan dan konsentrasi Pendidikan tinggi skala regional (Universitas Assafiyah, Universitas Krisnadwipayana, BSI) yang sangat tinggi. Hambatan arus pergerakan kendaraan di pada lokasi persimpangan Jalan Gamprit tersebut sering terjadi kemacetan. Ini diakibatkan tidak ada system pengendalian dan pengaturan arah pergerakan mengakibatkan sering terjadi bentrokan antara arus menerus dengan

arus belok.

Angkutan Umum

Adapun moda angkutan yang digunakan oleh kegiatan Kecamatan Pondok Gede berasal dari berbagai jenis dan ukuran seperti kendaraan bus untuk mengangkut para pegawai, kendaraan pribadi, truk pengangkut barang sampai dengan angkutan umum yang memberikan kontribusi terbanyak.

Dilihat dari karakternya, pergerakan kendaraan yang ada di sediakan di Kecamatan Pondok Gede di dominasi oleh pergerakan eksternal, baik itu yang berasal dari luar dengan tujuan ke dalam

Kecamatan Pondok Gede dan begitu pula sebaliknya, sedangkan untuk pergerakan

lokal volumenya diprediksikan relatif masih kecil. Lihat Tabel 2.

Tabel 2 Rute Dan Jumlah Angkutan Umum Penumpang Yang Melalui Jl. Raya Jatiwaringin Dirinci Menurut Jenis Kendaraan Tahun 2021

NO	KODE RUTE	RUTE KENDARAAN	JENIS KENDARAAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	4 F	Pulo Gadung – Pondok Gede – Pinang Ranti	Busway	10
2	M.18	Kampung Melayu – Pondok Gede	Mikrolet	20
3	K.22	Pangkalan Jati – Pondok Gede	Koasi	20
4	K.22 A	Pondok Gede – Wali Kota JakTim	Koasi	10
5	GT.02	Pangkalan Jati - Rawamangun	Koasi	20
6	K.37	Klender – Komsen via Ratna	Koasi	15
7	G.05	Pondok Gede – Curug	Koasi	20
JUMLAH				225

Sumber : Observasi Lapangan, 2020

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan langsung dilapangan dan melalui analisis permasalahan menunjukkan bahwa titik lokasi kemacetan pada Jalan Jatiwaringin terjadi di ruas jalan antara depan Kampus Assyafiyah sampai dengan persimpangan Jalan Gamprit, terutama pada saat tingkat arus puncak yaitu pada pukul 06.00 – 08.00 WIB dan pukul 18.00 – 20.00 WIB. Penyebab kemacetan yang terjadi di Jalan Jatiwaringin adalah aktivitas pejalan kaki/penyebrang jalan, perilaku angkutan kota, banyaknya kendaraan dan persimpangan jalan. Selain itu, belum ada Jembatan Penyebrangan Orang (JPO). Berikut beberapa solusi untuk mengatasi kemacetan di Jalan Jatiwaringin yaitu :

1. Penataan sirkulasi lalu-lintas, melalui pemisahan jalur lalu-lintas menerus dan lokal (lalu-lintas yang memerlukan kecepatan tinggi, dengan lalu-lintas yang masih memiliki toleransi kecepatan), Penertiban/mengefektifkan fasilitas

rambu lalu lintas , marka jalan dan median jalan, Pengendalian persimpangan melalui penyediaan rambu dilarang parkir, dilarang berhenti serta penyediaan jalur belok kanan

2. Penanganan pengemudi angkot melalui penegakkan peraturan oleh instansi terkait dan optimalisasi fungsi terminal.
3. Pengaturan dan pengendalian kegiatan di Jalan Jatiwaringin sesuai dengan jalan tersebut. Pengendalian ini berupa pembatasan kepadatan bangunan, pembatasan jenis aktivitas tertentu yang sangat potensial dalam menarik arus lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- C. Jotin Khisty dan B.Kent Hall. (2005). *Dasar-dasar Rekayasa Transportasi Jilid 1*. Erlangga, Jakarta
- C. Jotin Khisty dan B.Kent Hall. (2005). *Dasar-dasar Rekayasa Transportasi Jilid 2*. Erlangga, Jakarta

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
(1999). *Rekayasa Lalu Lintas : Pedoman
Perencanaan dan Pengoperasian Lalu
Lintas Di Wilayah Perkotaan. Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta.*

Morlok, Edward K, 1985, *Pengantar
Teknik dan Perencanaan Transportasi,*
Terjemahan Johan.K, Hainim, Erlangga.
Jakarta

Warpani, Suwardjoko MTCP,1990,
Merencanakan Sistem Perangkutan
, Bharata Karya Aksara, Jakarta

ANALISIS KESESUAIAN RENCANA PEMANFAATAN RUANG PERKOTAAN DENGAN POLA PENGGUNAAN LAHAN (STUDI KASUS KECAMATAN JATI ASIH)

Herlin Sukmarini, ST, MSi¹

ABSTRAK

Kota Bekasi merupakan salah satu kota metropolitan Rencana Tata Ruang Kawasan Wilayah Nasional Jabodetabekpunjur, yang perkembangan pembangunannya sangat pesat. Kecamatan Jati Asih adalah kecamatan di Kota Bekasi yang letaknya sangat strategis dari segi komunikasi dan perhubungan. Dalam Peraturan Derah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035, pola ruang Kecamatan Jati Asih adalah kawasan budidaya yaitu kawasan peruntukan perumahan, kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan pemerintahan serta kawasan lindung yaitu kawasan peruntukan ruang terbuka hijau. Struktur ruang Kecamatan Jati Asih adalah Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) serta wilayah pengembangan SSPK Pondok Gede dan SSPK Jatisampurna. Isu strategis di Kecamatan Jatisih yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain : Alih Fungsi DAS Kali Bekasi dan Kali Cikeas menjadi Perumahan Pondok Gede Permai, Normalisasi Kali Bekasi, Penataan Ruang Kota Bekasi yang bermasalah karena mengizinkan pembangunan pabrik-pabrik industri di bangun di tepi-tepi kali Bekasi, dan Kecamatan Jati Asih menorehkan rekor wilayah dengan penerbitan IMB Perumahan terbanyak, yakni 513 IMB pada tahun 2018. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kesesuaian rencana pemanfaatan ruang (RDTR) perkotaan dengan pola penggunaan lahan di Kecamatan Jatisih.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menganalisis kesesuaian pemanfaatan ruang tersebut. Metode-metode yang digunakan antara lain : (1) Metode deskripsi kebijakan RDTR untuk mengetahui

pola pemanfaatan ruang dan ketentuan peraturan zonasi di Kecamatan Jatisih, (2) Metode kondisi pemanfaatan ruang menggunakan Klasifikasi GIS untuk mengetahui perkembangan dan faktor-faktor pemanfaatan ruang di Kecamatan Jatisih, dan (3) Metode kesesuaian pemanfaatan ruang menggunakan overlay GIS dan matriks sandingan untuk mengetahui kesesuaian pemanfaatan ruang dengan penggunaan lahan di Kecamatan Jatisih.

Hasil dari penelitian ini adalah Besar kesesuaian pemanfaatan ruang dengan penggunaan lahan eksisting Kecamatan Jatisih sebesar 27,983 km². Jika dipersentasekan dengan Luas Kecamatan Jatisih 37,36 km² hasilnya adalah 74,9%. Dan Jumlah total ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di Kecamatan Jatisih yaitu sebesar 1,291 km². Luas Kecamatan Jatisih sebesar 37,35 maka jika dipersentasekan nilai ketidak sesuaian pemanfaatan ruang di Kecamatan Jatisih yaitu 3,45%. Menurut Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi, Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang kurang berkualitas jika bernilai 50%-80% artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dan RTR.

Kata Kunci : *Kesesuaian Pemanfaatan Ruang*

¹ Dosen Tetap Prodi PWK

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Kota Bekasi merupakan salah satu kota metropolitan Rencana Tata Ruang Kawasan Wilayah Nasional Jabodetabekpunjur, yang perkembangan pembangunannya sangat pesat. Kecamatan Jati Asih adalah kecamatan di Kota Bekasi yang letaknya sangat strategis dari segi komunikasi dan perhubungan. Secara geografis kecamatan jati asih berada pada posisi 106,5753 bujur timur dan 6,1732 lintang selatan, dengan ketinggian 52 meter diatas permukaan laut. Kecamatan Jati Asih berbatasan dengan :

- Sebelah Timur : Kabupaten Bogor dan Kecamatan Rawa Lumbu,
- Sebelah Utara : Kecamatan Bekasi Selatan dan Kecamatan Pondok Gede,
- Sebelah Selatan : Kecamatan Jati Sampurna,
- Sebelah Barat : Kecamatan Pondok Melati dan Kecamatan Pondok Gede.

Dalam Peraturan Derah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035, pola ruang Kecamatan Jati Asih adalah kawasan budidaya yaitu kawasan peruntukan perumahan, kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan pemerintahan serta kawasan lindung yaitu kawasan peruntukan ruang terbuka hijau. Struktur ruang Kecamatan Jati Asih adalah Pusat Pelayanan Lingkungan

(PPL) serta wilayah pengembangan SSPK Pondok Gede dan SSPK Jatisampurna. Isu strategis di Kecamatan Jatiasih yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain : Alih Fungsi DAS Kali Bekasi dan Kali Cikeas menjadi Perumahan Pondok Gede Permai, Normalisasi Kali Bekasi, Penataan Ruang Kota Bekasi yang bermasalah karena mengizinkan pembangunan pabrik-pabrik industri di bangun di tepi-tepi kali Bekasi, Tanggul kali Bekasi dibangun tidak sama ketinggiannya, tanggul yang sebelah pabrik lebih tinggi di dibandingkan tanggul di PGP, dan Kecamatan Jati Asih menorehkan rekor wilayah dengan penerbitan IMB Perumahan terbanyak, yakni 513 IMB pada tahun 2018.

Bedasarkan hal tersebut, untuk melaksanakan pembangunan kota yang lebih harmonis dan mampu mengantisipasi berbagai dampak yang timbul, terutama pada kota besar dan metropolitan maka perlu dilakukan pemantauan pemanfaatan ruang dan evaluasi dengan cara membandingkan penggunaan lahan eksisting dengan rencana tata ruang yang berlaku agar diketahui apakah setiap pemanfaatan ruang di daerah tersebut apakah sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

b. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perkembangan pemanfaatan ruang di Kecamatan Jati Asih?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemanfaatan ruang di Kecamatan Jati Asih?
3. Berapa besar kesesuaian pemanfaatan ruang dengan penggunaan lahan eksisting di Kecamatan Jati Asih?

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengidentifikasi perkembangan pemanfaatan ruang di Kecamatan Jati Asih;
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan ruang di Kecamatan Jati Asih;
3. Menganalisis kesesuaian pemanfaatan ruang RDTR Kota Bekasi dengan penggunaan lahan eksisting di Kecamatan Jati Asih.

d. Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah Kecamatan Jati Asih yang berada pada Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat yang meliputi enam kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Jatiasih
2. Kelurahan Jatiluhur
3. Kelurahan Jatikramat
4. Kelurahan Jatimekar
5. Kelurahan Jatirasa
6. Kelurahan Jatisari

2. Ruang Lingkup Substansi

Lingkup substansi materi kesesuaian pemanfaatan ruang RDTR Kota Bekasi dengan penggunaan lahan eksisting di Kecamatan Jati Asih, meliputi :

1. Melakukan identifikasi terhadap kebijakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bekasi terhadap aspek pemanfaatan ruang beserta Peraturan Zonasi (PZ);
2. Melakukan identifikasi terhadap kondisi pemanfaatan ruang di Kecamatan Jati Asih dari aspek : penggunaan lahan, sosial ekonomi, kondisi sarana dan prasarana, kondisi bencana alam, dan intensitas pemanfaatan ruang;
3. Melakukan analisis kesesuaian pemanfaatan ruang Kecamatan Jati Asih dengan teknik overlay peta penggunaan lahan dan peta Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi;
4. Melakukan analisis ketentuan peraturan zonasi dalam RDTR Kota Bekasi terhadap implementasinya di Kecamatan Jati Asih.

e. Metodologi Penelitian

Dalam Penelitian ini metode yang digunakan terdiri dari 2, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis.

A. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Pengumpulan Data Primer, Metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi dan wawancara.
2. Metode Pengumpulan Data Sekunder, Metode pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini terdiri

dari survei instansi dan survei literatur.

B. Metode Analisis

Adapun metode dan teknik analisis yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Data
 - a. Pengumpulan Data Primer
Adapun cara pengumpulan data primer yang dilakukan adalah observasi langsung dilapangan terhadap subjek yang diteliti.
 - b. Pengumpulan Data Sekunder
Yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data yang telah disusun diolah pada instansi terkait, yaitu Bappeda dan BPS Kota Bekasi.
2. Metode Analisis Data
 - a. Analisis Kebijakan RDTR Kecamatan Jatiasih menggunakan metode deskriptif analisis untuk mengetahui pola pemanfaatan ruang dan ketentuan peraturan zonasi di Kecamatan Jatiasih.
 - b. Analisis Kondisi Pemanfaatan Ruang menggunakan metode klasifikasi GIS untuk mengetahui perkembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan ruang di Kecamatan Jatiasih

- c. Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang menggunakan metode overlay GIS dan Matriks Sandingan untuk mengetahui kesesuaian pemanfaatan ruang dengan penggunaan lahan di Kecamatan Jatiasih

TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

- a. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR yang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
- b. Pemantauan Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan pengamatan secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap upaya untuk mewujudkan program struktur dan pola ruang sesuai dengan RTR yang telah ditetapkan;
- c. Evaluasi Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan penilaian terhadap upaya untuk mewujudkan program struktur dan pola ruang sesuai dengan RTR yang telah ditetapkan;
- d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban terhadap implementasi rencana sebagai tindak lanjut dari penyusunan atau adanya rencana, agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Ibrahim (1998 : 27)

- mengemukakan bahwa dengan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, maka dapat diidentifikasi sekaligus dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang;
- e. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, disebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif, serta pengenaan sanksi;
 - f. Peraturan Zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang;
 - g. Ketentuan Perizinan diatur oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif atau disinsentif oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Insentif merupakan upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Disinsentif merupakan upaya untuk mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - i. Pengenaan Sanksi merupakan tindakan yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pemanfaatan ruang, dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif adalah peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan denda administratif.
- 2. Teori Analisis Deskriptif**
- Menurut Sugiyono (2004; 142), “Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Tujuan utama dari statistik deskriptif adalah untuk menyajikan informasi dari data yang didapat di lapangan. Informasi tersebut dapat berupa tabel, grafik, maupun diagram. Menurut Nazir (1983:63) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, dan bertujuan

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Analisis deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data.

3. Teori Analisis GIS

SIG (Sistem Informasi Geografis) atau dikenal pula dengan GIS (Geographical Information System) merupakan suatu istilah dalam bidang pemetaan yang memiliki ruang lingkup mengenai bagaimana suatu sistem dapat menghubungkan objek geografis dengan informasinya. Rahmad dalam Skripsi Cita Ichtara 2008 mendefinisikan SIG berdasarkan pemahaman tiap-tiap kata yaitu :

- **Geografis**
SIG dibangun berdasarkan geografis atau spasial, didalamnya terdapat objek-objek yang dapat berupa fisik, budaya, atau ekonomi alamiah. Keterangan spasial dari objek-objek ini ditampilkan pada suatu peta untuk memberikan gambaran yang representatif dari keadaan sebenarnya di muka bumi.
- **Informasi**
Pada representasi permukaan geografis SIG, terdapat beberapa objek-objek dimana tiap-tiap objek memiliki informasi masing-masing yang unik. Hubungan langsung antara objek dan informasi yang bersifat

interaktif membuat peta menjadi intelligent.

- **Sistem**

Sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling berintegrasi dan berketergantungan dalam lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan tertentu. Pada SIG sistem merupakan kumpulan dari informasi, data geospasial, dan juga sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya.

- a. **Analisis Superimpose (Overlay)**

Overlay adalah prosedur penting dalam analisis SIG (Sistem Informasi Geografis). Overlay yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta diatas grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada plot. Secara singkatnya, overlay menampilkan suatu peta digital pada peta digital yang lain beserta atribut-atributnya dan menghasilkan peta gabungan keduanya yang memiliki informasi atribut dari kedua peta tersebut.

4. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi

1. Tata cara pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang
Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. kegiatan pemantauan pemanfaatan ruang

- b. kegiatan evaluasi pemanfaatan ruang
- c. kegiatan pelaporan

ketinggian antara 11m – 81 m diatas permukaan air laut.

b. Kemiringan Lereng

GAMBARAN UMUM

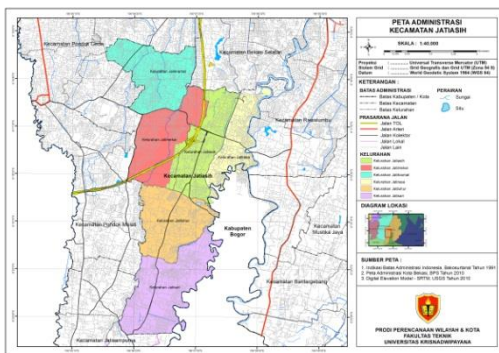
1. Gambaran Umum Wilayah

a. Administrasi dan Geografis Kecamatan Jatiasih

Kecamatan Jatiasih merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang ada dalam wilayah Kota Bekasi. Kecamatan Jatiasih memiliki luas wilayah sekitar 37,35 km².

Adapun batas-batas wilayah administrasi Kecamatan Jatiasih adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara :Kecamatan Bekasi Selatan
- Sebelah Selatan :Kecamatan Jatisampurna
- Sebelah Timur: Kecamatan Rawa Lumbu dan Kabupaten Bogor
- Sebelah Barat :Kecamatan Pondok Melati danPondok Gede



Gambar 1 Peta Administrasi Kecamatan Jatiasih

2. Kondisi Fisik Kecamatan Jatiasih

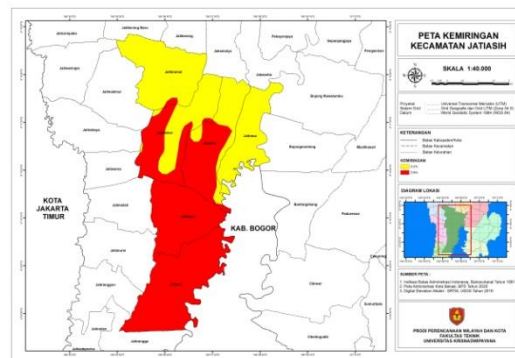
a. Topografi dan Ketinggian

Kondisi topografi Kecamatan Jatiasih 0 – 3 % dan terletak pada

Tabel 1 Kemiringan Lereng Menurut Kelurahan di Kecamatan Jatiasih

No	Kelurahan	Kemiringan		Luas (Ha)
		0-2%	2-8%	
1	Jatiasih	257,41	361,30	618,71
2	Jatikramat	613,65	11,31	624,95
3	Jatimekar	354,52	320,25	674,77
4	Jatirasa	421,62		421,62
5	Jatiluhur		555,77	555,77
6	Jatisari		838,90	838,90
Total		1.647,203	2.087,52	3.734,72

Sumber : RDTR Kota Bekasi Tahun 2016



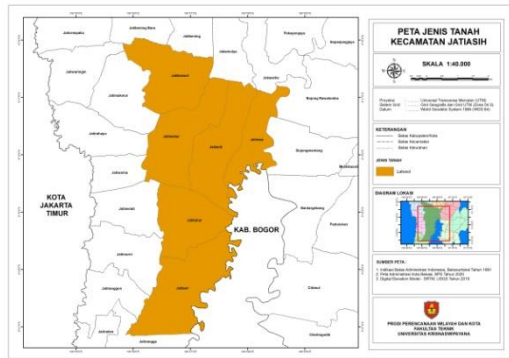
Gambar 2 Peta Morfologi atau Kemiringan Lereng Kecamatan Jatiasih

c. Jenis Tanah

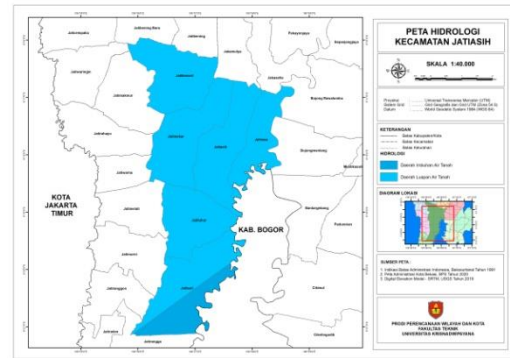
Tabel 2 Luasan Jenis Tanah Menurut Kelurahan di Kecamatan Jatiasih

No	Kelurahan	Luas Latosol (Km ²)
1	Jatiasih	6,19
2	Jatikramat	6,25
3	Jatiluhur	5,56
4	Jatimekar	6,75
5	Jatirasa	4,22
6	Jatisari	8,39
Total		37,35

Sumber : RDTR Kota Bekasi Tahun 2016



Gambar 3 Peta Jenis Tanah Kecamatan Jatiasih



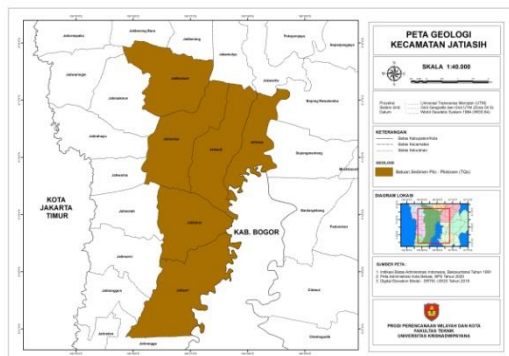
Gambar 5 Peta Hidrologi Kecamatan Jatiasih

d. Geologi

Tabel 3 Luasan Geologi Menurut Kelurahan di Kecamatan Jatiasih

No	Kelurahan	Batuan Sedimen Plio - Plistosen (TQs)	Luasan (Km ²)
1	Jatiasih		6,19
2	Jatikramat		6,25
3	Jatiluhur		5,56
4	Jatimekar		6,75
5	Jatirasa		4,22
6	Jatisari		8,39
Total			37,35

Sumber : RDTR Kota Bekasi Tahun 2016



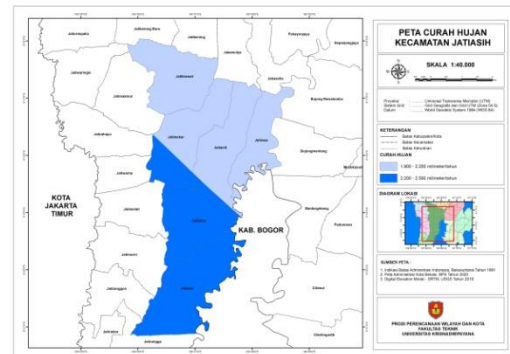
Gambar 4 Peta Geologi Kecamatan Jatiasih

f. Klimatologi

Tabel 5 Curah Hujan Menurut Kelurahan di Kecamatan Jatiasih

No	Kelurahan	Curah Hujan		Luasan (Km ²)
		1.900 - 2.200	2.200 - 2.500	
1	Jatiasih	5,69	0,50	6,19
2	Jatikramat	6,25	0	6,25
3	Jatimekar	4,66	2,09	6,75
4	Jatirasa	4,22	0	4,22
5	Jatiluhur	0	5,56	5,56
6	Jatisari	0	8,39	8,39
Total		20,81	16,53	37,35

Sumber : RDTR Kota Bekasi Tahun 2016



Gambar 6 Peta Curah Hujan Kecamatan Jatiasih

e. Hidrologi

Tabel 4 Kondisi Hidrologi Menurut Kelurahan di Kecamatan Jatiasih

No	Kelurahan	Hidrologi		Luasan (Km ²)
		Daerah Luapan	Daerah Imbuhan	
1	Jatiasih	6,19	0	6,19
2	Jatikramat	6,25	0	6,25
3	Jatiluhur	5,56	0	5,56
4	Jatimekar	6,75	0	6,75
5	Jatirasa	4,22	0	4,22
6	Jatisari	4,99	3,40	8,39
Total		33,94	3,40	37,35

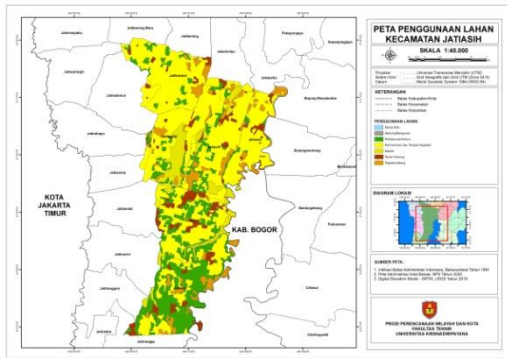
Sumber : RDTR Kota Bekasi Tahun 2016

g. Penggunaan Lahan

Tabel 6 Luasan Penggunaan Lahan Menurut Kelurahan di Kecamatan Jatiasih

No	Kelurahan	Permukiman dan Tempat Kegiatan	Tanah Kosong	Danu/ Situ	Gedun/ Bangunan	Sawah	Tegalan/ Ladang	Perkebunan/ Kebun	Jumlah
1	Jatiasih	3,632	0,323			0,729	0,776	0,721	6,182
2	Jatikramat	5,025	0,224	0,003	0,002		0,400	0,596	6,250
3	Jatiluhur	3,071	0,730			0,235	0,020	1,499	5,554
4	Jatimekar	4,257	0,253			1,102	0,432	0,704	6,748
5	Jatirasa	2,936	0,282		0,006	0,122	0,550	0,186	4,091
6	Jatisari	2,424	0,558			0,385	0,859	4,118	8,344
Total		21,346	2,371	0,003	0,007	2,573	3,046	7,824	37,170

Sumber : Kecamatan Jatiasih Dalam Angka 2020



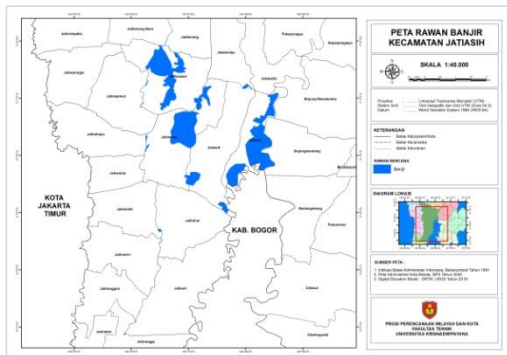
Gambar 7 Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Jatiasih

h. Rawan Bencana

Tabel 7 Luasan Banjir Menurut Kelurahan di Kecamatan Jatiasih

No	Kelurahan	Luasan Banjir (Km ²)
1	Jatiasih	0,347
2	Jatikramat	1,413
3	Jatiluhur	0,015
4	Jatimekar	1,552
5	Jatirasa	1,864
6	Jatisari	0,004
Total		5,195

Sumber : RDTR Kota Bekasi Tahun 2016



Gambar 8 Peta Rawan Banjir Kecamatan Jatiasih

3. Kependudukan dan Sosial Budaya

a. Jumlah Penduduk

Tabel 8 Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Jatiasih Tahun 2015 – 2019

No	Kelurahan	Penduduk (Jiwa)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jatisari	29.929	30.228	33.874	35.453	36.427
2	Jatiluhur	21.889	22.107	22.133	28.291	30.730
3	Jatirasa	31.195	31.506	30.938	30.938	39.473
4	Jatiasih	27.323	27.596	27.229	27.522	36.332
5	Jatimekar	29.730	30.027	28.911	29.005	39.243
6	Jatikramat	37.363	37.736	43.656	43.656	43.475
Jumlah		177.429	179.200	186.741	194.865	225.680

Sumber : Kecamatan Jatiasih Dalam Angka 2020, 2019, 2018, 2017 dan 2016

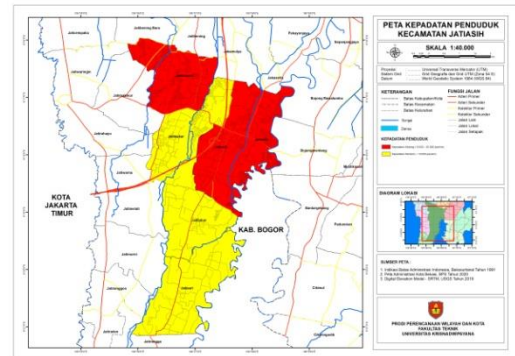
b. Kepadatan

Tabel 9 Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Jatiasih Tahun 2015 – 2019

No	Kelurahan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jatisari	5.722	5.779	6.471	6.778	6.965
2	Jatiluhur	5.821	5.879	5.588	7.524	8.172
3	Jatirasa	11.385	11.498	11.295	11.291	14.406
4	Jatiasih	9.357	9.450	7.742	9.425	12.442
5	Jatimekar	6.756	6.824	6.541	6.592	8.918
6	Jatikramat	9.364	9.457	9.920	10.941	10.895
Jumlah		48.405	48.887	47.557	52.551	61.798

Sumber : Kecamatan Jatiasih Dalam Angka 2020, 2019, 2018, 2017 dan 2016

Jika dilihat dari tabel diatas, terlihat bahwa kepadatan penduduk di Kecamatan Jatiasih berada pada kondisi kepadatan penduduk sedang. Sedangkan untuk rata-rata kepadatan penduduk terendah yaitu Kelurahan Jatisari.



Gambar 9 Peta Kepadatan Penduduk Kecamatan Jatiasih

c. Perkembangan Penduduk

Tabel 10 Perkembangan Penduduk Kecamatan Jatiasih

No	Kelurahan	Laju Pertumbuhan (r)				Σr
		r1	r2	r3	r4	
1	Jatisari	1%	12%	5%	3%	5%
2	Jatiluhur	1%	0%	28%	9%	9%
3	Jatirasa	1%	-2%	0%	28%	6%
4	Jatiasih	1%	-1%	1%	32%	7%
5	Jatimekar	1%	-4%	0%	35%	7%
6	Jatikramat	1%	16%	0%	0%	4%
Jumlah		6%	21%	34%	106%	38%

Sumber : Kecamatan Jatiasih Dalam Angka Tahun 2020, 2019, 2018, 2017 dan 2016

d. Karakteristik Sosial Budaya

Tabel 11 Data Penduduk Berdasarkan Kebudayaan di Kecamatan Jatiasih Tahun 2019

No.	Suku	Kelurahan					Jumlah	
		Jatiasih	Jatirasa	Jatikramat	Jatimekar	Jatiluhur		Jatisari
1	Betawi	10.656	12.337	15.348	11.781	8.364	11.586	70.072
2	Jawa	6.284	7.276	9.051	6.948	4.932	6.833	41.324
3	Sunda	3.522	4.112	5.116	3.927	2.788	3.862	23.327
4	Batak	1.639	1.898	2.361	1.812	1.287	1.783	10.780
5	Minang/Padang	2.049	2.373	2.951	2.266	1.608	2.228	13.475
6	Ambon	410	475	590	453	323	446	2.697
7	Papua	278	321	399	307	219	302	1.826
8	Dayak	820	949	1.181	906	643	891	5.390
9	Tionghoa	1.093	1.265	1.574	1.208	858	1.188	7.186
10	Lain-lain	546	633	787	604	429	594	3.593
Jumlah		27.297	31.639	39.358	30.212	21.451	29.713	179.670

Sumber : UPTD Kecamatan Jatiasih

4. Sarana Prasarana Wilayah

A. Sarana Wilayah

a. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan di Kecamatan Jatiasih dibedakan menjadi 2, yaitu negeri dan swasta. Jumlah sarana pendidikan berstatus negeri di Kecamatan Jatiasih terdiri dari SD 42 unit, SLTP 7 unit, dan SLTA 3 unit. Jumlah sarana pendidikan berstatus swasta di Kecamatan Jatiasih terdiri dari TK 77 unit, SD 32 unit, SLTP 24 unit, dan SLTA 33 unit.

Tabel 12 Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Jatiasih Tahun 2019

No	Kelurahan	Negeri				Swasta			
		TK	SD	SLTP	SLTA	TK	SD	SLTP	SLTA
1	Jatisari	0	3	1	2	6	7	4	3
2	Jatiluhur	0	4	1	0	12	4	5	7
3	Jatirasa	0	5	0	1	17	7	4	5
4	Jatiasih	0	12	2	0	12	2	4	7
5	Jatimekar	0	10	1	0	13	5	5	5
6	Jatikramat	0	8	2	0	17	7	2	6
	Jumlah	0	42	7	3	77	32	24	33

Sumber : Kecamatan Jatiasih Dalam Angka 2020

b. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Jatiasih terdapat 3 jenis, yaitu rumah sakit, puskesmas, dan posyandu. Kecamatan Jatiasih memiliki 1 unit rumah sakit, 2 unit puskesmas, dan 160 unit posyandu.

Tabel 13 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Jatiasih Tahun 2019

No	Kelurahan	Rumah Sakit	Puskesmas	Posyandu	Jumlah
1	Jatisari	0	0	31	31
2	Jatiluhur	0	1	20	21
3	Jatirasa	0	0	24	24
4	Jatiasih	1	1	31	33
5	Jatimekar	0	0	27	27
6	Jatikramat	0	0	27	27
	Jumlah	1	2	160	163

Sumber : Kecamatan Jatiasih Dalam Angka 2020

c. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan yang terdapat di Kecamatan Jatiasih hanya ada 4 (empat), yaitu masjid, langgar, gereja, dan wihara Kecamatan Jatiasih memiliki 111 unit masjid, 215 unit langgar, 5 unit gereja, dan 1 wihara.

Tabel 14 Jumlah Sarana Peribadatan di Kecamatan Jatiasih Tahun 2019

No	Kelurahan	Masjid	Langgar	Gereja	Wihara
1	Jatisari	25	33	1	0
2	Jatiluhur	18	34	0	0
3	Jatirasa	21	25	3	0
4	Jatiasih	19	36	0	1
5	Jatimekar	20	45	1	0
6	Jatikramat	15	45	0	0
	Jumlah	111	215	5	1

Sumber : Kecamatan Jatiasih Dalam Angka 2020

d. Sarana Perdagangan dan Jasa

Tabel 15 Jumlah Sarana Peribadatan di Kecamatan Jatiasih Tahun 2019

No	Kelurahan	Minimarket	Toko / Warung Kelontong
1	Jatisari	8	153
2	Jatiluhur	6	327
3	Jatirasa	6	210
4	Jatiasih	13	152
5	Jatimekar	5	253
6	Jatikramat	10	328
	Jumlah	48	1.423

Sumber : Kecamatan Jatiasih Dalam Angka 2020

e. Sarana Olahraga dan RTH

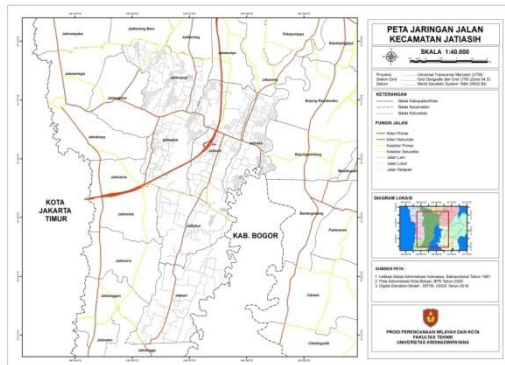
Di Kecamatan Jatiasih terdapat sarana olahraga dan rekreasi berupa taman wisata air yang ada di Kelurahan Jatiasih. Serta RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat.

B. Prasarana Wilayah

a. Jaringan Jalan

Jatiasih merupakan salah satu kecamatan yang cukup besar dibandingkan dengan

kecamatan lainnya yang berada di SUB BWP Pondok Gede dan Jatiasih merupakan daerah yang cukup strategis serta banyak dilewati oleh masyarakat diluar wilayah Jatiasih yang di sebabkan oleh wilayah Jatiasih sebagai pengantar atau penyambung untuk daerah lainnya seperti Ciangsana (Kab Bogor), Cibubur, Jakarta Timur, dan Rawalumbu.



Gambar 10 Peta Jaringan Jalan Kecamatan Jatiasih

b. Jaringan Drainase

Saluran drainase yang ada di Kecamatan Jati Asih yang merupakan saluran primer yaitu Sungai Bekasi dan Sungai Pondokgede yang juga berkaitan erat dengan saluran drainase air hujan di Kota Bekasi, sedangkan saluran drainase sekunder berupa irigasi. Sedangkan saluran drainase tersier Kecamatan Jati Asih belum disemua lingkungan perumahan ada dan disekitar jalan-jalan yang ada di setiap Kecamatan.

c. Jaringan Air Bersih

Hingga saat ini sumber bahan baku air yang tersedia untuk

diolah dan dijadikan air bersih, pada umumnya diambil dari sumber mata air dan tadah air hujan.

d. Jaringan Air Limbah

Prediksi timbulan air limbah di Kecamatan Jatiasih didasarkan pada asumsi bahwa untuk limbah domestik adalah 75% dari total kebutuhan air bersih sedangkan untuk timbulan limbah non domestik adalah 70% dari total timbulan limbah domestik.

Pengembangan pengelolaan air limbah harus terintegrasi dengan prasarana kota lainnya dan sesuai dengan perkembangan kota. Dalam hal ini Kecamatan Jatiasih membutuhkan prasarana kota termasuk pengelolaan limbah manusia yang juga harus sesuai dengan perencanaan penyediaan air bersih, jaringan drainase, dan penyediaan jalan kota adapun efek samping dari efek samping yang tidak diinginkan dari pertumbuhan ekonomi.

e. Persampahan

Timbunan sampah di Kecamatan Jatiasih dari tahun ke tahun semakin meningkat, karena tingginya aktivitas yang berasal dari perumahan, industri, perdagangan dan jasa, fasilitas kesehatan, pasar dan fasilitas umum.

Perkiraan peningkatan volume sampah yang dihasilkan oleh permukiman maupun fasilitas di Kecamatan Jatiasih sehingga kita memerlukan sistem jaringan persampahan

f. Jaringan Listrik

Pelayanan listrik Kecamatan Jati Asih yang terdiri sistem jaringan listrik sebagai berikut:

- a. Pembangkit tenaga listrik dari PT. PLN.
- b. Gardu induk (GI) terdiri atas pembangunan gardu induk (GI)

g. Jaringan Telekomunikasi

Kebutuhan akan telekomunikasi dari tahun ke tahun terus meningkat sejalan dengan peningkatan laju pembangunan. Pengelolaan sektor telekomunikasi dilakukan oleh PT. Telkom Kecamatan Jati Asih. Jaringan telepon yang dikelola PT. Telkom pada umumnya adalah jaringan telepon yang menggunakan kabel yang pada umumnya digunakan di rumah-rumah penduduk.

Kecamatan Jatiasih. Berikut ini merupakan matriks sandingan kebijakan pemanfaatan ruang di Kecamatan Jatiasih:

1. Kecamatan Jatiasih terdiri dari 2 Bagian Wilayah Perencanaan (BWP), yaitu BWP Pondok Gede dan BWP Jatisampurna.
2. Kecamatan Jatiasih merupakan Zona Rawan Bencana Banjir, yang tersebar di Kelurahan Jatikramat, Jatiasih, Jatirasa, dan Jatimekar.
3. Kecamatan Jatiasih merupakan Zona Lindung sempadan Kali Bekasi.
4. Kecamatan Jatiasih merupakan Zona RTH Taman dan Pemakaman.
5. Kecamatan Jatiasih merupakan Zona Perdagangan dan Jasa Skala regional/kota, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Kecamatan Jatiasih merupakan Zona Perumahan yang terbagi atas Kelurahan Jatimekar perumahan kepadatan tinggi (R2), sedang (R3), dan rendah (R4); Kelurahan Jatikramat perumahan kepadatan tinggi (R2); Kelurahan Jatiasih perumahan kepadatan tinggi (R2) dan sedang (R3); Kelurahan Jatirasa perumahan kepadatan rendah (R4); dan Kelurahan Jatiluhur perumahan hunian vertikal.

2. Analisis Kondisi Pemanfaatan Ruang

Kondisi pemanfaatan ruang di Kecamatan Jatiasih terbagi menjadi

ANALISIS

1. Analisis Kebijakan RDTR Kecamatan Jatiasih

Pada analisis ini diketahui pola pemanfaatan ruang dan ketentuan Peraturan Zonasi di kecamatan Jatiasih menggunakan analisis deskriptif dengan membuat matriks *zoning text* dan *zoning map* di

perkebunan, tegalan/ladang, sawah, gedung/bangunan, danau/situ, tanah kosong, dan permukiman dan tempat kegiatan. Berikut merupakan tabel pemanfaatan ruang di Kecamatan Jatiasih sebagai berikut.

Tabel 16 Perkembangan Pemanfaatan Ruang Kecamatan Jatiasih

No	Land Use	Luasan (Km ²)											
		Jatiasih		Jatikramat		Jatimekar		Jatirasa		Jatiluhur		Jatiasri	
		2016	2020	2016	2020	2016	2020	2016	2020	2016	2020	2016	2020
1	Perkebunan	0,72	0,6	0,7	0,29	0,19	0,19	1,5	4,12	4,12			
2	Tegalan/Ladang	0,78	0,77	0,4	0,34	0,43	0,43	0,56	0,02	0,86	0,86		
3	Sawah	0,73	0,7			1,1	1,1	0,12	0,12	0,24	0,39	0,39	
4	Gedung/Bangunan	6,19	0	6,25	0,01			6,48	0,01	4,22	5,56	8,39	
5	Danau/Situ		0	0,01									
6	Tanah Kosong	0,32	0,32	0,22	0,22	0,25	0,25	4,01	0,28	0,73	0,73	4,46	0,56
7	Permukiman dan Tempat Kegiatan	3,63	3,63	5,03	5,03	3,96	4,26	2,94	2,94	3,07	3,07	2,42	1,42

Sumber: Diolah Penulis, 2021

Tabel 17 Pola Ruang Kecamatan Jatiasih

No	POLA RUANG	Luasan (Km ²)					
		Jatiasih	Jatikramat	Jatimekar	Jatirasa	Jatiasri	Jatiluhur
Kawasan Budidaya							
1	Kawasan Perumahan			11,203		4,678	13,6
a	Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah	2,739		2,919	4,934	9,835	6,185
b	Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang	14,694					
c	Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi	13,728	6,877		7,189	10,576	
2	Kawasan Perikanan dan Jasa			5,801	10,742	14,428	10,671
a	Kawasan Perikanan Perikanan dan Jasa	16,127	10,266				
3	Kawasan Perkantoran						
a	Kawasan Perkantoran Pemerintahan	9,857	1,22	3,079	4,182	2,683	2,42
4	Kawasan Industri						
a	Kawasan Industri	7,558				1,258	
Kawasan Lindung							
1	Kawasan Pertahanan Setempat						
a	Kawasan Sempadan Danau/Waduk	4,594	18,142	6,985	4,71	8,799	
b	Kawasan Sempadan Jalan	8,369	3,724	4,684	10,724	2,096	7,986
c	Kawasan Sempadan Sungai	5,945	4,236	11,529	2,282	17,411	11,177
2	Kawasan Ruang Terbuka Hijau						
a	Kawasan Hutan Kota	8,181		1,083	1,287	1,861	4,79
b	Kawasan Taman Kecamatan	3,763	5,3	1,314	6,922	6,877	3,951
c	Kawasan Taman Kelurahan	4,551		1,789	3,173	2,171	2,629
d	Kawasan Taman Kota			3,163	1,747	9,254	3,384
a	Kawasan Pemakaman	2,765		2,946	7,956		1,225

Sumber: RDKR Kota Bekasi Tahun 2016

3. Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

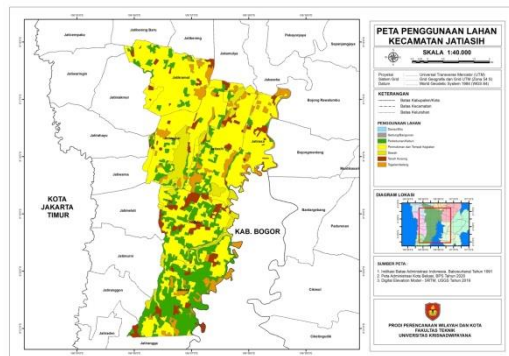
Tabel 9 Pola Ruang Kecamatan Jatiasih

KELURAHAN	POLA RUANG	KESESUAIAN (Km ²)	KETIDAK SESUAIAN (Km ²)
Jatikramat	Kawasan Lindung	0,248	0,184
	Kawasan Budidaya	4,633	
Jumlah		4,881	0,184
Jatirasa	Kawasan Lindung	0,808	0,627
	Kawasan Budidaya	2,514	
Jumlah		3,322	0,627
Jatiasih	Kawasan Lindung	0,313	0,159
	Kawasan Budidaya	4,146	
Jumlah		4,459	0,159
Jatimekar	Kawasan Lindung	0,65	0,263
	Kawasan Budidaya	4,496	
Jumlah		5,146	0,263
Jatiasri	Kawasan Lindung	0,181	0,025
	Kawasan Budidaya	6,027	
Jumlah		6,208	0,025
Jatiluhur	Kawasan Lindung	0,165	0,03
	Kawasan Budidaya	3,779	
Jumlah		3,944	0,03
Total Kecamatan Jatiasih		27,98	1,291

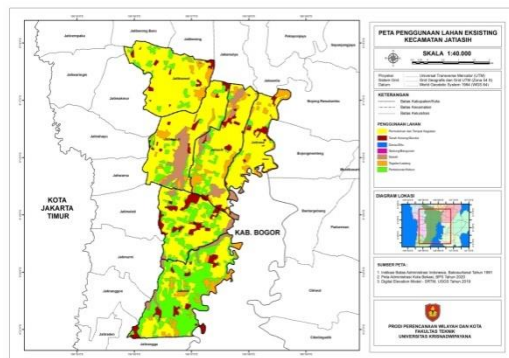
Total jumlah kesesuaian pemanfaatan ruang di Kecamatan Jatiasih sebesar 27,983 Km². Jika dipersentasikan dengan Luas Kecamatan Jatiasih 37,36 Km² hasilnya adalah 74,9%. Menurut Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi, Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang kurang berkualitas jika bernilai 50%-80% artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dan RTR.

Jumlah total ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di Kecamatan Jatiasih yaitu sebesar 1,291 Km². Luas Kecamatan Jatiasih sebesar 37,35 maka jika dipersentasikan nilai ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di Kecamatan Jatiasih yaitu 3,45%.

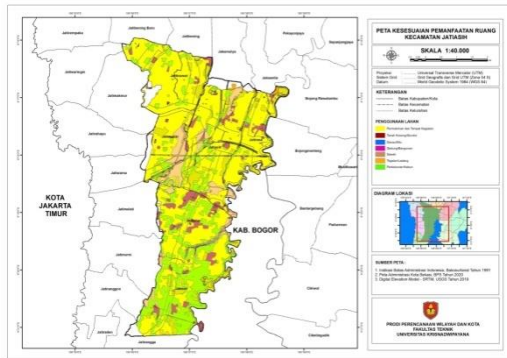
Kelurahan dengan ketidak sesuaian pemanfaatan ruang tertinggi yaitu Kelurahan Jatirasa sebesar 0,627 Km²;



Gambar 11 Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Jatiasih Tahun 2016



Gambar 12 Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Jatiasih Tahun 2020



Gambar 13 Peta Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kecamatan Jatiasih

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perkembangan Pemanfaatan ruang berdasarkan kebijakan RDTR dan PZ di Kecamatan Jatiasih, yaitu:
 - a. Kecamatan Jatiasih terdiri dari 2 Bagian Wilayah Perencanaan (BWP), yaitu BWP Pondok Gede dan BWP Jatisampurna.
 - b. Kecamatan Jatiasih merupakan Zona Rawan Bencana, yang tersebar di Kelurahan Jatikramat, Jatiasih, Jatirasa, dan Jatimekar.
 - c. Kecamatan Jatiasih merupakan Zona Lindung sempadan Kali Bekasi.
 - d. Kecamatan Jatiasih merupakan Zona RTH Taman dan Pemakaman.
 - e. Kecamatan Jatiasih merupakan Zona Perdagangan dan Jasa Skala regional/kota, Kecamatan dan Kelurahan.
 - f. Kecamatan Jatiasih merupakan Zona Perkantoran pemerintah kecamatan.
 - g. Kecamatan Jatiasih merupakan Zona Sarana Pelayanan Umum pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan peribadatan;
 - h. Kecamatan Jatiasih merupakan Zona Perumahan yang terbagi atas Kelurahan Jatimekar perumahan kepadatan tinggi (R2), sedang (R3), dan rendah (R4); Kelurahan Jatikramat perumahan kepadatan tinggi (R2); Kelurahan Jatiasih perumahan kepadatan tinggi (R2) dan sedang (R3); Kelurahan Jatirasa perumahan kepadatan rendah (R4); dan Kelurahan Jatiluhur perumahan hunian vertikal.
 - i. Rencana pengembangan prasarana: pembangunan jalan, pengembangan jaringan jalan, peningkatan kinerja simpangan, pengembangan sistem angkutan umum, pengembangan terminal, pengembangan sistem perparkiran, pengembangan jalur pedestrian, pengembangan sarana pelengkap jalan, rencana sistem energi/kelistrikan, rencana penyediaan air bersih, rencana jaringan persampahan, pengembangan jaringan drainase, rencana pengendali banjir, rencana jalur evakuasi bencana, rencana sistem pemadam kebakaran, dan penanganan koridor jalan utama.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi pemanfaatan ruang, berdasarkan data *time series* penggunaan lahan 2016 dan penggunaan lahan 2020, yaitu diketahui bahwa perubahan penggunaan lahan di setiap kelurahan untuk perkebunan, tegalan/ladang, sawah, danau dan

tanah kosong mengalami penurunan. Sedangkan untuk permukiman, tempat kegiatan dan bangunan gedung mengalami kenaikan. Jadi perubahan penggunaan lahan itu terjadi pada lahan perkebunan, tegalan/ladang, sawah danau dan tanah kosong menjadi permukiman tempat kegiatan dan bangunan gedung.

3. Besar kesesuaian pemanfaatan ruang dengan penggunaan lahan eksisting Kecamatan Jatiasih sebesar 27,983 Km². Jika dipersentasikan dengan Luas Kecamatan Jatiasih 37,36 Km² hasilnya adalah **74,9%**. Dan Jumlah total ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di Kecamatan Jatiasih yaitu sebesar 1,291 Km². Luas Kecamatan Jatiasih sebesar 37,35 maka jika dipersentasikan nilai ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di Kecamatan Jatiasih yaitu **3,45%**. Menurut Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi, **Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang kurang berkualitas** jika bernilai 50%-80% artinya **pelaksanaan pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dan RTR**. Sedangkan Kelurahan dengan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang tertinggi yaitu Kelurahan Jatirasa sebesar 0,627 km².

SARAN

Saran yang perlu dilakukan berdasarkan hasil penelitian antara lain:

1. Saran untuk pemerintah

Pemerintah sebagai pemegang kendali kebijakan penataan ruang disarankan untuk merumuskan kebijakan dan strategi baru sehingga secara bertahap terwujudnya perbaikan perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang, berikut ini saran kebijakan untuk pemerintah :

- a. Relokasi penduduk yang tinggal di kawasan yang peruntukannya zona lindung sempadan sungai dan rawan bencana banjir;
- b. Normalisasi sungai Kali Bekasi;
- c. Revitalisasi bantaran sungai Kali Bekasi;
- d. Menjadikan kawasan yang alih fungsi kembali ke fungsinya sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
- e. Pemberian sanksi terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- f. Melakukan peninjauan terhadap pemanfaatan ruang;
- g. Melakukan monitoring pemanfaatan ruang;
- h. Melakukan evaluasi pemanfaatan ruang;
- i. Melakukan peninjauan kembali terhadap rencana struktur dan pola ruang.

2. Saran untuk masyarakat

Masyarakat adalah salah satu subjek penting dalam mendukung keberhasilan rencana tata ruang. Berikut ini saran untuk masyarakat :

- a. Petaatan terhadap izin pemanfaatan ruang;
- b. Menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi,

- perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
- c. Memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
 - d. Melaporkan kepada instansi atau pejabat berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang;
 - e. Mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

3. Saran untuk akademisi

Akademisi adalah elemen yang mengawal terwujudnya implementasi rencana tata ruang, karena studi penelitian terkait penataan ruang sangat membantu pemerintah dalam mendapatkan masukan dan saran berdasarkan fakta dan analisis yang valid. Sehingga saran untuk akademisi lebih banyak melakukan studi penelitaian akan sangat membantu memperkaya data dan informasi bagi masyarakat dan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035

Referensi Buku (Text Book):

Mutaali, L. (2015). *Teknik Analisis Regional*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada.

Jurnal (Journal):

Wahyudi, Ade. (2019). *Evaluasi Kesesuaian Lahan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Mandau*. Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Univeritas Diponegoro.

Panjaitan, Adri & Sudarsono, Bambang. (2019). *Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur Menggunakan Sistem Informasi Geodesi*. Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.

Asyiwati, Yulia & Oktavya, N. E. (2014). *Strategi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Kota Bekasi Secara Berkelanjutan*. Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Bandung.

Prasetyo, Bayu., Jupri., & Sungkawa, Dadang. *Optimalisasi Pemanfaatan Taman Kota Oleh Masyarakat Kota Bekasi*. Departemen Pendidikan Geografi Universitas Indonesia.

Sitorus, Santun, R. P., Leonataris, Citra, & Penuju, Dyah Retno. (2012). *Analisis Pola Penggunaan Lahan dan Perkembangan Wilayah di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat*. Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Institut Pertanian Bogor.

Darmawan, Sahrizal. (2015). *Analisis Tingkat Risiko Bencana Banjir Pada Kawasan Permukiman*. Jakarta : Jurnal PWK UEU. <https://megapolitan.okezone.com/read/2020/10/25/338/2299247/perumahan-di-jatiasih-terendam-banjir-80-warga-mengungsi>

Akhirianto, Novian. A. (2018). *Pengetahuan dan Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana Banjir di Kota Bekasi*. Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi <https://bekasi.pojoksatu.id/baca/ada-115-titik-rawan-banjir-di-kota-bekasi> <https://www.liputan6.com/news/read/2864845/ini-79-titik-banjir-di-kota-bekasi>

<https://metro.tempo.co/read/1191347/banjir-di-jatiasih-kota-bekasi-penanganan-permanen-4-hari-lagi>

Referensi Lain:

Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. 2012. Kota Bekasi Dalam Angka 2011. Bekasi.

Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. 2013. Kota Bekasi Dalam Angka 2012. Bekasi.

Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. 2014. Kota Bekasi Dalam Angka 2013. Bekasi.

Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. 2015. Kota Bekasi Dalam Angka 2014. Bekasi.

Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. 2016. Kota Bekasi Dalam Angka 2015. Bekasi.

Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. 2017. Kota Bekasi Dalam Angka 2016. Bekasi.

Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. 2018. Kota Bekasi Dalam Angka 2019. Bekasi.

Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. 2019. Kota Bekasi Dalam Angka 2020. Bekasi.

Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. 2012. Kota Bekasi Dalam Angka 2011. Bekasi.

<https://www.detik.com/tag/banjir-jatiasih>

**OPTIMALISASI PENERAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM
PENANGANAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN RESAPAN AIR
(Studi Kasus: Kawasan Resapan Air Kabupaten Ciamis)**

Zefri

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Optimalisasi Penerapan RTRW dalam Penanganan Pemanfaatan Ruang Kawasan Resapan Air (Studi Kasus: Kawasan Resapan Air Kabupaten Ciamis). Rumusan Masalah dalam penelitian ini, adalah ; 1) Bagaimana tipologi potensi dan permasalahan kawasan resapan air di Kabupaten Ciamis; 2) Bagaimana penerapan fungsi RTRW dalam penanganan pemanfaatan ruang kawasan resapan air di Kabupaten Ciamis ?. Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah Optimalisasi Penerapan RTRW dalam upaya mewujudkan fungsi kawasan resapan air di Kabupaten Ciamis yang konsisten. Metode analisis yang akan digunakan, meliputi: pembobotan, super impose peta, dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh: 1) Pada kondisi eksisting terdapat penggunaan lahan yang tidak sesuai untuk kawasan resapan air, seperti permukiman dan pertanian semusim. Permukiman yang ada berpotensi untuk terus berkembang sejalan dengan tuntutan perkembangan penduduk yang akan terus berkembang; 2) Kemampuan kawasan dalam meresapkan air hujan di lokasi penelitian berbeda- beda potensinya. Demikian halnya, dengan potensi perkembangan permukiman di lokasi penelitian memiliki kemampuan yang berbeda- beda. Idealnya potensi perkembangan permukiman berada pada lokasi yang memiliki kemampuan resapan air yang rendah. Namun fakta yang terjadi di lokasi penelitian adanya ketidak selarasan. Sehingga perlu ada arahan untuk mengakomodir seluruh potensi tersebut dapat terakomodir dengan tetap mengoptimalkan fungsi resapan air; 3) Upaya pemerintah daerah untuk menjadikan seluruh lokasi penelitian menjadi kawasan hutan akan dihadapkan dengan kendala dalam membebaskan permukiman yang sudah ada, mengkonversi sawah menjadi hutan dan potensi perkembangan yang perlu diantisipasi. Atas dasar tersebut dengan konsep pengembangan permukiman *zero run off* dan *agroforestri* diharapkan menjadi solusi untuk mengakomodir potensi perkembangan permukiman dan pertanian semusim dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi kawasan resapan air.

Kata kunci: Optimalisasi RTRW, Penanganan Pemanfaatan Ruang, Kawasan Resapan Air.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis, ada bagian wilayah Kabupaten Ciamis ditetapkan sebagai kawasan lindung berupa kawasan resapan air seluas kurang lebih 9.182 (Sembilan ribu seratus delapan puluh dua) Hektar atau sekitar 6,42 % dari total luas wilayah Kabupaten Ciamis yang memiliki luas wilayah 143.020 Ha. Kawasan resapan air tersebar di 9 kecamatan dari 26 kecamatan yang

ada di Kabupaten Ciamis. Adapun 9 kecamatan yang memiliki kawasan resapan air di Kabupaten Ciamis, yaitu Kecamatan Cikoneng, Cihaurbeuti, Panjalu, Lumbung, Kawali, Cipaku, Sadananya, Sindangkasih dan Panumbangan. Lihat gambar 1.1 dan 1.2 di bawah ini.

Namun, disisi lain Kabupaten Ciamis memiliki potensi untuk terus tumbuh dan berkembang. Kabupaten Ciamis berbatasan dengan 2 wilayah administrasi kota, yaitu Kota Ciamis dan

Kota Banjar, sehingga Kabupaten Ciamis diharapkan dapat menyangga perkembangan ke-2 wilayah kota tersebut dan tentunya Kabupaten Ciamis akan menerima limpahan perkembangan dari 2 wilayah kota tersebut. Kabupaten Ciamis merupakan salah satu pintu gerbang Provinsi Jawa Barat, yaitu berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan aspek kependudukan selama kurun waktu tahun 2012-2016 Kabupaten Ciamis memiliki tingkat pertumbuhan penduduk relatif besar, yaitu 2,34 %/ tahun.

Secara internal, pada kawasan resapan air sudah tumbuh kawasan permukiman dan sebagian kawasan resapan air di Kabupaten Ciamis termasuk wilayah perkotaan. Hal ini tentunya pemukiman yang ada berpotensi terus tumbuh dan berkembang terutama pada bagian yang memiliki tingkat pendorong perkembangan yang relatif tinggi. Selain itu, pemanfaatan lahan tidak terbangun untuk kegiatan pertanian apabila tidak sesuai dengan kondisi lahan dapat mengurangi bahkan merusak fungsi kawasan sebagai resapan air.

Atas dasar kondisi tersebut, perlu adanya upaya penanganan dari Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam upaya mengoptimalkan keberlangsungan fungsi kawasan resapan air di Kabupaten Ciamis pada saat ini maupun sebagai upaya antisipasi perkembangan yang tidak terkendali.

2. Rumusan Masalah Penelitian

Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 menetapkan ada bagian dari Kecamatan Cikoneng, Cihaurbeuti, Panjalu, Lumbung, Kawali, Cipaku, Sadananya, Sindangkasih dan Panumbangan sebagai kawasan resapan air. Namun, faktanya sebelum Perda

RTRW tersebut ditetapkan terdapat bagian kawasan air sudah menjadi permukiman penduduk. Bahkan ada bagian wilayah sudah menjadi ibukota kecamatan (urban area) dengan area permukiman yang berpotensi untuk terus berkembang. Hal ini akan mengakibatkan kawasan resapan air tidak berfungsi secara optimal. Selain itu, mayoritas penduduk yang bekerja pada sektor agraris perlu diantisipasi dalam pemanfaatan kawasan untuk kegiatan pertanian yang tidak mendukung fungsi kawasan resapan air. Berdasarkan kondisi tersebut di kawasan resapan air pada kondisi eksisting sudah terjadi konflik ruang dan potensial untuk semakin berkembang sejalan dengan potensi pendorong perkembangan yang ada.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah Optimalisasi Penerapan RTRW dalam upaya mewujudkan fungsi kawasan resapan air di Kabupaten Ciamis yang konsisten..

4. Sasaran Penelitian

Penelitian ini memiliki sasaran sebagai berikut:

1. Mengetahui potensi dan permasalahan kawasan resapan air berdasarkan faktor- faktor yang dapat mempengaruhi kelestarian kawasan resapan air dengan cara:
 - a. Mengetahui tingkat potensi kemampuan kawasan dalam meresapkan air.
 - b. Mengetahui tingkat potensi perkembangan desa- desa.
 - c. Mengetahui lahan potensial pengembangan lahan permukiman dan budidaya pertanian.
2. Mengetahui sebaran tipologi potensi dan permasalahan kawasan resapan air pada saat ini maupun kecenderungannya dimasa mendatang.

3. Menyusun konsep dasar penyusunan strategi.
4. Menyusun upayapenanganan pemanfaatan ruang kawasan resapan air.

5. Manfaat Penelitian

Sebagai upaya pengendalian dan pemanfaatan ruang, penyusunan program penanganan kawasan resapan air dan upaya memanfaatkan kawasan resapan air yang berwawasan lingkungan.

II. KAJIAN PUSTAKA

1. Tingkat Potensi Kemampuan Resapan Air

Kawasan Resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan

air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran. (*Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor: 32 Tahun 1990, Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.*)

Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menentukan daerah resapan air, diantaranya adalah kondisi kemiringan lereng, jenis tanah dan curah hujan. Ketiga aspek tersebut dan hungannya dengan infiltrasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Hubungan Kemiringan Lereng dengan Infiltrasi

No	Lereng (%)	Deskripsi	Infiltrasi	Harkat
1	<8	Datar	Besar	5
2	8-15	Landai	Agak besar	4
3	15-25	Bergelombang	Sedang	3
4	25-40	Curam	Agak kecil	2
5	>40	Sangat curam	Kecil	1

Sumber: Fahmi, 2016:5

Tabel 2
Hubungan Jenis Tanah dengan Infiltrasi

No	Jenis tanah	Infiltrasi	Harkat
1	Kompleks Entisol	Besar	5
2	Andisol	Agak besar	4
3	Inceptisol	Sedang	3
4	Kompleks Ultisol	Agak kecil	2
5	Tanah Alluvial	Kecil	1

Sumber: Maria, Lestiana, 2014:80

Tabel 3
Hubungan Curah Hujan dengan Infiltrasi

No	Klas	Curah Hujan Rerata Tahunan (mm)	Infiltrasi	Harkat
1	I	< 2500	Kecil	1
2	II	2500 - 3500	Sedang	2
3	III	3500 - 4500	Agak besar	3
4	IV	4500 - 5500	Besar	4
5	V	>5500	Sangat besar	5

Sumber: Fahmi, 2016:6

2. Konsep Zero run off untuk lahan terbangun

Zero Delta Q Policy (ZDQP) adalah suatu kebijakan untuk mempertahankan besaran debit run off/debit limpasan supaya tidak bertambah dari waktu ke waktu, dan memperbesar kesempatan air untuk berinfiltrasi ke dalam tanah. (Wangsasusana, Soekarno, Dwijoyanto, 2012: 2)

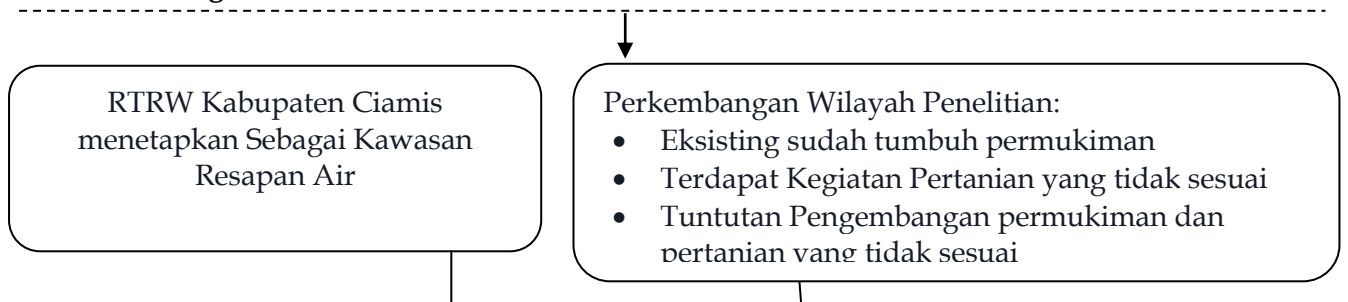
3. Konsep Agroforestry

Alih-guna lahan hutan menjadi lahan pertanian disadari menimbulkan banyak masalah seperti penurunan kesuburan tanah, erosi, kepunahan flora dan fauna,

banjir, kekeringan dan bahkan perubahan lingkungan global. Agroforestri adalah salah satu sistem pengelolaan lahan yang mungkin dapat ditawarkan untuk mengatasi masalah yang timbul akibat adanya alih-guna lahan hutan menjadi pertanian dan sekaligus juga untuk mengatasi masalah pangan. Secara sederhana, agroforestri berarti menanam pepohonan di lahan pertanian. Agroforestri, suatu cabang ilmu pengetahuan baru di bidang pertanian dan kehutanan yang mencoba menggabungkan unsur tanaman dan pepohonan. (Hairiah, Sardjono, Sabarnurdin, 2003:1)

4. Kerangka Pemikiran

Latar Belakang



Rumusan Masalah

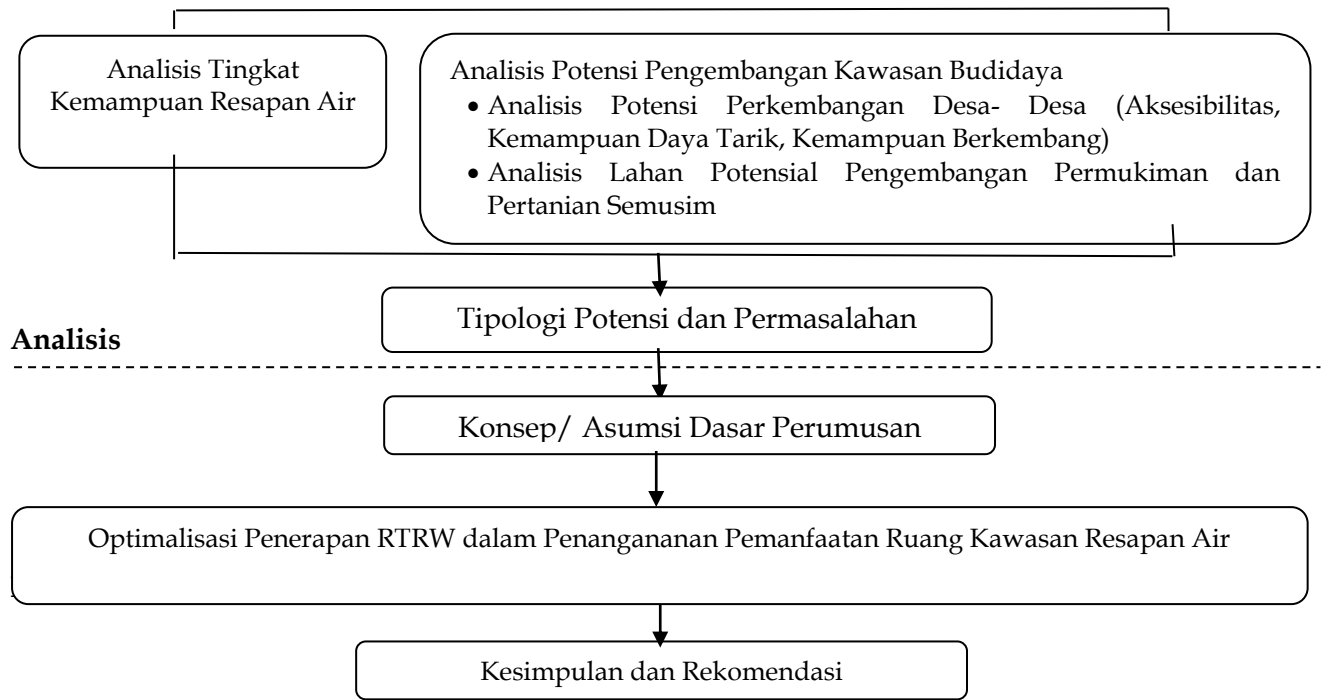
Penurunan Kemampuan Kawasan Dalam Meresapkan Air Hujan

Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian ini, yaitu;
 1) Bagaimana tipologi potensi dan permasalahan kawasan resapan air di Kabupaten Ciamis;
 2) Bagaimana penerapan fungsi RTRW dalam penanganan pemanfaatan ruang kawasan resapan air di Kabupaten Ciamis ?

Tujuan Penelitian

Optimalisasi Penerapan RTRW dalam upaya mewujudkan fungsi kawasan resapan air di Kabupaten Ciamis yang konsisten.



III. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk melakukan analisis diperlukan data- data pendukung sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4
Kegiatan Analisis, Metode Analisis dan Data Dibutuhkan

No.	Analisis	Metode Analisis	Data Dibutuhkan
1	Tingkat potensi kemampuan resapan air	<ul style="list-style-type: none"> Pembobotan Super Impose Peta 	<ul style="list-style-type: none"> Peta Jenis Tanah Peta Curah Hujan Peta kelerengan Peta administrasi desa Peta Penggunaan Lahan
2	Tingkat potensi perkembangan kawasan:	<ul style="list-style-type: none"> Pembobotan Super Impose Peta 	
	❖ Aksesibilitas	Pembobotan	Peta fungsi jaringan jalan
	❖ Kemampuan Daya Tarik	Pembobotan	Peta sistem pusat kegiatan
	❖ Kemampuan Berkembang	Pembobotan	Peta sebaran lahan terbangun
3	Ketersediaan ruang potensial untuk pengembangan permukiman dan pertanian.	Super Impose Peta	<ul style="list-style-type: none"> Peta Kelerengan Peta Tutupan Lahan
4	Sebaran Tipologi Potensi dan Permasalahan Kawasan Resapan Air	<ul style="list-style-type: none"> Super Impose Peta Deskriptif Kualitatif 	Hasil analisis sebelumnya
5	Menyusun asumsi/ konsep dasar penyusunan strategi.	Deskriptif Kualitatif	
6	Menyusun strategi	Deskriptif Kualitatif	

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Potensi Potensi dan Permasalahan Kawasan Resapan Air

1. Tingkat Potensi Kemampuan Resapan Air

Penilaian tingkat potensi kemampuan resapan air menggunakan variabel/ parameter curah hujan, kelerengan, jenis tanah dan tutupan lahan yang ada. Lihat tabel di bawah ini.

Tabel 5
Tingkat Potensi Kemampuan Resapan Air

No	Lokasi	Jml Skor	Nilai Indeks	Luas (Ha)	Sebaran	Klasifikasi Potensi
1	1	8	471	4,66	Cihaurbeuti	Rendah
2	2	9	529	55,8	Cihaurbeuti, Cikoneng, Panumbangan, Singdangkasih	Rendah
3	3	10	588	223,32	Cihaurbeuti, Cikoneng, Kawali, Lumbang, Panjalu, Panumbangan, Sindangkasih	Rendah
4	4	11	647	685,18	Semua Kecamatan	Rendah
5	5	12	706	1.576,58	Semua Kecamatan	Rendah
6	6	13	765	2145,5	Semua Kecamatan	Tinggi
7	7	14	824	2.868,28	Semua Kecamatan	Tinggi
8	8	15	882	1.152,03	Semua Kecamatan	Tinggi
9	9	16	941	333,79	Semua Kecamatan	Tinggi
10	10	17	1.000	11,92	Cihaurbeuti, Cipaku, Kawali, Lumbang, Panjalu, Panumbangan	Tinggi

Sumber: Hasil Analisis, 2020

2. Analisis Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya

Kelestarian fungsi kawasan resapan air di wilayah studi diantaranya akan dipengaruhi oleh potensi pengembangan kawasan budidaya. Hal ini sejalan dengan adanya tuntutan kebutuhan pengembangan ruang untuk kegiatan budidaya, yaitu tuntutan pengembangan permukiman sejalan dengan penduduk yang akan terus berkembang. Selain itu sesuai dengan basis perekonomian kawasan berupa pertanian termasuk pertanian tanaman semusim, maka kebutuhan ruang untuk pengembangan

pertanian semusim perlu diantisipasi kemungkinan pengembangannya.

a. Potensi Perkembangan Desa- Desa

Kemampuan perubahan kawasan atau potensi perkembangan desa- desa akan dinilai berdasarkan aksesibilitas, kemampuan daya tarik dan kemampuan tumbuh. Semakin tinggi tingkat perubahan kawasan, maka akan semakin tinggi ancaman gangguan terhadap kelestarian kawasan resapan air. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6
Kemampuan Berkembang Desa

No.	Kecamatan/ Desa/ Kelurahan	Aksesibilitas	Kemampuan Daya Tarik	Kemampuan Tumbuh dan Pergeseran Lahan Pertanian	Jumlah	Nilai Indeks	Klasifikasi
1	Kec. Cihaurbeuti						
	Desa Cihaurbeuti	1.000	666	597	2.263	918	Tinggi
	Desa Cijulang	200	333	0	533	216	Rendah
	Desa Padamulya	800	666	354	1.820	738	Tinggi
	Desa Pamokolan	800	666	419	1.885	764	Tinggi
	Desa Pasirtamiang	800	666	447	1.913	776	Tinggi
	Desa Sukahaji	200	333	38	571	232	Rendah
	Desa Sukahurip	200	333	203	736	298	Rendah

No.	Kecamatan/ Desa/ Kelurahan	Aksesibilitas	Kemampuan Daya Tarik	Kemampuan Tumbuh dan Pergeseran Lahan Pertanian	Jumlah	Nilai Indeks	Klasifikasi
	Desa Sukamaju	200	333	369	902	366	Rendah
	Desa Sukasetia	1.000	666	260	1.926	781	Tinggi
	Desa Sumberjaya	1.000	666	610	2.276	923	Tinggi
2	Kecamatan Cikoneng						
	Desa Darmacaang	200	333	0	533	216	Rendah
	Desa Nasol	200	333	191	724	294	Rendah
3	Kecamatan Cipaku						
	Desa Bangbayang	200	333	6	539	219	Rendah
	Desa Ciakar	200	333	56	589	239	Rendah
	Desa Cipaku	200	333	0	533	216	Rendah
	Desa Sukawening	200	333	0	533	216	Rendah
4	Kecamatan Kawali						
	Desa Sindangsari	200	333	54	587	238	Rendah
	Desa Talagasari	200	333	0	533	216	Rendah
5	Kec. Lumbung						
	Desa Cikupa	200	333	0	533	216	Rendah
	Desa Lumbung	400	666	84	1.150	466	Rendah
	Desa Rawa	400	666	60	1.126	457	Rendah
	Desa Sukaharja	200	333	41	574	233	Rendah
6	Kec. Panjalu						
	Desa Ciomas	800	333	438	1.571	637	Tinggi
	Desa Kertamandala	400	1.000	509	1.909	774	Tinggi
	Desa Mandalare	400	333	267	1.000	406	Rendah
	Desa Panjalu	800	1.000	378	2.178	883	Tinggi
	Desa Sandingtaman	800	333	350	1.483	601	Tinggi
7	Kec.Panumbangan						
	Desa Banjarangsana	400	333	415	1.148	466	Rendah
	Desa Golat	800	666	1000	2.466	1000	Tinggi
	Desa Kertaraharja	200	666	163	1.029	417	Rendah
	Desa Madanglayang	800	333	642	1.775	720	Tinggi
	Desa Panumbangan	800	666	537	2.003	812	Tinggi
	Desa Payungsari	400	333	24	757	307	Rendah
	Desa Sindangherang	800	666	169	1.635	663	Tinggi
	Desa Sindanmukti	200	333	138	671	272	Rendah
	Desa Sukakarta	800	666	322	1.788	725	Tinggi
	Desa Tanjungmulya	800	666	285	1.751	710	Tinggi
8	Kecamatan Sadananya						
	Desa Bendasari	200	666	0	866	351	Rendah
	Desa Gunungsari	200	333	0	533	216	Rendah
	Desa Tanjungsari	200	333	10	543	220	Rendah
9	Kecamatan Sindangkasih						
	Desa Budiasih	200	333	9	542	220	Rendah
	Desa Budiharja	200	1.000	96	1.296	526	Tinggi
	Desa Sukamanah	200	1.000	165	1.365	554	Tinggi
	Desa Sukaresik	200	333	12	545	221	Rendah

Sumber: Hasil Analisis, 2020

b. Kesesuaian Lahan Potensial Pengembangan Permukiman dan Pertanian Semusim

Sejalan dengan perkembangan penduduk yang akan terjadi berimplikasi terhadap

tuntutan kebutuhan ruang untuk pengembangan permukiman. Kesesuaian lahan potensial untuk pengembangan permukiman dan pertanian semusim akan ditentukan berdasarkan kondisi penggunaan lahan aktual dan faktor

kelerengan. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini.

Tabel 7
Ketersediaan Ruang Potensial Untuk Pengembangan Permukiman dan Kegiatan Pertanian Tanaman Semusim

No	Potensi Perkembangan	Luas (Ha)	Sebaran
1	Lahan Tidak Potensial	3.552,12	Semua Kecamatan
2	Permukiman Eksisting	1.079,58	Semua Kecamatan
3	Pertanian Sawah	2.153,79	Semua Kecamatan
4	Lahan Potensial Pengembangan Budidaya	2.216,79	Semua Kecamatan

Sumber: Hasil Analisis, 2020

c. Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya

Potensi pengembangan kawasan budidaya merupakan hasil penialaian dengan cara super impose dan

pembobotan antara aspek potensi perkembangan desa- desa dengan ketersediaan lahan potensial untuk pengembangan kawasan budidaya. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8
Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya

No	Potensi Perkembangan	Luas (Ha)	Sebaran
1	Lahan Tidak Potensial	3.552,12	Semua Kecamatan
2	Permukiman Eksisting	1.079,58	Semua Kecamatan
3	Pertanian Sawah	2.153,79	Semua Kecamatan
4	Potensi Perkembangan Tinggi	1.479,31	Cihaurbeuti, Panjalu, Panumbangan, Sindangkasih
5	Potensi Perkembangan Rendah	737,48	Semua Kecamatan

Sumber: Hasil Analisis, 2020

3. Tipologi Potensi dan Permasalahan Kawasan Resapan Air

Berdasarkan hasil superimposed dan pembobotan antara potensi kemampuan kawaasan dalam meresapkan air dengan potensi pengembangan kawasan, sedikitnya ditemukan 7 tipologi sebagai berikut:

1. Zona 1 (Tidak Potensial Budidaya)
Zona ini merupakan area yang berada pada kelerengan > 15 %. Pada zona ini perlu ada upaya pencegahan terhadap bencana longsor sekalligus peningkatan kualitas kawasan sebagai resapan air.
2. Zona 2 (Permukiman Eksisting)
Zona permukiman merupakan zona yang sangat tidak sesuai untuk kawasan resapan air berlokasi secara menyebar. Zona ini seluas 1.064,04 Ha atau 12,05 % dari total kawasan resaan air.
3. Zona 3 (Pertanian Sawah Abadi)

Zona ini merupakan lawan sawah yang potensial untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang tersebar di seluruh desa/ kelurahan yang ada di kawasan resapan air. Sawah termasuk jenis penggunaan lahan yang tidak sesuai untuk kawasan resapan air. Secara keseluruhan zona ini terdapat seluas 2.153,52 Ha atau 24,40 % dari total kawasan resapan air..

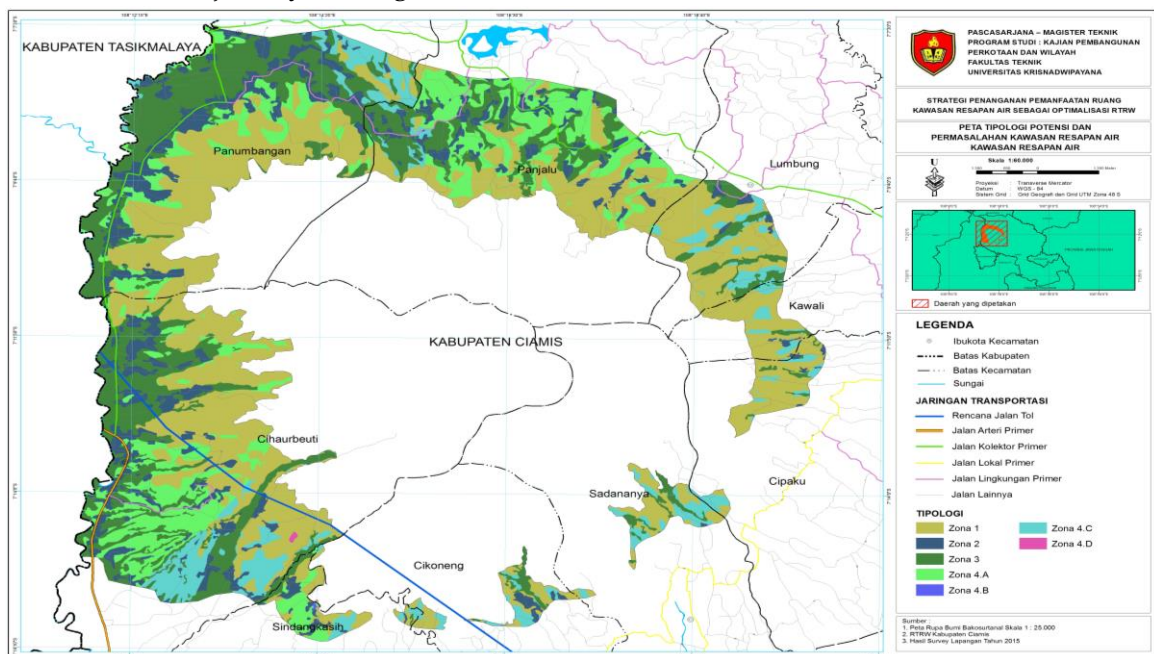
4. Zona 4 (Potensial Pengembangan Permukiman dan Pertanian Semusim)
Zona ini merupakan area paling potensial untuk pengembangan kegiatan permukiman dan pertanian, yaitu lahan bukan permukiman dan sawah yang berada pada kelerengan < 15 %. Pengembangan permukiman di zona ini harus disertai dilengkapi persyaratan permukiman yang mampu menjaga kelestarian sebagai kawasan resapan air. Selain itu, pengembangan kegiatan pertanian

tidak menurunkan fungsi kawasan sebagai resapan air. Selanjutnya, zona potensial pengembangan permukiman dan pertanian semusim sedikitnya dapat dikelompokkan menjadi 4 tipologi yang ditentukan berdasarkan kemampuan/ potensi kawasan dalam meresapkan air hujan dengan tingkat potensi kawasan untuk pengembangan kegiatan budidaya permukiman dan pertanian semusim. Adapun 4 tipologi tersebut, sebagai berikut:

- A. Zona 4.A, yaitu zona potensi resapan tinggi dan potensi perkembangan kawasan tinggi. Zona ini potensial kritis sebagai akibat potensi perkembangan yang tinggi yang akan mengancam untuk terjainya alih fungsi lahan menjadi permukiman pada kawasan yang memiliki potensi resapan air yang tinggi.
- B. Zona 4.B, yaitu zona potensi resapan rendah dan potensi perkembangan tinggi. Zona ini Untuk lebih jelasnya lihat gambar di bawah ini.

merupakan zona paling potensial untuk pengembangan permukiman karena potensi perkembangan yang tinggi berada pada kawasan yang memiliki potensi resapan air rendah.

- C. Zona 4.C, yaitu zona potensi resapan tinggi dan potensi perkembangan rendah. Zona ini potensial kritis sebagai akibat potensial untuk terjadinya alih fungsi menjadi lahan pertanian semusim pada kawasan yang memiliki potensi resapan air yang tinggi.
- D. Zona 4.D, yaitu zona potensi resapan rendah dan potensi perkembangan rendah. Zona ini merupakan zona paling potensial untuk pengembangan pertanian semusim karena potensi perkembangan yang rendah berada pada kawasan yang memiliki potensi resapan air rendah.



Gambar 4 Tipologi Potensi dan Permasalahan Kawasan Resapan Air

B. Konsep Dasar Penanganan Pemanfaatan Ruang berdasarkan RTRW

Konsep dasar perumusan upaya untuk mewujudkan optimalisasi RTRW dalam pemanfaatan ruang kawasan resapan air

di wilayah penelitian melalui mengakomodir kondisi yang ada dan mengantisipasi kecenderungan perkembangan dimasa mendatang dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, yaitu:

1. Tidak mengembangkan kegiatan budidaya permukiman dan pertanian semusim pada kawasan dengan kelerengan > 15 % untuk menjaga kestabilan lereng dan sekaligus menjaga kelestarian fungsi kawasan resapan air.
2. Tetap mempertahankan permukiman eksisting yang ada. Hal ini didasarkan pada kendala kemampuan pendanaan pemerintah daerah untuk merelokasi permukiman yang sudah ada.
3. Tetap mempertahankan kawasan pertanian sawah yang ada. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah yang menetapkan sawah yang ada sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
4. Mengembangkan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan pada kawasan- kawasan yang memiliki tingkat potensi perkembangan tinggi dengan tetap memperhatikan kemampuan kawasan dalam meresapkan air hujan.
5. Mengembangkan pertanian semusim pada kawasan yang memiliki tingkat perkembangan relatif rendah dan memperhatikan kemampuan kawasan dalam meresapkan air hujan.
6. Mengembangkan dan menata permukiman dengan konsep zero run off.
7. Mengembangkan dan menata kegiatan pertanian melalui konsep agroforestri.

C. Penanganan Pemanfaatan Ruang Kawasan Resapan Air Sebagai Optimalisasi Penerapan RTRW Kabupaten Ciamis

Berdasarkan konsep dasar pengembangan kawasan resapan, maka upaya penanganan pemanfaatan ruang pemanfaatan kawasan resapan air yang diusulkan sebagai berikut:

1. Pelestarian Kawasan

Pelestarian kawasan dilakukan dengan cara mempertahankan penggunaan lahan perkebunan dan tanaman hutan pada kawasan berkelerengan > 15 % (sebagian zona 1) untuk tujuan menjaga kestabilan lereng dan mempertahankan kemampuan kawasan dalam meresapkan air hujan.

2. Perbaikan Kawasan

Perbaikan kawasan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengganti tanaman semusim dengan tanaman hutan pada kawasan dengan kelerengan > 15 % (sebagian zona 1) untuk tujuan menjaga kestabilan lereng dan meningkatkan kemampuan kawasan dalam meresapkan air hujan.
- b. Mengembangkan sumur resapan melalui bantuan pemerintah pada kawasan permukiman eksisting sebagai salah satu upaya mewujudkan konsep zero run off. Upayaini diarahkan pada Zona Tipologi-2, yaitu pada lokasi permukiman- permukiman yang sudah tumbuh pada kawasan resapan air. Secara keseluruhan zona ini memiliki luas sekitar 1.064,04 Ha yang tersebar di seluruh kawasan resapan air, terutama di kawasan perkotaan.
- c. Mengembangkan tanaman hutan secara terpadu pada kawasan pertanian sawah eksisting sesuai konsep Agroforestri. Hal ini dilakukan pada tipologi zona 3.

3. Penetapan Ketentuan Pengembangan Permukiman Zero Run Off Secara Ketat

Upayaini diarahkan pada tipologi Zona 4A, yaitu zona potensi resapan tinggi dan potensi perkembangan kawasan tinggi. Upayadidasarkan kepada pertimbangan pengembangan permukiman diarahkan pada bagian kawasan yang memiliki potensi perkembangan tinggi. Namun, disisi lain pada lokasi yang sama merupakan kawasan yang memiliki tingkat kemampuan resapan air hujan yang tinggi. Untuk tetap memperhatikan kelestarian fungsi kawasan resapan air, maka pengembangan permukiman disertai dengan penerapan konsep zero run off secara ketat, yaitu seluruh komponen ruang permukiman tidak diperkenankan menghasilkan peningkatan aliran air ke dalam sistem drainase maupun sungai. Komponenen ruang tersebut meliputi rumah tinggal, fasilitas pelayanan, jaringan jalan, jaringan utilitas.

Secara lebih spesifik, ketentuan zero run off yang dapat diterapkan, sebagai berikut:

- a. Wajib menyediakan sumur resapan pada setiap kavling bangunan untuk menyerapkan seluruh air hujan ke dalam air tanah pada setiap kavling bangunan.
- b. Wajib menyediakan lubang resapan biopori untuk lebih mengoptimalkan air hujan yang meresap ke dalam tanah. Sarana ini ditempatkan pada bagian-bagian lahan terbangun yang limpasan air permukaannya tidak terjangkau oleh sumur resapan.
- c. Wajib penggunaan material mudah meresapkan air hujan

- d. Wajib septik tank ramah lingkungan secara ketat
- e. Wajib menyediakan tandon/ kolam resapan agar air hujan yang jatuh dalam kawasan teresapkan secara optimal.

4. Penetapan Sebagai Zona Prioritas Pengembangan Permukiman

Upayaini diarahkan pada tipologi Zona 4B, yaitu zona potensi resapan rendah dan potensi perkembangan tinggi. Tipologi ini merupakan kondisi yang paling sesuai untuk pengembangan permukiman, yaitu pengembangan permukiman diarahkan pada bagian kawasan yang memiliki potensi perkembangan tinggi dan memiliki kemampuan dalam meresapkan air hujan relatif rendah. Namun, dalam upaya menjaga kelestarian fungsi kawasan sebagai resapan air, maka pengembangan permukiman disertai dengan penerapan konsep zero run off tidak secara ketat, yaitu hanya sebagian komponen ruang permukiman yang tidak diperkenankan menghasilkan peningkatan aliran air ke dalam sistem drainase maupun sungai. Komponenen ruang tersebut meliputi rumah tinggal, fasilitas pelayanan dan jaringan utilitas. Sedangkan jaringan jalan dan penyediaan tandon/ kolam resapan tidak mutlak diwajibkan. Masyarakat permukiman perdesaan biasanya memiliki kemampuan ekonomi relatif rendah, sehingga hal ini tidak terlalu membebani kepada masyarakat perdesaan.

5. Pengembangan Pertanian Semusim Terpadu Tanaman Hutan

Sektor pertanian merupakan sektor basis bagi Kabupaten Ciamis umumnya dan kawasan resapan air khususnya. Kegiatan pertanian yang tidak sesuai dengan kawasan resapan

air dapat menurunkan fungsi kawasan resapan air. Disisi lain, kegiatan pertanian yang diminati penduduk setempat seringkali tidak mendukung fungsi kawasan resapan air. Idealnya kawasan resapan air seluruhnya kawasan hutan. Salah satu alternatif solusinya dengan cara agroforestri, yaitu menanam tanaman tahunan berkayu (pohon) dan tanaman pertanian/ tanaman semusim pada lahan yang sama bagi petani di kawasan resapan air. Hal ini selain akan meningkatkan fungsi kawasan resapan air sekaligus akan meningkatkan pendapatan petani. Agar kegiatan pertanian di kawasan resapan air memiliki peluang pemasaran yang tinggi dan menguntungkan bagi masyarakat diarahkan untuk memilih komoditi unggulan.

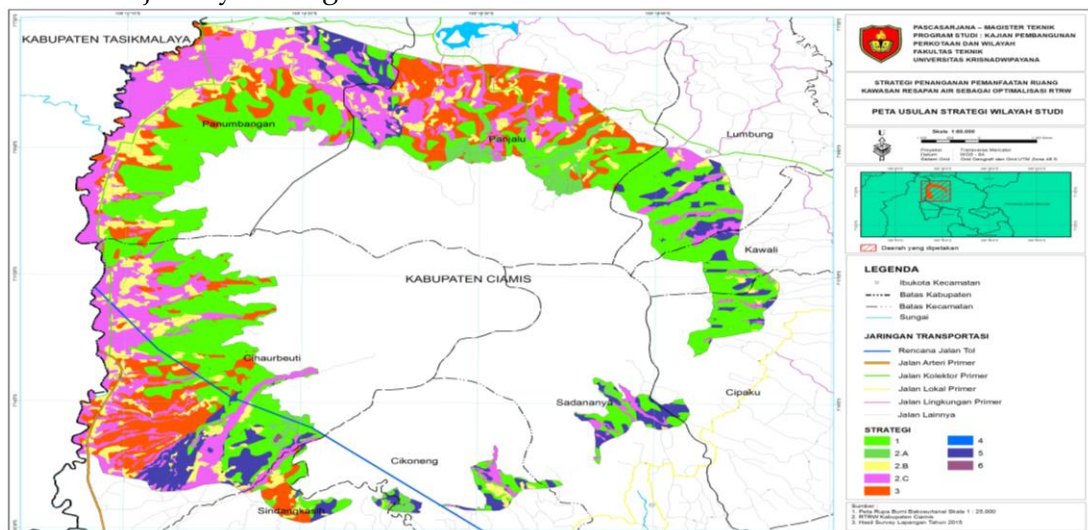
Upaya ini diarahkan pada tipologi Zona 4C, yaitu Zona Potensi Resapan Tinggi dan Potensi Perkembangan Rendah. Kawasan ini memiliki tingkat perkembangan rendah, sehingga lebih sesuai untuk pengembangan kegiatan pertanian dibandingkan kegiatan permukiman. Namun, dalam upaya menjaga kelestarian fungsi kawasan sebagai resapan air, maka pengembangan pertanian semusim disertai dengan penerapan konsep agroforestri. Sesuai

Untuk lebih jelasnya lihat gambar di bawah ini.

dengan potensi resapan yang tinggi, maka pengembangan tanaman semusim dikembangkan secara terpadu dengan jenis tanaman yang paling sesuai untuk kawasan resapan air, yaitu tanaman hutan.

6. Pengembangan Pertanian Semusim Terpadu Tanaman Perkebunan

Upaya ini diarahkan pada tipologi Zona 4D, yaitu Zona Potensi Resapan Rendah dan Potensi Perkembangan Rendah. Tipologi ini merupakan kondisi yang paling sesuai untuk pengembangan pertanian semusim, yaitu kawasan yang memiliki potensi perkembangan yang rendah lebih sesuai untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian dibandingkan dengan kawasan permukiman. Selain itu kawasan ini memiliki tingkat resapan yang rendah, sehingga paling sesuai untuk pengembangan kegiatan pertanian semusim. Namun, dalam upaya menjaga kelestarian fungsi kawasan sebagai resapan air, maka pengembangan pertanian semusim disertai dengan penerapan konsep agroforestri. Sesuai dengan potensi resapan air relatif rendah, maka diberikan toleransi untuk boleh mengembangkan pertanian semusim secara terpadu boleh dengan tanaman perkebunan (tidak harus dengan tanaman hutan).



Gambar 5 Usulan Penanganan

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Pada kondisi eksisting terdapat penggunaan lahan yang tidak sesuai untuk kawasan resapan air, seperti permukiman dan pertanian semusim. Permukiman yang ada berpotensi untuk terus berkembang sejalan dengan tuntutan perkembangan penduduk yang akan terus berkembang. Demikian halnya dengan pertanian semusim perlu diantisipasi tuntutan perkembangan ruangnya.
2. Kemampuan kawasan dalam meresapkan air hujan di lokasi penelitian berbeda-beda potensinya. Demikian halnya, dengan potensi perkembangan permukiman di lokasi penelitian memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Idealnya potensi perkembangan permukiman berada pada lokasi yang memiliki kemampuan resapan air yang rendah. Namun fakta yang terjadi di lokasi penelitian adanya ketidak selarasan. Sehingga perlu ada arahan untuk mengakomodir seluruh potensi tersebut dapat terakomodir dengan tetap mengoptimalkan fungsi resapan air.
3. Upaya pemerintah daerah untuk menjadikan seluruh lokasi penelitian menjadi kawasan hutan akan dihadapkan kendala dalam membebaskan permukiman yang sudah ada, kendala dalam merubah sawah menjadi hutan dan potensi perkembangan yang perlu diantisipasi. Atas dasar tersebut dengan konsep pengembangan permukiman *zero run off dan agroforestri* diharapkan menjadi

solusi untuk mengakomodir potensi perkembangan permukiman dan pertanian semusim dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi kawasan resapan air sebagaimana sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis .

B. Rekomendasi

Rekomendasi merupakan usulan dari hasil penelitian ini, yaitu adanya lokasi-lokasi kritis yang prioritas untuk ditangani oleh pemerintah Kabupaten Ciamis. Sebagaimana disebutkan sebelumnya kemampuan pembiayaan pembangunan di Kabupaten Ciamis relatif terbatas, termasuk dalam pelaksanaan program penanganan kawasan resapan air, seperti pembuatan sumur resapan dan biopori. Bantun kegiatan agroforestri diarahkan pada kawasan pertanian sawah yang memiliki potensi resapan air tinggi, yaitu di semua kecamatan seluas 1.895,25 Ha. Selain itu diusulkan adanya revisi terhadap RTRW Kabupaten Ciamis dalam deliniasi permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai dengan usulan upaya penanganan dengan memperhatikan tingkat potensi perkembangan kawasan dan potensi resapan kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Alfianto. 2017. Analisa Kesesuaian Lahan Untuk Lokasi Pengembangan Permukiman Menggunakan Metode Scoring (Studi Kasus: Surabaya Timur). Tuga Akhir. Jurusan Teknik Geomatika Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
2. Chay Asdak. 2007. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

3. Chayati, Supriyadi, 2016. Evaluasi Efektifitas Saluran Drainase Dengan Sistem Delta Zero Q Policy di Perumahan Griya Mitraland Kabupaten Sumenep. *Jurnal. Program Studi Teknik Sipil, Universitas Wiraraja.*
4. Fahmi, Hamzah Haz, 2016. Analisa Kondisi Resapan Air Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis di Kabupaten Gunung Kidul. Naskah Publikasi. Program Studi Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Ferijal, T. 2012. Prediksi Hasil Limpasan Permukaan Dan Laju Erosi Dari Sub Das Krueng Jreu Menggunakan Model SWAT. *Jurnal Agrista. Program Studi Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.*
6. Hairiah, Sardjono, Sabarnurdin. 2003. Bahan Ajaran Agroforestri. Bogor. Indonesia.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor: 32 Tahun 1990, Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
8. Maria, Lestiana. 2014. Pengaruh Penggunaan Lahan Terhadap Fungsi Konservasi Air Tanah di Sub DAS Cikapungdung. *Jurnal Riset Geologi dan Pertambangan. Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI.*
9. Peraturan Bupati Ciamis No. 17 Tahun 2017
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, No. 11/ PRT/2014
12. Prahasta, Eddy. 2005. Konsep - Konsep Dasar Sistem Informasi Geografis. Bandung : CV.
13. Sumadi, Franklin, Makainas, 2017. Hubungan Aksesibilitas Terhadap Tingkat Perkembangan Wilayah Kecamatan di Kota Tmohon. *Jurnal. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Sam Ratulangi Manado*
14. Sarbidi. 2015. Metoda Penerapan Zero Run Off Pada Bangunan Gedung Dan Persilnya Untuk Peningkatan Panen Air Hujan Dan Penurunan Puncak Banjir. *Jurnal Permukiman. Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.*
15. Siahaya, Ludia. 2005. Evaluasi lahan untuk tata guna lahan di kawasan resapan air sumber air Batu Gajah Kota Ambon. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
16. Maria, Lestiana. 2014. Pengaruh Penggunaan Lahan Terhadap Fungsi Konservasi Air Tanah di Sub DAS Cikapungdung. *Jurnal Riset Geologi dan Pertambangan. Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI.*
17. Nurhapni, Burhanudin. Kajian Pembangunan Sistem Drainase Berwawasan Lingkungan Di Kawasan Perumahan. *Jurnal. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung*
18. Wicaksono, Teguh. 2011. Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Perumahan Untuk Tujuan Komersial Di Kawasan Tlogosari Kulon Semarang. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
19. Wibowo Mardi. 2006. Model Penentuan Kawasan Resapan Air Untuk Perencanaan Tata Ruang Berwawasan Lingkungan. *Jurnal. Peneliti Geologi Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.*
20. Wangsasusana, Soekarno, Dwijoyanto. 2012. Kajian Konsep Zero Delta Q Policy Terhadap Adanya Kebijakan Pemekaran Wilayah Kota Banjar Jawa Barat. Program Studi Magister Pengelolaan Sumber Daya Air - Institut Teknologi Bandung, Kelompok Keahlian Sumber Daya Air Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung, Kementerian Pekerjaan Umum

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai
Citarum.

BACKLOG PENYEDIAAN RUMAH DI PROVINSI JAWA BARAT

Ir. Toni Rusmarsidik, MUM

Abstrak

Backlog perumahan khususnya bagi MBR yang cukup tinggi di Indonesia perlu dicarikan solusinya dengan lebih mengedepankan peran pemerintah dalam memberikan iklim kondusif bagi penyediaan rumah murah oleh pengembang. Namun demikian, pemerintah sebagai institusi yang menyiapkan regulasi bagi penyediaan rumah murah perlu mengidentifikasi terlebih dahulu 'peta' kebutuhan MBR akan rumah yang layak huni. Penelitian ini pada hakekatnya lebih difokuskan kepada upaya identifikasi kebutuhan maupun upaya untuk penyediaan rumah dalam kaitannya dengan pengurangan backlog rumah di provinsi Jawa Barat.

Kata kunci : Backlog, perumahan, Jawa Barat

Abstract

The housing backlog, especially for low income people, which is quite high in Indonesia, needs to find a solution by prioritizing the government's role in providing a conducive climate for the provision of cheap housing by developers. However, the government as an institution that prepares regulations for the provision of low-cost housing needs to first identify a 'map' of low income people's needs for decent housing. This research is essentially more focused on efforts to identify needs and efforts to provide housing in relation to reducing the backlog of houses in the province of West Java.

Keywords : Backlog, Housing, West Java

I. PENDAHULUAN

Penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada umumnya selalu mengalami kekurangan pasokan dibandingkan dengan kebutuhan akan rumah tersebut. Artinya terjadi selisih

yang sangat besar antara permintaan (*demand*) dengan penyediaan/pembangunan (*supply*). Kondisi ini lah yang sering dikenal dengan istilah backlog.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dalam makalahnya yang berjudul "Peranan APBN Dalam Mengatasi Backlog Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR)" menjelaskan bahwa tingginya angka backlog kepemilikan rumah menurut data Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR yang mencapai angka 11.459.875 unit pada tahun 2015 membuat Pemerintah harus hadir dalam mengatasi permasalahan ini. Kebutuhan akan perumahan setiap tahun mencapai 800.000-1.000.000 unit pertahun, sedangkan kemampuan pemerintah dan pengembang hanya di angka 400.000 unit per tahun. Bila kondisinya tak berubah, maka backlog perumahan nasional akan semakin tinggi, apalagi dengan melihat pertumbuhan penduduk rata-rata di Indonesia yang mencapai 1,49% per tahun. Bila asumsinya kemampuan penyediaan rumah oleh pemerintah tetap, backlog perumahan akan cenderung meroket.

Kondisi inilah yang harus diwaspadai terutama berkaitan dengan munculnya kawasan-kawasan kumuh di kota-kota besar maupun menengah di Indonesia sebagai akibat tingginya angka backlog perumahan setiap tahunnya. Tahsin Yomralioglu dan Recep Nisanci dalam makalahnya yang berjudul, "An Approach To Support Low Income Families' Housing Needs In Developing Countries", menjelaskan bahwa : *Modern urban areas are burdened with many problems such as: population concentration, deterioration of living environments, necessity for preventing fires and other disasters, traffic congestion, insufficient housing and housing sites, sprawl phenomena.*

Ketidakmampuan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, untuk membangun rumah yang layak huni menambah daftar

panjang permasalahan permukiman kumuh diperkotaan. Jika golongan miskin dianggap tidak mampu untuk membantu dirinya sendiri dalam membangun rumah yang layak huni maka mereka seharusnya dibantu. Dalam konteks perumahan, kecenderungan ini berarti hanya pemerintah sajalah yang mampu membangun perumahan yang layak huni bagi masyarakat miskin (sumber: <http://odexyundo.blogspot.co.id/2009/08/faktor-penyebab-tumbuhnya-permukiman.html>).

Seharusnya setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan hak bermukim yang layak dan mempunyai hunian yang sehat dan nyaman, sebagaimana telah diamanatkan dalam :

- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 40 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Sesuai peraturan perundang-undangan tersebut diatas, jelas mempertegas bahwa peran Negara dibutuhkan dalam menjamin pemenuhan kebutuhan perumahan bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, backlog perumahan khususnya bagi MBR yang cukup tinggi di

Indonesia perlu dicarikan solusinya dengan lebih mengedepankan peran pemerintah dalam memberikan iklim kondusif bagi penyediaan rumah murah oleh pengembang. Namun demikian, pemerintah sebagai institusi yang menyiapkan regulasi bagi penyediaan rumah murah perlu mengidentifikasi terlebih dahulu 'peta' kebutuhan MBR akan rumah yang layak huni.

Kecepatan pertumbuhan keluarga dan penyediaan rumah di Indonesia tak sebanding. Pertumbuhan keluarga Indonesia diperkirakan berada pada angka 800 ribu per tahun. Sementara itu, penyediaan rumah hanya mampu menembus angka 300-400 ribu rumah setiap tahun. Pada saat ini backlog mencapai 22 persen. "Ada 61 juta rumah tangga yang tidak punya hunian layak," ujar Igenesj. (sumber : <https://m.tempo.co/read/news/2014/06/11/092584060/2025-120-juta-rakyat-indonesia-tak-punya-rumah>)

Kondisi ini diperparah tidak adanya pemetaan tentang kekurangan perumahan rakyat. "Data dan mapping tentang mana daerah yang kekurangan rumah dan berapa jumlahnya saja tidak ada," ujar Teguh Satria, Ketua Komite Tetap Kebijakan Bidang Properti dan Kawasan Industri Kamar Dagang dan Industri (Kadin). (sumber: <https://m.tempo.co/read/news/2014/06/11/092584060/2025-120-juta-rakyat-indonesia-tak-punya-rumah>)

Kajian yang sedang dilakukan, pada hakekatnya lebih difokuskan kepada upaya identifikasi kebutuhan maupun upaya untuk

penyediaan rumah dalam kaitannya dengan pengurangan backlog rumah di provinsi Jawa Barat. Diharapkan kebijakan dan strategi dalam rangka upaya pengurangan backlog rumah di provinsi Jawa Barat tersebut dapat diterapkan juga pada provinsi-provinsi lain di Indonesia. Pada akhirnya, harapan untuk semakin berkurangnya backlog rumah di Indonesia secara keseluruhan dapat segera terwujud.

II. TINJAUAN PUSTAKA/DASAR TEORI

2.1 Perhitungan Backlog Atau Kebutuhan Rumah

2.1.1 Pengertian Backlog Perumahan

Secara umum backlog perumahan dapat diartikan sebagai kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Dengan pengertian ini, Backlog Perumahan adalah kuantitas rumah belum/tidak tertangani. Backlog Perumahan dihitung berdasarkan konsep bahwa satu unit rumah per satu rumah tangga atau kepala keluarga.

Dalam menentukan acuan jumlah backlog perumahan, terdapat perbedaan sudut pandang (perspektif) terhadap backlog atau kekurangan rumah antara perspektif Kementerian PUPR dengan perspektif Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam perspektif Kementerian PUPR, backlog rumah itu terhadap rumah yang tidak layak huni, sedangkan perspektif BPS, backlog rumah

itu atas rumah milik. Dalam perspektif BPS, orang (rumah tangga) tinggal di rumah yang layak huni, tapi sewa, tetap dianggap backlog perumahan. Sebaliknya menurut perspektif Kementerian PUPR, sepanjang sudah tinggal di hunian yang layak, maka tidak terhitung sebagai angka backlog perumahan. Dengan adanya perbedaan tersebut, kecenderungan angka backlog perumahan Kementerian PUPR lebih kecil dari backlog BPS.

Adanya perbedaan perspektif pengertian backlog perumahan, harus didudukkan pada porsi yang sebenarnya. Hal ini sangat terkait dengan intervensi yang harus dilakukan pemerintah dalam usaha pengurangan backlog perumahan. Backlog pada Kementerian PU adalah mengurangi jumlah penduduk yang tinggal di rumah tidak layak huni, bukan mengurangi penduduk yang tinggal di rumah sewa, bukan pula meningkatkan penduduk agar punya rumah sendiri atau bukan program kepemilikan rumah. Intervensi pemerintah lebih terfokus pada usaha untuk meningkatkan penduduk agar tinggal di rumah yang layak huni.

4 (empat) Faktor-faktor yang mempengaruhi angka backlog perumahan adalah jumlah rumah tangga (RT) yang mencerminkan jumlah kebutuhan rumah oleh rakyat dan jumlah rumah yang dapat disediakan/ dibangun. Jumlah rumah tangga setiap tahun akan mengalami pertumbuhan, dengan data yang tersedia pertumbuhan rumah tangga dapat diproyeksikan untuk beberapa tahun ke depan. Sedangkan jumlah rumah yang tersedia sangat dipengaruhi dengan kebijakan pemerintah dalam bidang

pembangunan, yang sangat menentukan seberapa banyak rumah yang dapat dibangun baik oleh pemerintah maupun sektor swasta (pengembang). Apabila intervensi pemerintah melalui kebijakan bidang perumahan maupun langsung membangun rumah tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan rumah tangga, maka angka backlog perumahan semakin bertambah setiap tahunnya

Pembahasan kebutuhan rumah tidak akan lepas dari pembahasan Backlog, yang akhir-akhir ini sering dijadikan pembahasan di beberapa instansi, terkait dengan adanya informasi backlog yang berbeda-beda yang dikeluarkan oleh instansi berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh beberapa instansi terkait. Pada tahun 2010, menurut data Kemenpera, backlog sebanyak 8,2 juta rumah, sedangkan data Bappenas menyebutkan 9 juta rumah. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut angka backlog secara nasional mencapai 13,6 juta unit rumah. Survei BPS yang dilaksanakan pada tahun 2010 tersebut mencatat angka 22 persen atau sebanyak 13,6 juta rumah tangga tidak memiliki rumah dari total 240 juta jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), sejak 2009 jumlah backlog perumahan dengan persepsi "memiliki" rumah mencatat backlog sebanyak 13,5 juta unit rumah.

2.1.2 Metodologi Penghitungan Backlog

Dalam memperhitungkan backlog atau kebutuhan atau kekurangan rumah, terdapat beberapa metoda yang digunakan,

kondisi ini pada dasarnya akan berpengaruh terhadap kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan terkait dengan upaya untuk mengurangi kebutuhan atau backlog rumah. Beberapa metoda yang muncul antara lain :

Dengan adanya perbedaan perspektif backlog perumahan, terdapat 2 (dua) metode perhitungan backlog perumahan, yaitu :

a. Berdasarkan Perspektif Menghuni

Backlog = Jumlah RumahTangga – Jumlah Total Rumah (Rumah Milik & Rumah Kontrak/Sewa)

Backlog adalah kekurangan rumah, yaitu selisih antara Jumlah Kepala Keluarga dengan Jumlah Rumah yang ada

$$Backlog = \text{Jumlah KK tahun ke-x} - \text{Jumlah Rumah tahun ke-x}$$

$$\text{Kebutuhan Rumah Total} = \text{Kebutuhan Rumah Akibat Pertumbuhan Penduduk} + \text{Backlog}$$

Dalam *Housing Need Backlog : Overview, South Hampshire Housing Market Assessment*, cara menghitung backlog sebagai berikut :

$$\text{Backlog} = \Sigma \text{faktor penambah} - \Sigma \text{faktor pengurang} + \Sigma \text{faktor eksternal}$$

Faktor penambah adalah semua faktor yang berpengaruh terhadap bertambahnya jumlah backlog rumah. Faktor penambah ini mencakup :

- ✓ Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki rumah.
- ✓ Jumlah rumah tidak layak huni, yaitu jumlah rumah yang sudah tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan untuk dihuni oleh keluarga Indonesia, contohnya rumah-rumah yang infrastrukturnya tidak lengkap, termasuk dalam klasifikasi ini :

- 1) Rumah yang dihuni oleh penghuni yang terlalu banyak, sehingga satuan luas lantai per orang lebih kecil dari luas minimal yang telah dipersyaratkan;
 - 2) Rumah rusak hancur;
 - 3) Rumah rusak berat.
- ✓ Jumlah rumah yang rawan tidak layak huni, yaitu rumah yang dalam kondisi apabila dibiarkan akan termasuk dalam rumah tidak layak huni, termasuk dalam kelas ini rumah rusak ringan.
 - ✓ Jumlah bukan rumah tangga, yaitu tunawisma dan *concealed houses*

(istilah diambil dari model Fordham) didefinisikan sebagai pasangan, seseorang yang telah mempunyai anak atau juga seorang dewasa *single* dengan usia diatas 25 tahun menempati

tempat tinggal dengan berbagi dapur atau WC (kamar mandi) dengan keluarga lain.

$$\Sigma \text{ Faktor penambah} = \Sigma \text{ RT tidak punya rumah} + \Sigma \text{ rumah rusak ringan} + \Sigma \text{ rumah rusak berat} + \Sigma \text{ rumah hancur} + \Sigma \text{ bukan RT}$$

Faktor pengurang adalah semua faktor-faktor yang berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah kebutuhan perumahan. Faktor pengurang ini mencakup :

✓ Jumlah rumah yang dibangun baik perumahan yang dibangun oleh pengembang ataupun swadaya masyarakat sendiri dalam setiap tahunnya

✓ Jumlah rumah yang diperbaiki karena sudah tidak layak huni dan menjadi rumah yang layak huni untuk ditempati sebagai unit hunian yang sehat dan aman, termasuk dalam kelas ini rumah rusak hancur, rusak berat dan rusak ringan.

✓ Jumlah rumah kosong (tidak dihuni).

$$\Sigma \text{ Faktor pengurang} = \Sigma \text{ rumah dibangun pengembang} + \Sigma \text{ rumah dibangun secara swadaya} + \Sigma \text{ rumah diperbaiki} + \Sigma \text{ rumah kosong (tidak dihuni)}$$

Faktor eksternal adalah faktor yang berpengaruh terhadap penyediaan kebutuhan perumahan, sehingga jumlah rumah yang tersedia berkurang jumlahnya

akibat dari faktor alam ataupun ulah manusia, contohnya gempa bumi sebagai faktor alam, dan kebakaran sebagai akibat human error.

$$\Sigma \text{ Faktor eksternal} = \Sigma \text{ rumah rusak akibat bencana (banjir + gempa bumi + kebakaran + bencana lainnya)} + \Sigma \text{ rumah rusak karena program kebijakan pemerintah}$$

Catatan :

1. Konsep kebutuhan rumah yang menjadi dasar dalam perumusan

model perhitungan kebutuhan rumah tersebut di atas adalah jumlah rumah yang sudah tersedia atau rumah tangga/keluarga baru yang membutuhkan rumah layak (*housing need*), kebutuhan rumah setiap orang dianggap sama, keterjangkauan tidak dimasukkan dalam perhitungan ini.

2. Ketersediaan data perumahan di Indonesia sangat terbatas, terutama untuk data jumlah bangunan rusak

menurut tingkat kerusakan, jumlah rumah yang diperbaiki, dan jumlah rumah yang dibangun terutama yang dibangun di sektor informal.

3. Beberapa instansi mengeluarkan data yang sama dengan angka yang berbeda.
4. Karena keterbatasan data yang tersedia, sehingga rumusan model ini belum bisa diaplikasikan.

b. $Backlog = (\sum KK - \sum \text{unit tempat tinggal}) + (\sum \text{gelandangan}/4)$

Sumber : <https://www.scribd.com/doc/235794355/Backlog-Konsep-Dan-Data>

c. Backlog $= \sum RT - (\sum \text{Bangunan Eksisting} - \sum \text{Rumah Rusak Berat dengan faktor koreksi extended family 20\%})$

- Milik
- Kontrak
- Sewa
- dll.

Sumber : ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, Bahan Paparan Kementerian Perumahan Rakyat dalam rangka Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat tahun 2011

2.2 Pertimbangan Perhitungan Backlog Atau Kebutuhan Rumah

Dalam rangka menghitung jumlah backlog atau kebutuhan rumah, perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

Keterangan :

- Extended family yaitu keluarga inti ditambah dengan sanak saudara, misalnya : nenek, kakek, keponakan, saudara sepupu, paman, bibi, dan sebagainya

- Rumah tangga yang kontrak/sewa sebaiknya tidak dihitung sebagai backlog
- Rumah tangga yang menghuni rumah milik orang lain dengan beban sewa adalah backlog

- Rumah tangga yang menghuni rumah milik orang tua/saudara dengan beban sewa adalah backlog
- Rumah tangga yang menempati rumah dinas tidak termasuk backlog
- Rumah tangga yang menghuni rumah orang lain dan rumah orang tua/saudara adalah backlog, namun unit rumahnya eksis dan merupakan stok rumah
- Backlog Rumah dapat dikelompokkan kembali menurut kawasan perkotaan dan perdesaan

2.3 Proyeksi kebutuhan rumah

Untuk menghitung jumlah total kebutuhan rumah pada masa-masa yang akan datang dapat dilakukan metoda proyeksi kebutuhan rumah dengan kriteria sebagai berikut :

- Proyeksi kebutuhan rumah berdasarkan pertumbuhan KK.
- Pertumbuhan KK dihitung dari pertumbuhan penduduk.
- 1 KK diasumsikan terdiri dari 5 jiwa.
- Proyeksi kebutuhan rumah berdasarkan segmentasi pendapatan.
- Proyeksi kebutuhan penyediaan rumah baru berdasarkan daya tarik ekonomi (kebutuhan kota inti yang didistribusikan ke daerah *hinterlandnya*).
- Proyeksi kebutuhan penyediaan rumah menggunakan proporsi hunian berimbang.

- Asumsi proporsi jumlah rumah baru yang akan dibangun secara swadaya dengan yang akan dibangun oleh pengembang adalah 80% : 20%
- Pada penyusunan PKP Provinsi, perhitungan backlog untuk masing-masing kabupaten/ kota perlu mempertimbangkan fungsi masing-masing kota (PKN, PKW, PKL, atau PKSN)
- Pemenuhan backlog atau kebutuhan rumah untuk kota inti yang memiliki fungsi PKN Metropolitan didistribusikan ke kota-kota hinterland-nya, dengan asumsi 20% berupa Rumah Susun di kota inti, dan 80% didistribusikan ke kabupaten/ kota sekitarnya. Dengan demikian, kota atau kabupaten yang berbatasan dengan kota inti atau PKN Metropolitan harus memperhitungkan juga “limpahan” kebutuhan rumah dari kota intinya.

2.5 Pemahaman Mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Berpenghasilan Menengah (MBM)

Berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh World Bank, penggolongan pengeluaran masyarakat terbagi menjadi 5 golongan. Pengeluaran per hari di bawah USD 2 sebagai kelas miskin atau sangat bawah, pengeluaran USD 2-4 per kapita per hari sebagai kelas bawah, pengeluaran USD 4-10 per kapita per hari sebagai kelas menengah, pengeluaran USD 10-20 per kapita per hari sebagai kelas menengah

atas, dan di atas USD 20 sebagai kelas atas. Kelas bawah diidentifikasi sebagai masyarakat berpengeluaran di bawah USD 2. Pengeluaran USD 2-20 merupakan golongan kelas menengah. Bila dikonversikan ke mata uang rupiah, masyarakat berpenghasilan rendah merupakan masyarakat dengan penghasilan rendah berdasarkan standar World Bank memiliki pengeluaran di bawah Rp. 26.000,00 per kapita per hari atau Rp. 780.000,00 per kapita per bulan (USD 1=Rp. 13.000,00) sedangkan masyarakat berpenghasilan menengah merupakan masyarakat dengan pengeluaran antara Rp. 26.000,00 per kapita per hari atau Rp.780.000,00 per kapita per bulan hingga

Rp. 260.000,00 per kapita per hari atau Rp. 7.800.000,00 per kapita per bulan.

Biro Pusat Statistik membuat standar orang miskin sebagai orang yang memenuhi kebutuhan makanan dan minuman serta non makanan di bawah Rp. 212.000,00 per bulan per orang atau Rp. 848.000,00 per keluarga yang terdiri dari 4 orang. Nilai garis kemiskinan di tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Di DKI Jakarta, orang disebut miskin apabila kebutuhan per bulannya di bawah Rp. 331.000,00 atau Rp. 1.324.000/keluarga, di Nangroe Aceh Darussalam sebesar Rp.1.112.000,00/keluarga, sedangkan di Jawa Tengah sebesar Rp. 768.000,00/keluarga.

Segmentasi penghasilan keluarga menurut Permenpera No.4 Tahun 2012

Segmentasi	Kriteria
Miskin	Pendapatan lebih kecil dari Rp. 1.500.000 dianggap mampu menyewa rumah susun sederhana sewa maupun rumah sewa tapak
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	pendapatan Rp. 1.500.000 – 3.500.000 kelompok yang sudah dapat memiliki rumah tapak seharga maksimal Rp. 88.000.000
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 1 (MBR 1)	pendapatan Rp. 3.500.000 – 5.500.000 kelompok yang sudah dapat memiliki rumah susun sederhana milik seharga maksimal Rp. 216.000.000.

Masyarakat Berpenghasilan
Menengah dan Atas (MBM/A)

pendapatan lebih besar dari Rp. 5.500.000
mampu memiliki rumah real estate dan rumah
susun mewah (apartemen).

2.6 Dasar Pertimbangan Pemilihan dan Penyediaan Lokasi Berdasarkan Arah dan Perkembangan Kota/Kabupaten

Dasar pertimbangan dalam rangka pemilihan prioritas lokasi pengembangan perumahan dan permukiman berdasarkan arah dan perkembangan kota/kabupaten yang mana rumusan dari kondisi eksisting dan arah pengembangan kawasan baik di dalam lingkup administratif kota/kabupaten dan juga perkembangan wilayah sekitarnya yang akan mempengaruhi kondisi internal kota/ kabupaten. Aspek-aspek yang diperhatikan meliputi:

2.6.1 Arah dan kondisi kawasan budidaya dan lindung

Merupakan delineasi kawasan berdasarkan fungsi budidaya dan lindung. Perhatian terhadap aspek ini dimaksudkan untuk mengetahui ketersediaan kawasan budidaya untuk pengembangan perumahan dan permukiman serta ekspansi perumahan dan permukiman pada kawasan lindung dalam skala dan risiko yang ditimbulkannya.

2.6.2 Arah dan kapasitas daya dukung fisik dan lingkungan

Merupakan delineasi kawasan berdasarkan daya dukung fisik dan lingkungan. Perhatian terhadap aspek ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan fisik dan

lingkungan perkotaan untuk menampung dan mendukung pengembangan yang ada pada saat ini dan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Termasuk diantaranya untuk mengidentifikasi lahan-lahan potensial untuk menampung pengembangan kegiatan yang ada atau pengembangan kegiatan baru . Informasi yang dibutuhkan bagi keperluan tersebut adalah:

a) Kondisi eksisting dan arahan pengembangan sistem prasarana dan sarana perkotaan

Merupakan delineasi kawasan berdasarkan dukungan dan keterpaduannya dengan sistem prasarana dan sarana. Perhatian terhadap aspek ini diperlukan agar tercapai layanan berdasarkan standar pembakuan yang berlaku dan efisiensi dan tepat gunanya sistem pelayanan prasarana dan sarana perkotaan yang disediakan. Informasi yang dibutuhkan dalam analisis ini antara lain kelengkapan prasarana, pola dan kapasitas layanan, jumlah penduduk yang terlayani; serta kapasitas pelayanan tersisa yang masih dapat dimanfaatkan.

b) Kondisi eksisting dan arahan pengembangan sistem pusat kegiatan ekonomi

Meliputi gambaran kondisi eksisting dan rencana pengembangan sistem jasa dan

perdagangan baik yang berupa lokasi maupun karakteristik pelayanannya. Perhatian ini dimaksudkan untuk melihat keterkaitan antara fungsi dan lokasi perumahan yang sesuai dengan dominasi kegiatan kota. Hal ini diperlukan dalam melihat target group perumahan yang sesuai.

c) Kondisi eksisting dan arahan perkembangan sosial-kependudukan

Meliputi gambaran kondisi eksisting dan perkiraan arah perkembangan sosial kependudukan. Hal ini dimaksudkan untuk melihat gambaran kegiatan sosial kependudukan, baik tingkat pertumbuhan penduduk, ukuran keluarga, budaya atau aktivitas sosial penduduk termasuk tradisi, serta pergerakan penduduk (migrasi) yang harus diakomodasikan pada kawasan tersebut serta mencerminkan daya tarik kawasan secara sosial.

d) Kondisi eksisting dan prospek pertumbuhan ekonomi

Meliputi gambaran kondisi eksisting dan perkiraan arah pertumbuhan ekonomi. Hal ini dimaksudkan untuk melihat masalah dan kapasitas perkembangan sektor-sektor pendorong ekonomi yang dapat dilihat dari faktor ketenagakerjaan, sumbangan terhadap PDRB, pola kegiatan usaha, termasuk penggunaan tanah, dukungan input dan timbulan aktivitas serta permasalahannya.

e) Kondisi eksisting dan prospek keterkaitan dengan Kabupaten/Kota lainnya

Meliputi gambaran kondisi eksisting dan prospek keterkaitan kota/kabupaten tersebut dengan fungsi dan aktivitas wilayah disekitarnya, terutama mengenai kondisi dan arah pengembangan sistem perumahan dan permukimannya. Hal ini sangat penting karena kota merupakan kawasan yang terbuka sehingga penduduk yang tinggal di kota lain bisa bekerja di kota ini dan sebaliknya penduduk yang bekerja di suatu kota memilih tempat tinggal di kota yang lain. Keadaan ini tentunya akan mempengaruhi pola kebutuhan pengembangan perumahan dan permukiman beserta penyediaan lokasinya.

2.6.3 Persyaratan Umum Lokasi Perumahan dan Permukiman

Lokasi kawasan perumahan harus sesuai dengan rencana peruntukan lahan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah setempat atau dokumen perencanaan tata ruang lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat, atau memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Tidak berada pada kawasan lindung,
- b) Bebas dari pencemaran air, udara, dan gangguan suara atau gangguan lainnya, baik yang ditimbulkan sumber daya buatan manusia maupun sumber daya alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami,

- c) Ketinggian lahan kurang dari 1.000 meter di atas permukaan air laut (MDPL),
- d) Kemiringan lahan tidak melebihi 15 %, dengan ketentuan:
 - ➔ Tanpa rekayasa untuk kawasan yang terletak pada lahan bermorfologi datar landai dengan kemiringan 0-8%,
 - ➔ Diperlukan rekayasa teknis untuk lahan dengan kemiringan 8-15%.
- e) Pada kota-kota yang mempunyai bandar udara, tidak mengganggu jalur penerbangan pesawat,
- f) Kondisi sarana-prasarana memadai,
- g) Dekat dengan pusat-pusat kegiatan dan pelayanan kota,

Bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, keterkaitan antara lokasi perumahan dengan pusat-pusat kegiatan (tempat kerja) dan pelayanan kota akan mempunyai implikasi ekonomi. Jarak yang relatif jauh akan berpengaruh banyak terhadap pengeluaran biaya transport dibandingkan seluruh pengeluaran rutin keluarga. Hal ini akan menimbulkan tambahan beban terhadap penghuninya, sehingga mempengaruhi kemampuannya untuk mengalokasikan sebagian penghasilannya untuk perumahan (*Dwelling Expenditure*).

2.6.4 Persyaratan Dasar Permukiman dan Perumahan

Suatu bentuk permukiman yang ideal di kota merupakan pertanyaan yang menghendaki jawaban yang bersifat komprehensif, sebab perumahan dan permukiman menyangkut kehidupan manusia termasuk kebutuhan manusia yang terdiri dari berbagai aspek. Sehingga dapat dirumuskan secara sederhana tentang ketentuan yang baik untuk suatu permukiman yaitu harus memenuhi sebagai berikut:

- 1) Lokasinya sedemikian rupa sehingga tidak terganggu oleh kegiatan lain seperti pabrik, yang umumnya dapat memberikan dampak pada pencemaran udara atau pencemaran lingkungan lainnya.
- 2) Mempunyai akses terhadap pusat-pusat pelayanan seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan lain-lain.
- 3) Mempunyai fasilitas drainase, yang dapat mengalirkan air hujan dengan cepat dan tidak sampai menimbulkan genangan air walaupun hujan yang lebat sekalipun.
- 4) Mempunyai fasilitas penyediaan air bersih, berupa jaringan distribusi yang siap untuk disalurkan ke masing-masing rumah.

- 5) Dilengkapi dengan fasilitas air kotor/ tinja yang dapat dibuat dengan sistem individual yaitu tanki septik dan lapangan rembesan, ataupun tanki septik komunal.
- 6) Permukiman harus dilayani oleh fasilitas pembuangan sampah secara teratur agar lingkungan permukiman tetap nyaman.
- 7) Dilengkapi dengan fasilitas umum seperti taman bermain bagi anak-anak, lapangan atau taman, tempat beribadat, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan skala besarnya permukiman itu.
- 8) Dilayani oleh jaringan listrik dan telepon.

Menurut SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan lokasi lingkungan perumahan harus memenuhi ketentuan lokasi perumahan harus sesuai dengan rencana peruntukan lahan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat atau dokumen perencanaan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria keamanan, dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan merupakan kawasan lindung (*catchment area*), olahan pertanian, hutan produksi, daerah

buangan limbah pabrik, daerah bebas bangunan pada area Bandara, daerah dibawah jaringan listrik tegangan tinggi;

2. Kriteria kesehatan, dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan daerah yang mempunyai pencemaran udara di atas ambang batas, pencemaran air permukaan dan air tanah dalam;
3. Kriteria kenyamanan, dicapai dengan kemudahan pencapaian (aksesibilitas), kemudahan berkomunikasi (internal/eksternal, langsung atau tidak langsung), kemudahan berkegiatan (prasarana dan sarana lingkungan tersedia);
4. Kriteria keindahan/ keserasian/ keteraturan (kompatibilitas), dicapai dengan penghijauan, mempertahankan karakteristik topografi dan lingkungan yang ada, misalnya tidak meratakan bukit, mengurug seluruh rawa atau danau/ setu/ sungai/ kali dan sebagainya;
5. Kriteria fleksibilitas, dicapai dengan mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan fisik/ pemekaran lingkungan perumahan dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana;

6. Kriteria keterjangkauan jarak, dicapai dengan mempertimbangkan jarak pencapaian ideal kemampuan orang berjalan kaki sebagai pengguna lingkungan terhadap penempatan sarana dan prasarana-utilitas lingkungan.
7. Kriteria lingkungan berjati diri, dicapai dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, terutama aspek kontekstual terhadap lingkungan tradisional/ lokal setempat.

8. Lokasi perencanaan perumahan harus berada pada lahan yang jelas status kepemilikannya, dan memenuhi persyaratan administratif, teknis dan ekologis.

Keterpaduan antara tatanan kegiatan dan alam di sekelilingnya, dengan mempertimbangkan jenis, masa tumbuh dan usia yang dicapai, serta pengaruhnya terhadap lingkungan, bagi tumbuhan yang ada dan mungkin tumbuh di kawasan yang dimaksud.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN KEBUTUHAN RUMAH DI PROVINSI JAWA BARAT

3.1 Kondisi Eksisting

Berdasarkan data dan informasi yang telah disebutkan pada bagian terdahulu bahwa kondisi backlog rumah di Indonesia telah mencapai angka 11.459.875 unit pada tahun 2015 mengakibatkan isu dan permasalahan penyediaan rumah khususnya untuk MBR, membuat Pemerintah harus hadir dalam mengatasi permasalahan ini.

Pada bagian ini akan dikaji kondisi eksisting kebutuhan rumah di provinsi Jawa Barat, dimana pada hakekatnya kondisi tersebut dapat diketahui dengan menggunakan sumber data yang terdapat pada Badan Pusat Statistik Nasional, maupun pada Berdasarkan hasil pengumpulan data sekunder kondisi kependudukan di Provinsi Jawa Barat, diperoleh gambaran kebutuhan rumah, sebagai berikut :



Badan Pusat Statistik (BPS) di masing-masing provinsi.

Kondisi kependudukan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)			
Wilayah Jawa Barat	2018	2019	2020
Provinsi Jawa Barat	48 683 861	49 316 712	49 935 858
Bogor	5 840 907	5 965 410	6 088 233
Sukabumi	2 460 693	2 466 272	2 470 219
Cianjur	2 260 620	2 263 072	2 264 328
Bandung	3 717 291	3 775 279	3 831 505
Garut	2 606 399	2 622 425	2 636 637
Tasikmalaya	1 751 295	1 754 128	1 755 710
Ciamis	1 188 629	1 195 176	1 201 685
Kuningan	1 074 497	1 080 804	1 087 105
Cirebon	2 176 213	2 192 903	2 209 633
Majalengka	1 199 300	1 205 034	1 210 709
Sumedang	1 149 906	1 152 400	1 154 428
Indramayu	1 719 187	1 728 469	1 737 624
Subang	1 579 018	1 595 825	1 612 576
Purwakarta	953 414	962 893	971 889
Karawang	2 336 009	2 353 915	2 370 488
Bekasi	3 630 907	3 763 886	3 899 017
Bandung Barat	1 683 711	1 699 896	1 714 982
Pangandaran	397 187	399 284	401 493
Kota Bogor	1 096 828	1 112 081	1 126 927
Kota Sukabumi	326 282	328 680	330 691
Kota Bandung	2 503 708	2 507 888	2 510 103
Kota Cirebon	316 277	319 312	322 322
Kota Bekasi	2 931 897	3 003 923	3 075 690
Kota Depok	2 330 333	2 406 826	2 484 186
Kota Cimahi	607 811	614 304	620 393
Kota Tasikmalaya	662 723	663 517	663 986
Kota Banjar	182 819	183 110	183 299

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan tabel diatas, bahwa jumlah penduduk paling tinggi adalah di Kabupaten Bogor, yang disusul Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bandung. Kondisi ini mengindikasikan masih tingginya limpahan penduduk yang bekerja dan tinggal

Jabodetabekpunjur serta Bandung Raya menjadi lokasi yang dituju oleh migrasi penduduk dari sekitarnya.

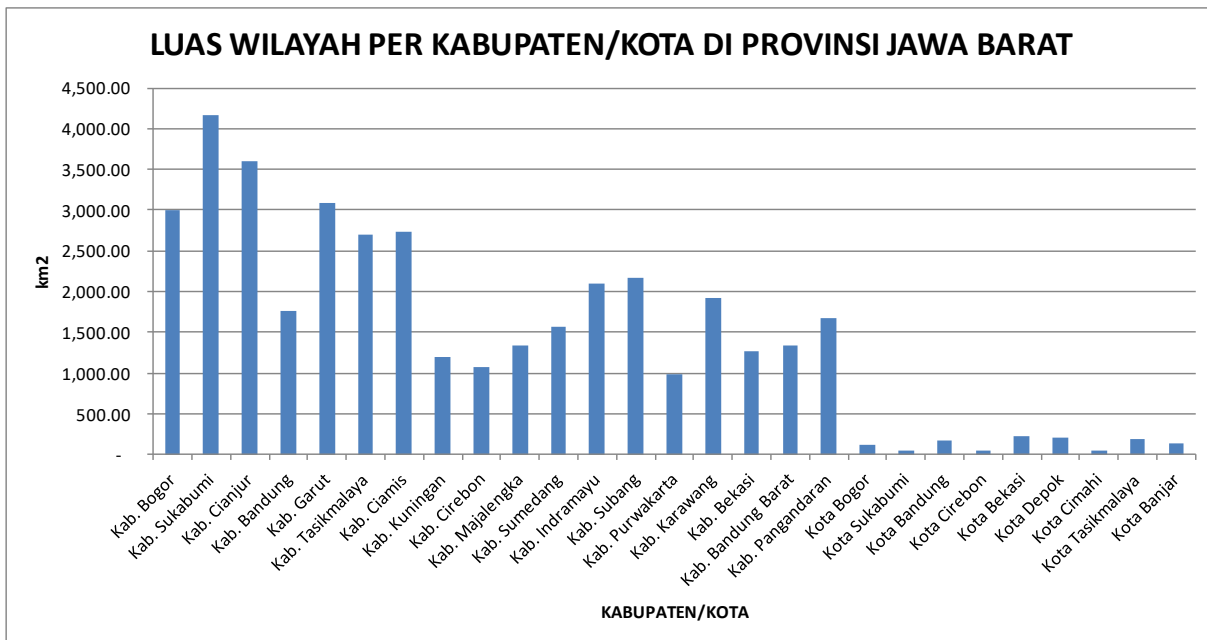
disekitar kota-kota metropolitan seperti halnya Kota Jakarta dan Bandung. Selain itu, aglomerasi ekonomi di Provinsi Jawa Barat juga masih sangat dominan pada dua wilayah tersebut yang menjadikan kawasan metropolitan

Kepadatan Penduduk (jiwa/km)			
Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
Bogor	2 155	2 201	2 246
Sukabumi	594	595	596
Cianjur	589	589	590
Bandung	2 103	2 135	2 167
Garut	848	853	858
Tasikmalaya	686	688	688
Ciamis	840	845	849
Kuningan	968	973	979
Cirebon	2 210	2 227	2 244
Majalengka	996	1 001	1 005
Sumedang	757	759	760
Indramayu	843	847	852
Subang	834	843	851
Purwakarta	1 155	1 166	1 177
Karawang	1 414	1 425	1 435
Bekasi	2 964	3 073	3 183
Bandung Barat	1 289	1 302	1 313
Pangandaran	393	395	398
Kota Bogor	9 256	9 385	9 510
Kota Sukabumi	6 762	6 812	6 854
Kota Bandung	14 932	14 957	14 970
Kota Cirebon	8 466	8 547	8 627
Kota Bekasi	14 190	14 539	14 886
Kota Depok	11 635	12 017	12 403
Kota Cimahi	15 478	15 643	15 798
Kota Tasikmalaya	3 862	3 866	3 869
Kota Banjar	1 611	1 613	1 615
Provinsi Jawa Barat	1 376	1 394	1 412

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan tabel jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 dapat diketahui bahwa tingkat kepadatan penduduk yang tinggi berada di daerah-daerah perkotaan,

sementara itu jumlah penduduk yang paling tinggi ada di Kabupaten Bogor dan Bekasi, karena kedua kabupaten tersebut adalah menerima limpahan penduduk yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Meskipun demikian, apabila dilihat dari luas wilayahnya, kabupaten dengan luas wilayah terbesar di Provinsi Jawa Barat adalah di Kabupaten Sukabumi, yang selanjutnya diikuti dengan Kabupaten Cianjur.

Dengan dipadukan data Jumlah Rumah Tangga di Provinsi Jawa Barat berdasarkan kepemilikan rumah, dapat diketahui bahwa :

1. Kabupaten Bogor adalah kabupaten dengan jumlah rumah tangga yang memiliki rumah sewa/kontrak terbanyak, sementara itu Kota Banjar adalah wilayah dengan jumlah rumah sewa/kontrak paling sedikit.
2. Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan jumlah penduduknya, Kabupaten Bogor adalah kabupaten dengan jumlah

penduduk terbanyak, sehingga dapat diasumsikan bahwa tingkat kebutuhan rumah milik di Kabupaten Bogor adalah yang paling tinggi diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat.

3. Sementara itu, Kabupaten Bekasi dengan jumlah penduduk No.2 di Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah rumah sewa/kontrak yang tidak sebanyak di Kabupaten Bogor. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kecenderungan penduduk di sekitar Provinsi DKI Jakarta untuk bermukim di Kabupaten Bogor dibandingkan dengan di Kabupaten Bekasi.
4. Selain itu, karena factor harga lahan yang lebih tinggi di Kabupaten Bogor dibandingkan dengan di Kabupaten Bekasi mengakibatkan penduduk lebih memilih tinggal di rumah sewa

atau kontrak di Kabupaten Bogor. Sementara itu, karena harga rumah dan lahan yang masih terjangkau di Kabupaten Bekasi, mengakibatkan kepemilikan rumah di Kabupaten Bekasi cukup tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi

Jawa Barat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lokasi tujuan untuk bermukim di Provinsi Jawa Barat adalah masih berada disekitar kota-kota metropolitan seperti halnya Jabodetabekpunjur dan Bandung Raya.

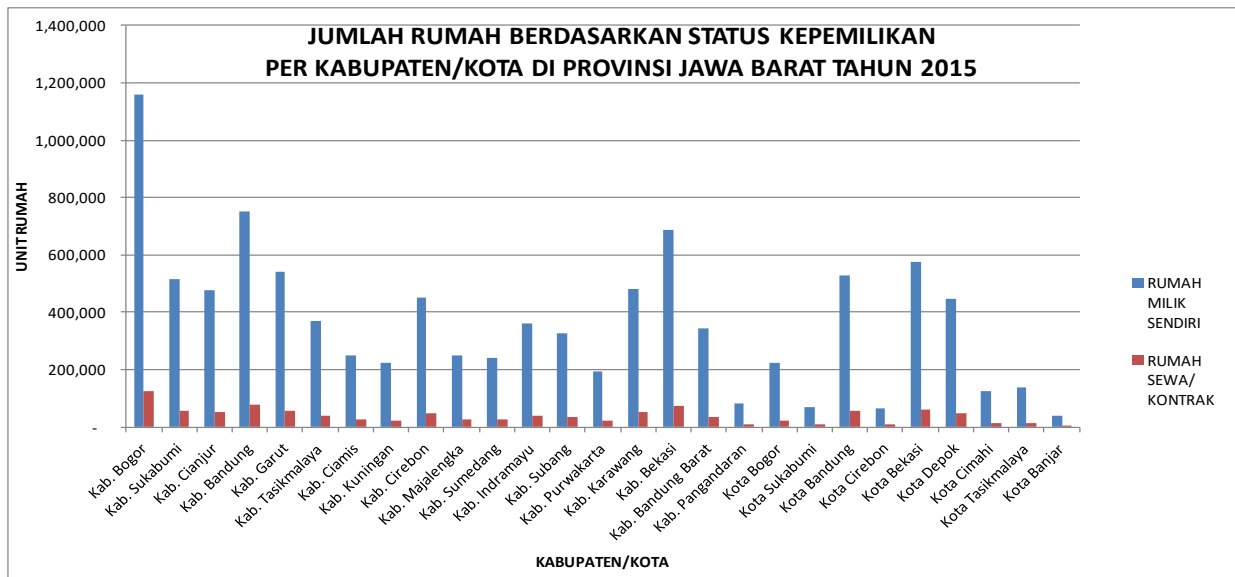
TABEL JUMLAH RUMAH MILIK & SEWA PER KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010, 2013 & 2015

No	KABUPATEN/KOTA	LUAS PER KAB/KOTA (km2)	JUMLAH RUMAH TANGGA BERDASARKAN STATUS KEPEMILIKAN					
			RUMAH MILIK SENDIRI		RUMAH SEWA/ KONTRAK		RUMAH MILIK SENDIRI	
			RUMAH SEWA/ KONTRAK		RUMAH MILIK SENDIRI		RUMAH SEWA/ KONTRAK	
			2010		2013		2015	
1	Kab. Bogor	2,997.13	975,925	147,672	973,888	142,663	1,158,421	122,699
2	Kab. Sukabumi	4,160.75	478,850	72,457	504,182	73,857	516,488	54,706
3	Kab. Cianjur	3,594.65	444,056	67,192	473,312	69,335	476,107	50,429
4	Kab. Bandung	1,756.65	650,055	98,363	685,408	100,404	749,861	79,425
5	Kab. Garut	3,094.40	491,675	74,398	493,998	72,365	540,783	57,279
6	Kab. Tasikmalaya	2,702.85	342,698	51,855	377,551	55,307	368,340	39,014
7	Kab. Ciamis	2,740.76	313,418	47,425	372,312	54,539	247,968	26,265
8	Kab. Kuningan	1,189.60	211,792	32,047	214,723	31,454	223,936	23,719
9	Kab. Cirebon	1,071.05	422,770	63,971	440,888	64,585	451,128	47,783
10	Kab. Majalengka	1,343.93	238,559	36,098	280,239	41,052	250,817	26,566
11	Kab. Sumedang	1,560.49	223,656	33,843	257,565	37,730	241,304	25,559
12	Kab. Indramayu	2,092.10	340,257	51,486	397,193	58,184	358,875	38,012
13	Kab. Subang	2,164.48	299,644	45,341	342,307	50,144	324,502	34,371
14	Kab. Purwakarta	989.89	174,352	26,382	181,678	26,614	195,543	20,712
15	Kab. Karawang	1,914.16	435,162	65,847	480,684	70,414	482,403	51,096
16	Kab. Bekasi	1,269.51	537,953	81,400	624,765	91,521	688,732	72,950
17	Kab. Bandung Barat	1,335.60	308,873	46,737	335,058	49,082	345,728	36,619
18	Kab. Pangandaran	1,680.00	na	na	81,571	11,949	82,852	8,776
19	Kota Bogor	111.73	194,356	29,409	193,967	28,414	222,346	23,551
20	Kota Sukabumi	48.96	61,084	9,243	61,322	8,983	67,497	7,149
21	Kota Bandung	168.23	489,784	74,112	523,736	76,721	526,513	55,768
22	Kota Cirebon	40.16	60,616	9,172	61,773	9,049	65,243	6,911
23	Kota Bekasi	213.58	477,513	72,255	519,873	76,155	576,026	61,012
24	Kota Depok	199.44	355,561	53,802	376,004	55,080	446,868	47,332
25	Kota Cimahi	41.20	110,678	16,747	117,376	17,194	124,459	13,183
26	Kota Tasikmalaya	184.38	129,961	19,665	138,397	20,273	139,502	14,776
27	Kota Banjar	130.86	35,822	5,420	40,739	5,968	38,494	4,077

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Oleh karena itu, tingginya kebutuhan akan rumah sederhana bagi MBR sudah pasti berada pada wilayah-wilayah di sekitar Kota

Metropolitan. Seperti halnya yang dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

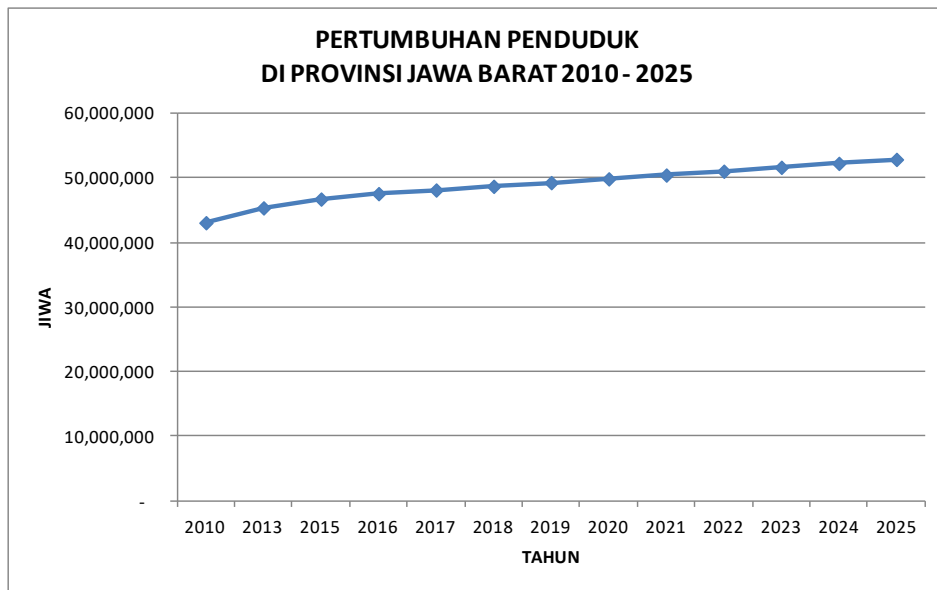
3.2 Proyeksi Kedepan

Berdasarkan data-data yang ada pada tahun 2010, 2018, 2019 dan 2020, dapat

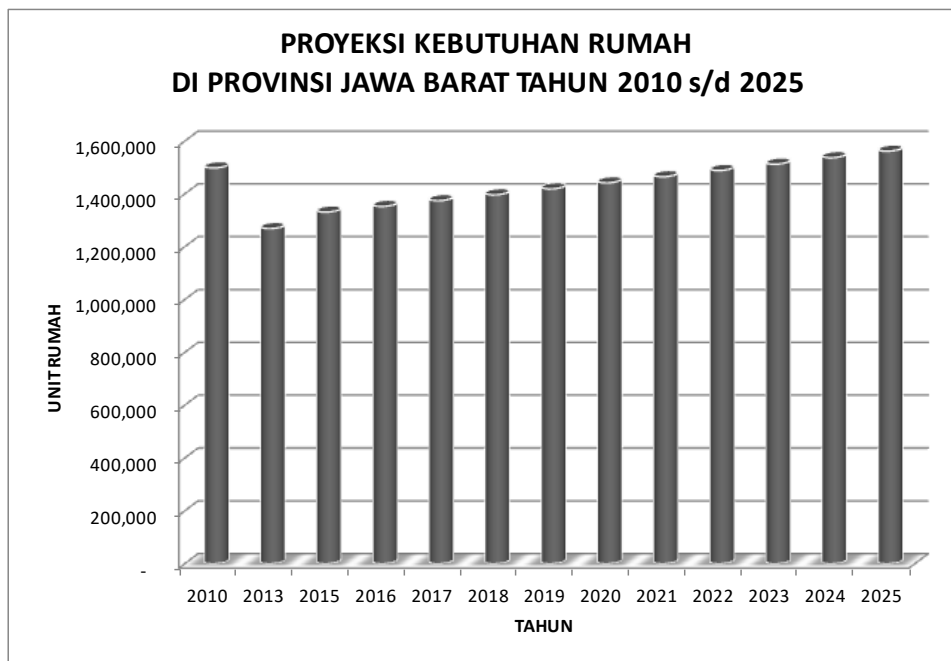
diperkirakan kondisi perkembangan kependudukan dan kebutuhan rumah di Provinsi Jawa Barat sampai dengan 5 tahun kedepan, sebagai berikut.

PROYEKSI PENDUDUK PROVINSI JAWA BARAT 2010-2025					
No	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/km ²)	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	KEBUTUHAN RUMAH
1	2010	43,053,732	1,110	1.49	1,498,735
2	2013	45,341,799	1,169		1,269,093
3	2015	46,709,569	1,204		1,331,517
4	2016	47,550,341	1,226		1,352,955
5	2017	48,111,435	1,240		1,374,737
6	2018	48,679,150	1,255		1,396,871
7	2019	49,253,564	1,270		1,419,360
8	2020	49,834,756	1,285		1,442,212
9	2021	50,422,806	1,300		1,465,432
10	2022	51,017,795	1,315		1,489,025
11	2023	51,619,805	1,331		1,512,998
12	2024	52,228,919	1,346		1,537,358
13	2025	52,845,220	1,362		1,562,109

Sumber : Hasil Analisis



Sumber : Hasil Analisis

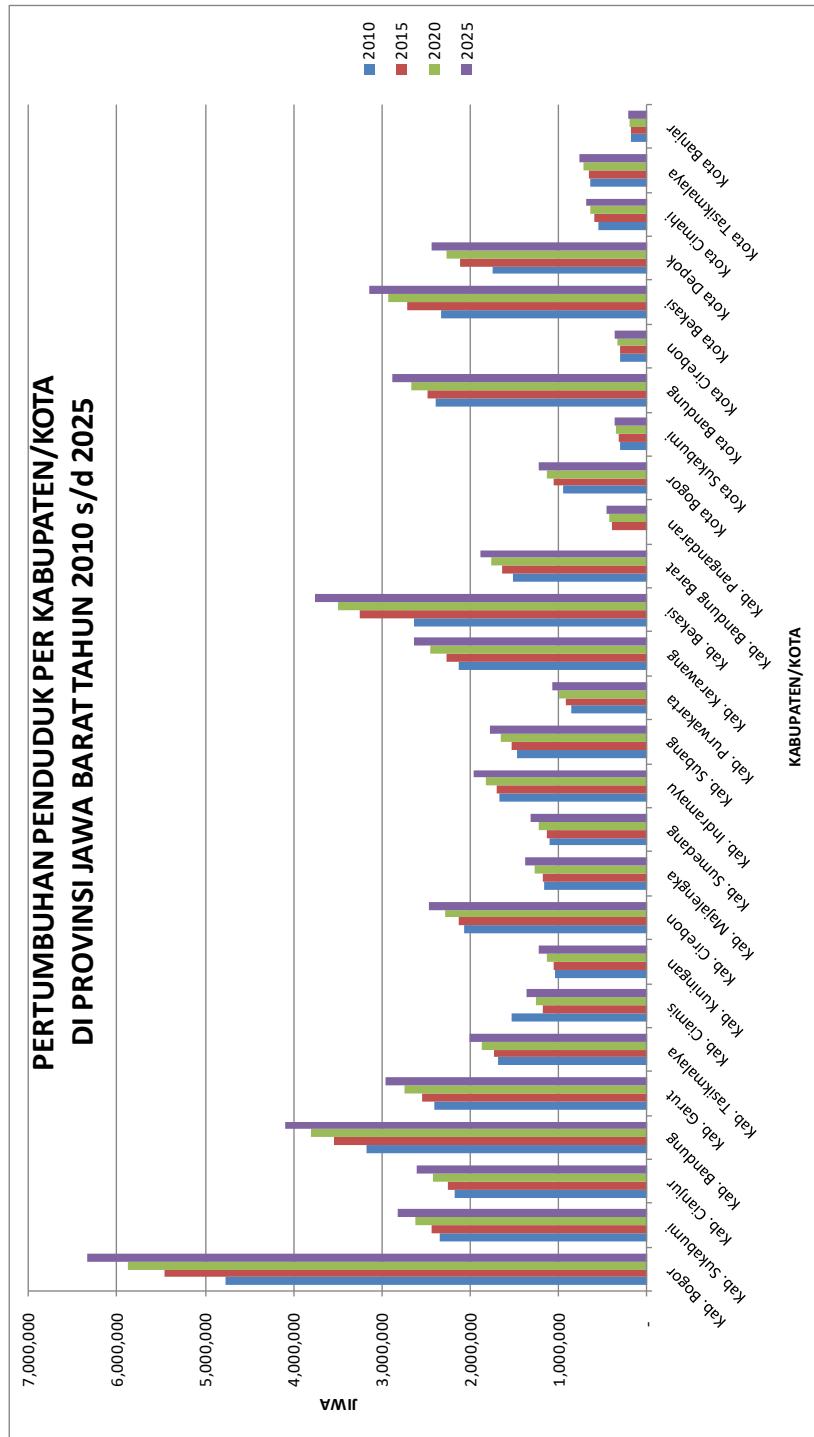


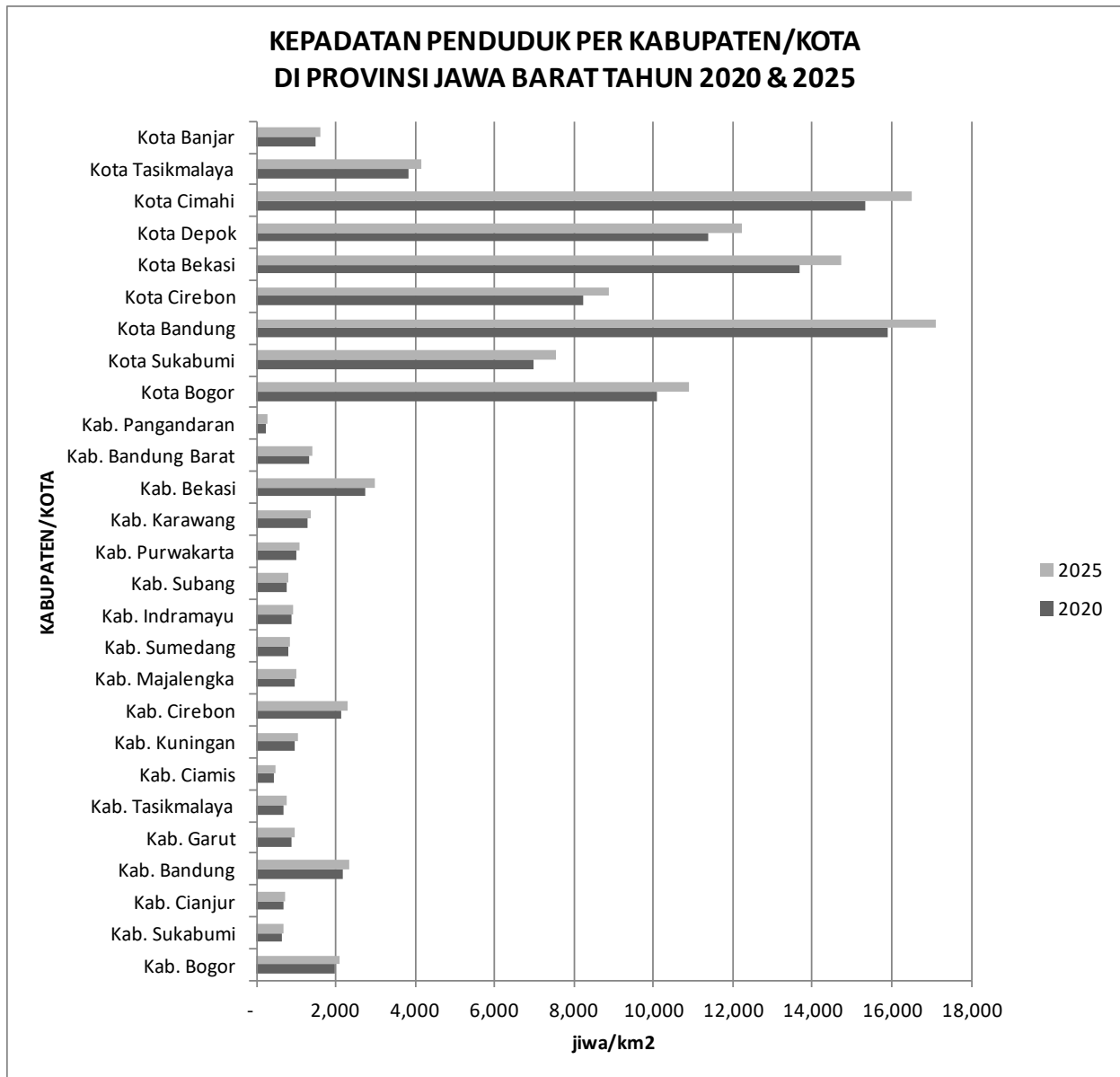
Sumber : Hasil Analisis

Sementara itu kondisi kependudukan untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2025, dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

TABEL PROYEKSI DAN KEPADATAN PENDUDUK PER KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 - 2025

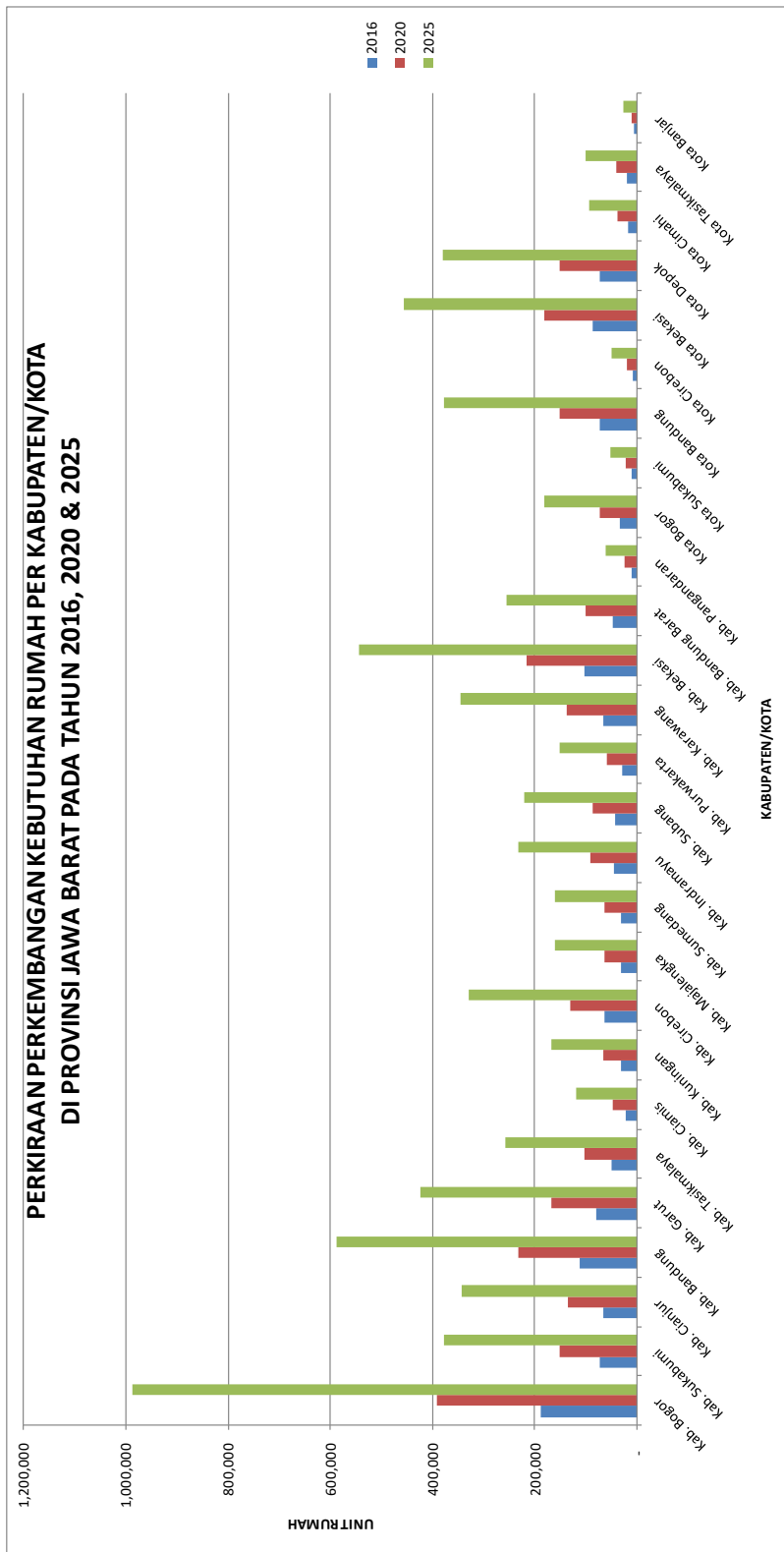
No	KABUPATEN/KOTA	LUAS PER KAB/KOTA (km2)	2010			2015			2020			2025		
			JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/km2)	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/km2)	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/km2)	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/km2)	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/km2)		
1	Kab. Bogor	2,997,13	4,771,932	1,592	5,459,668	1,822	5,878,716	1,961	6,329,928	2,112	6,822,231	2,231	7,282,231	
2	Kab. Sukabumi	4,160,75	2,341,409	563	2,434,221	585	2,621,056	630	2,822,231	678	3,016,131	724	3,211,131	
3	Kab. Cianjur	3,594,65	2,171,281	604	2,243,904	624	2,416,131	672	2,601,578	724	2,805,369	772	3,000,369	
4	Kab. Bandung	1,756,65	3,178,543	1,809	3,534,114	2,012	3,805,369	2,166	4,097,444	2,333	4,388,444	2,500	4,679,444	
5	Kab. Garut	3,094,40	2,404,121	777	2,548,723	824	2,744,346	887	2,954,984	955	3,150,984	1,022	3,356,984	
6	Kab. Tasikmalaya	2,702,85	1,675,675	620	1,735,998	642	1,869,242	692	2,012,713	745	2,157,713	798	2,305,713	
7	Kab. Ciamis	2,740,76	1,532,504	559	1,668,682	426	1,258,382	459	1,354,968	494	1,450,968	527	1,547,968	
8	Kab. Kuningan	1,189,60	1,035,589	871	1,055,417	887	1,136,424	955	1,223,648	1,029	1,310,648	1,102	1,397,648	
9	Kab. Cirebon	1,071,05	2,067,196	1,930	2,126,179	1,985	2,289,371	2,138	2,465,088	2,302	2,640,808	2,455	2,816,628	
10	Kab. Majalengka	1,343,93	1,166,473	868	1,182,109	880	1,272,840	947	1,370,535	1,020	1,468,535	1,093	1,566,535	
11	Kab. Sumedang	1,560,49	1,093,602	701	1,137,273	729	1,224,563	785	1,318,552	845	1,416,552	905	1,514,552	
12	Kab. Indramayu	2,092,10	1,663,737	795	1,691,386	808	1,821,206	871	1,960,989	937	2,100,989	1,000	2,240,989	
13	Kab. Subang	2,164,48	1,465,157	677	1,529,388	707	1,646,774	761	1,773,169	819	1,900,169	877	2,027,169	
14	Kab. Purwakarta	989,89	852,521	861	921,598	931	992,334	1,002	1,068,499	1,079	1,144,499	1,156	1,220,499	
15	Kab. Karawang	1,914,16	2,127,791	1,112	2,273,579	1,188	2,448,084	1,279	2,635,983	1,377	2,828,983	1,475	3,023,983	
16	Kab. Bekasi	1,269,51	2,630,401	2,072	3,246,013	2,557	3,495,156	2,753	3,763,421	2,964	4,031,421	3,175	4,307,421	
17	Kab. Bandung Barat	1,335,60	1,510,284	1,131	1,629,423	1,220	1,754,487	1,314	1,889,150	1,414	2,024,150	1,508	2,159,150	
18	Kab. Pangandaran	1,680,00	na	na	390,483	232	420,454	250	452,725	269	484,725	288	517,725	
19	Kota Bogor	111,73	950,334	8,506	1,047,922	9,379	1,128,354	10,099	1,214,959	10,874	1,301,959	11,649	1,387,959	
20	Kota Sukabumi	48,96	298,681	6,101	318,117	6,497	342,534	6,996	368,824	7,533	394,824	8,070	420,824	
21	Kota Bandung	168,23	2,394,873	14,236	2,481,469	14,750	2,671,930	15,883	2,877,010	17,102	3,082,010	18,331	3,287,010	
22	Kota Cirebon	40,16	296,389	7,380	307,494	7,657	331,095	8,244	356,508	8,877	381,508	9,466	406,508	
23	Kota Bekasi	213,58	2,334,871	10,932	2,714,825	12,711	2,923,197	13,687	3,147,563	14,737	3,361,563	15,712	3,575,563	
24	Kota Depok	199,44	1,738,570	8,717	2,106,102	10,560	2,267,753	11,371	2,441,810	12,243	2,616,810	13,116	2,791,810	
25	Kota Cimahi	41,20	541,177	13,135	586,580	14,237	631,602	15,330	680,080	16,507	728,080	17,604	775,080	
26	Kota Tasikmalaya	184,38	635,464	3,446	657,477	3,566	707,941	3,840	762,277	4,134	817,277	4,418	872,277	
27	Kota Banjar	130,86	175,157	1,339	181,425	1,386	195,350	1,493	210,344	1,607	225,344	1,714	240,344	





KEBUTUHAN RUMAH

No	KABUPATEN/KOTA	LUAS PER KAB/KOTA (km2)	TABEL PERKEMBANGAN KEBUTUHAN RUMAH PER KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 - 2025															
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kab. Bogor	2,997.13	166.115	152.290	139.616	129.412	141.351	155.635	187.193	225.149	270.802	325.712	391.756	471.192	566.734	681.649	819.866	986.108
2	Kab. Sukabumi	4,160.75	81.506	74.723	68.504	66.997	68.173	69.391	71.872	86.445	103.973	125.055	150.413	180.911	217.594	261.715	314.783	378.611
3	Kab. Cianjur	3,594.65	75.584	69.294	63.527	62.895	63.426	63.965	65.055	78.246	94.112	113.195	136.147	163.753	196.957	236.893	284.927	342.701
4	Kab. Bandung	1,756.65	110.648	101.439	92.997	91.079	95.672	100.745	111.444	134.041	161.220	193.910	233.229	280.520	337.400	405.814	488.100	587.071
5	Kab. Garut	3,094.40	83.689	76.724	70.339	65.644	68.974	72.655	80.420	96.726	116.339	139.929	168.302	202.429	243.474	292.843	352.222	423.642
6	Kab. Tasikmalaya	2,702.85	58.332	53.477	49.026	50.170	49.826	49.487	48.813	58.710	70.615	84.934	102.155	122.869	147.783	177.749	213.790	257.140
7	Kab. Ciamis	2,740.76	53.348	48.908	44.838	49.474	39.692	33.315	22.428	26.976	32.446	39.024	46.937	56.455	67.902	81.670	98.230	118.148
8	Kab. Ciumingan	1,189.60	36.050	33.049	30.299	28.533	29.289	30.086	31.725	38.158	45.895	55.201	66.393	79.856	96.048	115.524	138.948	167.122
9	Kab. Cirebon	1,071.05	71.961	65.972	60.481	58.586	59.581	60.610	62.704	75.418	90.711	109.104	131.227	157.835	189.839	228.333	274.631	330.317
10	Kab. Majalengka	1,343.93	40.606	37.226	34.128	37.239	35.378	33.698	30.491	36.674	44.110	53.054	63.812	76.751	92.313	111.031	133.545	160.624
11	Kab. Sumedang	1,560.49	38.069	34.901	31.996	34.226	33.298	32.419	30.707	36.934	44.423	53.430	64.264	77.295	92.968	111.819	134.492	161.763
12	Kab. Indramayu	2,092.10	57.916	53.096	48.677	52.780	50.393	48.215	44.043	52.973	63.714	76.634	92.172	110.862	133.341	160.379	192.898	232.012
13	Kab. Subang	2,164.48	51.003	46.759	42.867	45.486	44.522	43.597	41.785	50.258	60.449	72.706	87.448	105.180	126.507	152.158	183.011	220.120
14	Kab. Purwakarta	989.89	29.677	27.207	24.943	24.142	25.162	26.271	28.590	34.388	41.360	49.747	59.834	71.966	86.558	104.110	125.220	150.610
15	Kab. Karawang	1,914.16	74.070	67.906	62.254	63.874	64.339	64.811	65.763	79.097	95.135	114.426	137.628	165.534	199.099	239.470	288.027	346.429
16	Kab. Bekasi	1,269.51	91.566	83.946	76.959	83.020	87.523	92.532	103.140	124.054	149.208	179.462	215.852	259.619	312.262	375.578	451.733	543.330
17	Kab. Bandung Barat	1,335.60	52.574	48.199	44.187	44.523	45.466	46.449	48.459	58.285	70.103	84.318	101.415	121.979	146.712	176.460	212.241	255.276
18	Kab. Pangandaran	1,680.00	-	-	-	10.839	10.983	11.131	11.431	13.749	16.537	19.890	23.923	28.774	34.608	41.626	50.066	60.218
19	Kota Bogor	111.73	33.082	30.329	27.805	25.775	27.676	29.872	34.625	41.645	50.090	60.246	72.462	87.155	104.828	126.083	151.649	182.399
20	Kota Sukabumi	48.96	10.397	9.532	8.739	8.149	8.584	9.068	10.093	12.139	14.600	17.561	21.122	25.404	30.556	36.751	44.203	53.166
21	Kota Bandung	168.23	83.367	76.429	70.068	69.595	70.162	70.738	71.899	86.478	104.013	125.104	150.471	180.981	217.678	261.817	314.905	378.757
22	Kota Cirebon	40.16	10.318	9.459	8.672	8.209	8.478	8.766	9.361	11.259	13.542	16.287	19.590	23.562	28.340	34.086	40.998	49.311
23	Kota Bekasi	213.58	81.779	74.514	68.313	69.082	73.004	77.390	86.703	104.283	125.429	150.861	181.451	218.244	262.496	315.722	379.740	456.739
24	Kota Depok	199.44	60.521	55.484	50.867	49.964	54.552	60.037	72.149	86.779	104.375	125.539	150.994	181.610	218.435	262.727	315.999	380.074
25	Kota Cimahi	41.20	18.839	17.271	15.834	15.597	16.140	16.721	17.927	21.562	25.934	31.193	37.518	45.125	54.275	65.280	78.517	94.438
26	Kota Tasikmalaya	184.38	22.121	20.280	18.592	18.390	18.565	18.742	19.101	22.974	27.632	33.235	39.974	48.080	57.829	69.555	83.658	100.622
27	Kota Banjar	130.86	6.097	5.590	5.125	5.413	5.290	5.172	4.941	5.943	7.147	8.597	10.340	12.436	14.958	17.991	21.639	26.207

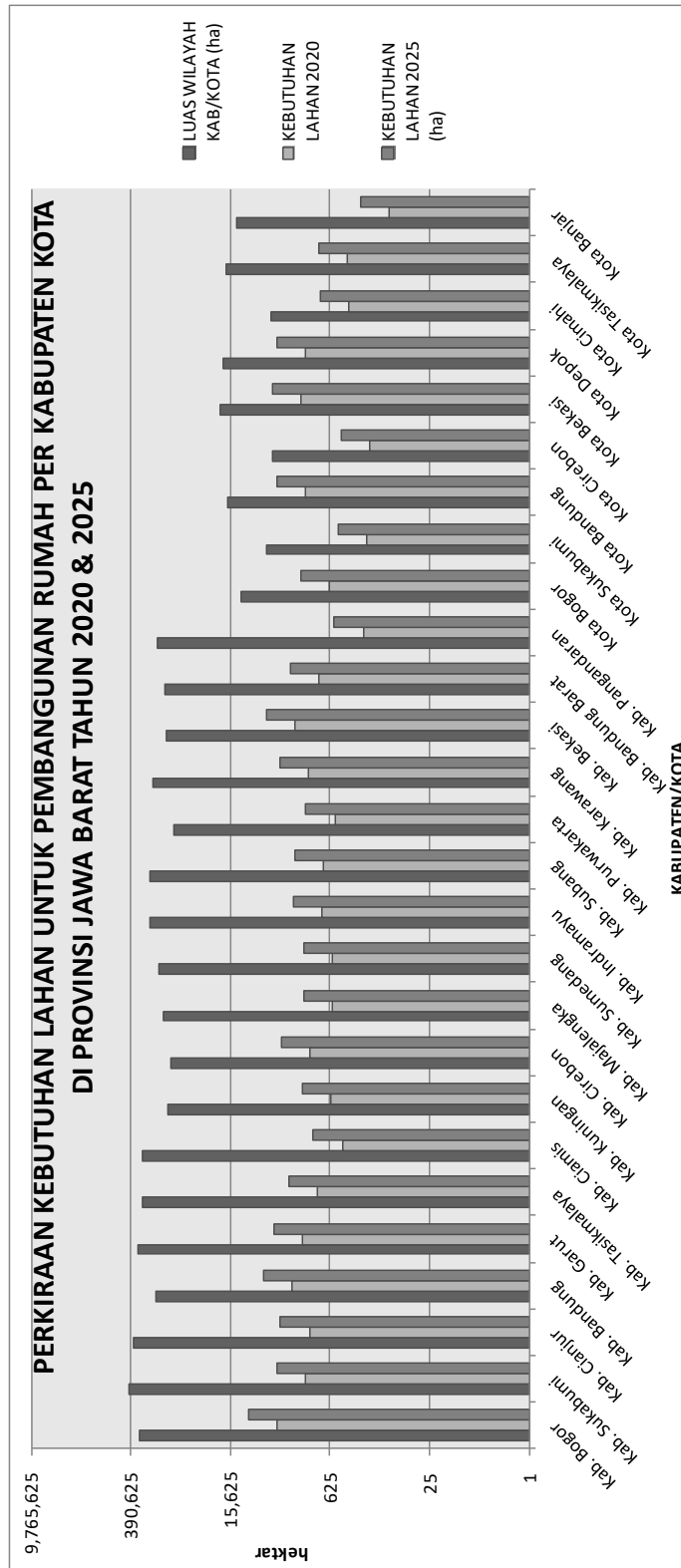


Apabila dilihat pada tabel dan grafik diatas, perkiraan kebutuhan rumah yang tinggi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Wilayah dengan tingkat kebutuhan rumah sangat tinggi di Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Bogor. Kondisi ini disebabkan tingkat kepadatan penduduk cenderung masih lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat, meskipun jumlah penduduknya cenderung terbanyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat.
2. Kondisi tersebut diatas akan sangat mempengaruhi kebutuhan akan perumahan di Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor yaitu Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi. Terjadi limpahan penduduk yang tidak mendapatkan tempat tinggal di Kabupaten Bogor akan cenderung mendiami Kabupaten Sukabumi atau Cianjur.
3. Kondisi tersebut juga sudah mulai dirasakan di Kota Metropolitan Bandung Raya, dimana Kabupaten Garut yang berbatasan wilayahnya dengan Kabupaten Bandung menjadi kabupaten yang ikut meningkat kebutuhan akan perumahan sebagai limpahan penduduk yang berada di sekitar Kota Bandung, khususnya di Kabupaten Bandung.
4. Dengan kondisi seperti tersebut diatas, pada hakekatnya sampai saat ini pada wilayah-wilayah Kota Metropolitan sedang terjadi konurbasi. APabila hal ini tidak diantisipasi, maka akan membebani infrastruktur yang ada.

**TABEL PERKIRAAN KEBUTUHAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH
PER KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 & 2025**

No	KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH (km ²)	LUAS WILAYAH (ha)	2020		2025	
				KEBUTUHAN RUMAH	KEBUTUHAN LAHAN UNTUK RUMAH (ha)	KEBUTUHAN RUMAH	KEBUTUHAN LAHAN UNTUK RUMAH (ha)
1	Kab. Bogor	2,997	299,713	391,756	3,526	986,108	8,875
2	Kab. Sukabumi	4,161	416,075	150,413	1,354	378,611	3,407
3	Kab. Cianjur	3,595	359,465	136,147	1,225	342,701	3,084
4	Kab. Bandung	1,757	175,665	233,229	2,099	587,071	5,284
5	Kab. Garut	3,094	309,440	168,302	1,515	423,642	3,813
6	Kab. Tasikmalaya	2,703	270,285	102,155	919	257,140	2,314
7	Kab. Ciamis	2,741	274,076	46,937	422	118,148	1,063
8	Kab. Kuningan	1,190	118,960	66,393	598	167,122	1,504
9	Kab. Cirebon	1,071	107,105	131,227	1,181	330,317	2,973
10	Kab. Majalengka	1,344	134,393	63,812	574	160,624	1,446
11	Kab. Sumedang	1,560	156,049	64,264	578	161,763	1,456
12	Kab. Indramayu	2,092	209,210	92,172	830	232,012	2,088
13	Kab. Subang	2,164	216,448	87,448	787	220,120	1,981
14	Kab. Purwakarta	990	98,989	59,834	539	150,610	1,355
15	Kab. Karawang	1,914	191,416	137,628	1,239	346,429	3,118
16	Kab. Bekasi	1,270	126,951	215,852	1,943	543,330	4,890
17	Kab. Bandung Barat	1,336	133,560	101,415	913	255,276	2,297
18	Kab. Pangandaran	1,680	168,000	23,923	215	60,218	542
19	Kota Bogor	112	11,173	72,462	652	182,399	1,642
20	Kota Sukabumi	49	4,896	21,122	190	53,166	478
21	Kota Bandung	168	16,823	150,471	1,354	378,757	3,409
22	Kota Cirebon	40	4,016	19,590	176	49,311	444
23	Kota Bekasi	214	21,358	181,451	1,633	456,739	4,111
24	Kota Depok	199	19,944	150,994	1,359	380,074	3,421
25	Kota Cimahi	41	4,120	37,518	338	94,438	850
26	Kota Tasikmalaya	184	18,438	39,974	360	100,622	906
27	Kota Banjar	131	13,086	10,340	93	26,027	234
TOTAL		38,797	3,879,654	2,956,829	26,611	7,442,774	66,985



IV.

KONDISI EKSTING STRATA DAN KEMAMPUAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM MEMBELI RUMAH DI PROVINSI JAWA BARAT

Apabila dianalisis terhadap tabel dibawah ini, ternyata tingkat kemampuan ekonomi masyarakat yang mempunyai kemampuan lebih tinggi dalam hal pengeluaran untuk membeli rumah berada pada

Kabupaten/Kota yang berada di sekitar Kota Jakarta (Bodetabekpunjur) dan Kota Bandung (Bandung Raya) serta Kabupaten/Kota yang berada pada bagian Utara Provinsi Jawa Barat, seperti halnya Kabupaten Subang, Indramayu, dan Cirebon.

Kondisi ini mengindikasikan, bahwa potensi pasar perumahan masih berada pada wilayah disekitar Kota-Kota Metropolitan dan Pantura Jawa.

TABEL STRATA KEMAMPUAN EKONOMI MASYARAKAT PER KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015

No	KABUPATEN/KOTA	LUAS (km2)	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH RUMAH TANGGA	TOTAL RT PENDAPATAN DIBAWAH 1,5 JUTA RUPIAH DENGAN RATA2 PENGELUARAN UNTUK RUMAH LEBIH KECIL ATAU SAMA DGN Rp. 318.900,-	TOTAL RT PENDAPATAN ANTARA 1,5 s/d 4,9 JUTA RUPIAH DENGAN RATA2 PENGELUARAN Rp.318.900 s/d Rp.1.041.740,-	TOTAL RT PENDAPATAN ANTARA 5 s/d 9,9 JUTA RUPIAH DENGAN RATA2 PENGELUARAN Rp.1.063.000 s/d Rp.2.104.740,-	TOTAL RT PENDAPATAN DIATAS 10 JUTA RUPIAH DENGAN RATA2 PENGELUARAN SAMA DGN ATAU LEBIH DARI Rp.2.126.000,-
1	Kab. Bogor	2,997.13	5,459,668	1,436,755	532,030	706,165	157,899	40,660
2	Kab. Sukabumi	4,160.75	2,434,221	640,584	237,208	314,847	70,400	18,129
3	Kab. Cianjur	3,594.65	2,243,904	590,501	218,663	290,231	64,896	16,711
4	Kab. Bandung	1,756.65	3,534,114	930,030	344,390	457,110	102,210	26,320
5	Kab. Garut	3,094.40	2,548,723	670,717	248,366	329,657	73,712	18,981
6	Kab. Tasikmalaya	2,702.85	1,735,998	456,842	169,168	224,538	50,207	12,929
7	Kab. Ciamis	2,740.76	1,168,682	307,548	113,885	151,160	33,800	8,704
8	Kab. Kuningan	1,189.60	1,055,417	277,741	102,848	136,510	30,524	7,860
9	Kab. Cirebon	1,071.05	2,126,179	559,521	207,191	275,004	61,491	15,834
10	Kab. Majalengka	1,343.93	1,182,109	311,081	115,193	152,896	34,188	8,804
11	Kab. Sumedang	1,560.49	1,137,273	299,282	110,824	147,097	32,891	8,470
12	Kab. Indramayu	2,092.10	1,691,386	445,102	164,821	218,767	48,917	12,596
13	Kab. Subang	2,164.48	1,529,388	402,471	149,035	197,814	44,232	11,390
14	Kab. Purwakarta	989.89	921,598	242,526	89,807	119,201	26,654	6,863
15	Kab. Karawang	1,914.16	2,273,579	598,310	221,554	294,069	65,754	16,932
16	Kab. Bekasi	1,269.51	3,246,013	854,214	316,315	419,846	93,878	24,174
17	Kab. Bandung Barat	1,335.60	1,629,423	428,796	158,783	210,753	47,125	12,135
18	Kab. Pangandaran	1,680.00	390,483	102,759	38,052	50,506	11,293	2,908
19	Kota Bogor	111.73	1,047,922	275,769	102,117	135,540	30,307	7,804
20	Kota Sukabumi	48.96	318,117	83,715	31,000	41,146	9,200	2,369
21	Kota Bandung	168.23	2,481,469	653,018	241,813	320,958	71,767	18,480
22	Kota Cirebon	40.16	307,494	80,919	29,964	39,772	8,893	2,290
23	Kota Bekasi	213.58	2,714,825	714,428	264,553	351,141	78,516	20,218
24	Kota Depok	199.44	2,106,102	554,237	205,234	272,408	60,911	15,685
25	Kota Cimahi	41.20	586,580	154,363	57,161	75,869	16,965	4,368
26	Kota Tasikmalaya	184.38	657,477	173,020	64,069	85,039	19,015	4,896
27	Kota Banjar	130.86	181,425	47,743	17,679	23,466	5,247	1,351
TOTAL		38,797	46,709,569	12,291,992	4,551,725	6,041,514	1,350,890	347,863

Sumber : Hasil Analisa

V. KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan dari penelitian terkait backlog perumahan di Provinsi Jawa Barat, beberapa kesimpulannya adalah :

1. Kabupaten Bogor adalah Kabupaten dengan tingkat kebutuhan akan perumahan yang tertinggi di Provinsi Jawa Barat, yang sekaligus membutuhkan lahan untuk perumahan yang terbanyak.
2. Kondisi ini akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan perumahan pada kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor, dimana Kabupaten Cianjur dan Sukabumi diprediksi akan mengalami peningkatan kebutuhan perumahan dalam 1 s.d 5 tahun yang akan datang sebagai akibat dari limpahan penduduk yang tidak bisa tinggal di Kabupaten Bogor.
3. Sebagai pembanding adalah kebutuhan akan perumahan di Kota Banjar yang berada di wilayah Timur Provinsi Jawa Barat yang merupakan wilayah dengan kebutuhan akan perumahan yang paling rendah. Kondisi ini semakin memperbesar adanya perbedaan perkembangan wilayah, yaitu antara wilayah Barat dan Timur serta wilayah bagian Utara dan Selatan di Provinsi Jawa Barat.
4. Diperlukan adanya upaya penyebaran pembangunan yang harus lebih besar ke arah timur Provinsi Jawa Barat, agar terjadi penurunan beban yang diemban

Kota-kota di wilayah Barat Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dari kondisi infrastrukturnya yang cenderung menurun kualitasnya di bagian barat Provinsi Jawa Barat, yang disebabkan oleh tingkat kemacetan yang sangat tinggi dan tingkat polusi udara yang juga tinggi pada kota-kota yang berada di wilayah Barat Provinsi Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. (2015) "Peranan APBN Dalam Mengatasi Backlog Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)". Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Jakarta

Kementerian Perumahan Rakyat. (2011) "Arah dan Kebijakan Nasional Pembangunan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Jakarta

SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan,

Y Tahsin, N Recep (2005), "An Approach To Support Low Income Families' Housing Needs In Developing Countries". FIG OICRF, Cairo, Egypt.

Website :

Faktor Penyebab Tumbuhnya Permukiman Kumuh Di Pusat Kota Dan Kawasan Pesisir Pantai.

<http://odexyundo.blogspot.co.id/2009/08/faktor-penyebab-tumbuhnya-permukiman.html>

2025, 120 Juta Rakyat Indonesia Tak Punya Rumah.

<https://m.tempo.co/read/news/2014/06/11/092584060/2025-120-juta-rakyat-indonesia-tak-punya-rumah>

Housing Need Backlog : Overview, South Hampshire Housing Market Assessment. 2005. www.push.gov.uk/section_8_-_housing_needs_backlog.pdf. diunduh tanggal 17 Juni 2019

Backlog : Konsep dan Data. <https://www.scribd.com/doc/235794355/Backlog-Konsep-Dan-Data>

ANALISIS KETERSEDIAAN PELAYANAN KESEHATAN DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI KOTA BEKASI

Oleh
Ir. Reny Savitri, MT

ABSTRAK

Pada awal tahun 2020, Covid-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/*World Health Organization* (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi penyebaran di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID-19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Pada tanggal 11 Maret WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemic. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Mengidentifikasi Pemetaan Persebaran Virus Covid-19 di Kota Bekasi, Mengidentifikasi ketersediaan fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit) di setiap kecamatan di Kota Bekasi untuk mengantisipasi Virus Covid-19, Menganalisis Kolerasi dari Struktur dan Pola Ruang Kota Bekasi, Merekomendasi peningkatan ketersediaan Pelayanan Kesehatan dan Penetapan lokasi untuk Petugas Pelaksanaan Protokol Pencegahan Covid di Kota Bekasi. Metode Analisis yang digunakan dalam analisis Uji Normalitas Guna mengetahui kolerasi dari struktur dan pola ruang terhadap jumlah kasus virus covid-19 di Kota Bekasi dan Analisis Rasio Rumah Sakit Terhadap Jumlah Pasien untuk mengetahui ketersediaan rumah sakit yang ada di Kota Bekasi.

Dari analisis ini didapatkan Hubungan antara Jumlah Penduduk (X1) dengan Pasien Covid-19 Covid(Y) sebesar $0,006 < 0,05$ artinya terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah penduduk terhadap pasien covid-19, Hubungan antara Luas Wilayah (X2) dengan Pasien Covid(Y) sebesar $0,540 < 0,05$ artinya tidak terdapat korelasi yang signifikan antara luas wilayah terhadap pasien covid, Hubungan antara Fasilitas Transportas (X3) dengan Pasien Covid (Y) sebesar $0,007 < 0,05$ artinya terdapat kolerasi yang signifikan antara fasilitas transportasi terhadap pasien covid. Dari Analisis Rasio Rumah Sakit didapatkan hasil Pondok Gede, Pondok Melati, Jati Asih, dengan Nilai Ratio Di bawah 0,5, Sedangkan Mustika Jaya, Rawa Lumbu, Bekasi Barat, Bekasi Utara memiliki nilai Ratio Di atas 0,5 nilai Ratio Sedang, dan Kecamatan Jatisampurna, Bantargebang, Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Medan Satria memiliki nilai Ratio Tinggi yaitu di atas 1,0.

Untuk itu saran dari penulis adalah Membuat Team Petugas Protokol Kesehatan Covid-19 pada daerah yang memiliki kasus tinggi Covid-19 dan Pada jalur keluar masuk wilayah serta pada titik fasilitas transportasi publik seperti Terminal Bus dan Stasiun Kereta Api. Dan menambahkan Fasilitas Kesehatan pada Kecamatan yang memiliki Nilai ratio rumah sakit rendah.

Kata Kunci : Analisis, Covid-19, Kesehatan, Pelayanan

1. Pendahuluan

Pada awal tahun 2020, Covid-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/*World Health Organization* (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi penyebaran di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan *Coronavirus Disease* (COVID-19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Pada tanggal 11 Maret WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemic. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan

Severe Actue Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus Corona adalah zoonis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun hewan yang menjadi sumber penulatan COVID-19 ini masih belum diketahui. (Pedoman Pencegahan dan pengendalian corona virus disease covid-19 rev 4).

Pandemi Coronavirus di Indonesia, diawali dengan temuan penderita penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) pada 2 Maret 2020

Sampai dengan tanggal 09 Mei 2020. Indonesia dilaporkan total kasus konfirmasi 13.112 dengan ODP 244.480, PDP 29.087 kemarin 943 (CFR 7,2 %) dan negatif Covid-19 ada 90.249, jumlah kasus yang diperiksa 103.361

Provinsi yang terjangkit covid-19 yaitu: Aceh, Bali, Banten, Bangka Belitung, Bengkulu, DIY Yogyakarta, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan

Selatan, Kalimantan Utara ,Kepulaun Riau, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara ,Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Lampung, Riau, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua, Sulawesi Barat , Nusa Tenggara Timur, Gorontalo. (Sumber Covid.kemendes.go.id), beberapa wilayah telah meberlakukan pembatasan social berskala besar (PSBB).

Kasus Virus Corona Covid-19 di Kota Bekasi , Jawa Barat terus bertambah , terhitung tanggal 09 Mei 2020 , tercatat terdapat 3.164 kasus corona yang tersebar di 12 kecamatan di Kota Bekasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari website Bekasi.corona.go.id dari angka tersebut terdapat 261 kasus terkonfirmasi positif virus corona ,orang dalam pemantauan (ODP) 2058 kasus. Pasien dalam pemantauan (PDP) 845 kasus dan sembuh 172 orang. (Bekasi.corona.go.id update 09 Mei 2020).

Sementara kasus positif virus corona COVID-19 terbanyak berada di Kecamatan Bekasi Selatan dengan jumlah pasien 38 orang . Sementara Kecamatan Bantargebang yang menjadi wilayah terakhir yang terinfeksi, mencatat sebanyak 3 kasus positif. Pasien terkonfirmasi Covid-19 termuda (kisaran 0-5 tahun) disebutkan berada di Kecamatan Jatiasih yang memiliki 20 pasien positif. 12 kecamatan di Kota Bekasi saat ini sudah berstatus zona merah . (Bekasi.corona.go.id update 09 Mei 2020). Berdasarkan latar belakang Pandemi Corona Virus Covid-19 yang sedang mewabah di seluruh dunia , Terutama di Indonesia dan lebih khusus Kota Bekasi yang sudah

termasuk Zona Merah, dalam menanggulangi Percepatan Covid-19 , dan Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Pecepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) penulis terdorong melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Ketersediaan Pelayanan Kesehatan Menghadapi Pandemi Covid-19 di Kota Bekasi ”. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi ketersediaan Pelayanan Rumah Sakit Rujukan di Kota Bekasi dalam penanganan Pandemi Covid-19 , dan Penentuan pemetaan persebaran kasus positif Covid-19 di Kota Bekasi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat penyebaran Virus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bekasi?
2. Bagaimana tingkat ketersediaan pelayanan Kesehatan Kota Bekasi (Rumah Sakit) dalam menghadapi penyebaran virus corona ?

Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi Pemetaan Persebaran Virus Covid-19 di Kota Bekasi.
2. Mengidentifikasi ketersediaan fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit) di setiap kecamatan di Kota Bekasi untuk mengantisipasi Virus Covid-19.
3. Merekomendasi peningkatan ketersediaan Pelayanan Kesehatan dan Penetapan lokasi untuk Petugas Pelaksanaan Protokol Pencegahan Covid di Kota Bekasi

2. Metodologi Penelitian

Metoda pembahasan ini akan terbagi atas dua bentuk yaitu penelitian dan metoda

pekerjaan.

1) Metode penelitian yang digunakan penulis terdapat beberapa tahap, diantaranya:

a. Teknik pengumpulan Data

Metode penelitian dibuat untuk membantu penulis dalam memecahkan masalah dan mencari jawaban terhadap suatu masalah dengan melalui beberapa prosedur dan tahapan. Di dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Metode Studi Literatur, Menurut Danial dan Warsiah Studi Literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian.

Untuk metode analisis ketersediaan pelayanan Kesehatan menghadapi pandemi Covid 19 dilakukan dengan *literatur library research*, Meskipun merupakan sebuah penelitian, penelitian dengan studi literatur tidak harus turun lapangan dan bertemu dengan responden. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen. Menurut (Zed, 2014), pada

riset pustaka (*libraryresearch*), penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian(research design) akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.

Selain data, beberapa hal yang harus ada dalam sebuah penelitian supaya dapat dikatakan ilmiah. Juga memerlukan hal lain seperti rumusan masalah, landasan teori, analisis data dan pengambilan kesimpulan. Penelitian dengan studi literatur adalah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di Pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. (*Jurnal Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur Ir. Melfianora, M.Si*).

b. Data Penelitian

Data-data yang akan digunakan dalam penilitain ini yaitu:

- Data primer, yang diperoleh melalui kuesioner
- Data sekunder, yang diperoleh dari instansi-instansi terkait, dokumen studi yang pernah dilakukan pada pokok masalah yang sama serta menggali dari studi literatur.

2) Metode Pekerjaan

Tahapan yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, dilakukan identifikasi masalah, penetapan lingkup masalah,

penentuan tujuan, menentukan jenis data, menentukan instansi yang akan dikunjungi dan menyiapkan panduan wawancara untuk mendapatkan manfaat dari penelitian dan mencari literatur pendukung yang terkait dengan penelitian

b. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti mencari data-data yang sesuai dengan lingkup pembahasan yang perlukan dalam penelitian ini.

c. Tahap Pengolahan Data

Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, serta mencocokkan dengan data yang lain dan yang terbaru.

Pengumpulan data primer

A. Kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung yang penanganan dan ketersediaan pelayanan Kesehatan di Kota Bekasi dalam menghadapi pandemic Covid-19 dengan menggunakan pertanyaan tertutup dimana telah tersedia jawaban dari pertanyaan dan responden tinggal memilihnya.

3. Gambaran Umum

Gambaran Umum Kota Bekasi

Sesuai dengan Perda Kota Bekasi nomor 04 tahun 2004 tentang pembentukan wilayah administrasi kecamatan dan kelurahan, Kota Bekasi terbagi menjadi 12 kecamatan terdiri 56 kelurahan. Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km, dengan Kecamatan Mustika Jaya sebagai wilayah

terluas (26,42 km²) sedangkan kecamatan Pondok Melati sebagai wilayah terkecil (11,80km²).

Batas-batas wilayah administrasi yang mengelilingi wilayah Kota Bekasi adalah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor
- Sebelah Barat : provinsi DKI Jakarta
- Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi

Kepadatan Penduduk

Pada tahun 2019 penduduk Kota Bekasi diperkirakan sebanyak 2,45 juta jiwa. Terdiri atas laki-laki sebanyak 1,24 juta jiwa dan perempuan sebanyak 1,21 juta jiwa, sehingga angka sex ratio di Kota Bekasi sebesar 101,83 yang artinya terdapat 101-102 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan. Jika dilihat menurut kecamatan, Kecamatan Bantargebang memiliki sex ratio lebih dari 100, yang artinya jumlah penduduk laki-laki masih lebih mendominasi. Penduduk terbesar berada di Kecamatan Bekasi Utara yang dihuni sebanyak 329,95 ribu penduduk (13,47 persen), diikuti Kecamatan Bekasi Timur dan Kecamatan Bekasi Barat, masing-masing 271,42 ribu dan 269,85 ribu penduduk. Sedangkan Kecamatan dengan populasi terkecil adalah Kecamatan Bantargebang yang memiliki 105,37 ribu penduduk.

Luas Kota Bekasi secara keseluruhan 210,49km². Sebagian besar wilayah Kecamatan di Kota Bekasi memiliki kepadatan penduduk tinggi. Dari 12 kecamatan, 8 di antaranya memiliki tingkat kepadatan penduduk lebih dari 10.000 jiwa/km². Kecamatan Bekasi Timur menjadi daerah terpadat dengan tingkat kepadatan

memiliki fungsi dan kecenderungan sebagai pusat pelayanan khususnya perdagangan dan jasa.

Dengan demikian struktur hirarki Kawasan di Kota Bekasi dibedakan menjadi 2 kelompok utama, yaitu hirarki pusat pelayanan primer (yang terkait fungsi Kota Bekasi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan hirarki pusat pelayanan sekunder (fungsi internal perkotaan). Guna mendukung fungsi Kota Bekasi sebagai PKN serta tumbuh dan berkembangnya Kota Bekasi terutama dalam hal mengembangkan potensi ekonomi, budaya, dan geografis untuk memacu perkembangan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, da menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka perlu pengembangan pusat-pusat baru yang tersebar di seluruh Kota Bekasi sesuai arah pengembangn struktur kota dengan pola pusat majemuk (multiple nuclei). Berikut adalah rencana pembagian wilayah Kota Bekasi:

1. Pusat Pelayanan Kota (PPK)

Pusat Pelayanan Kota (PPK), Melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional yang berada di Sebagian wilayah Kecamatan Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Timur, Rawalumbu dan Bekasi Selatan yang meliputi Jalan Sudirman – Juanda- Cut Meutia – Ahmad Yani – Koridor Jalan Siliwangi – Jalan Pekayon Raya- Jalan Perjuangan – Jalan Noer Ali – Jalan Muhtar Thabrani dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan, pusat perdagangan, pusat hiburan dan rekreasi dinamakan juga Central Buisness District (CBD) Kota Bekasi. Pusat Pelayanan Primer (Pusat Utama Pelayanan Kota), merupakan pusat pelayanan dengan skala pelayanan seluruh wilayah Kota

Bekasi, regional bahkan internasional, yang dialokasikan di pusat-pusat utama kegiatan kota yang strategis sesuai fungsi-fungsi yang ditetapkan dan mempunyai aksesibilitas baik, sehingga mudah dijangkau dari seluruh wilayah kotanya. Jenis kegiatan yang dikembangkan di pusat utama kota disesuaikan dengan potensi yang dimiliki, daya dukung dan ketersediaan lahannya, meliputi :

- A. Pusat utama pelayanan pemerintahan Kota Bekasi dengan skala pelayanan kota/ regional, dan berfungsi sebagai general utama pemicu pertumbuhan wilayah sekitarnya. Pusat kegiatan perkotaan lainnya yang dilengkapi dengan fasilitas public space, dan dialokasikan di pusat kegiatan pemerintahan kota saat ini, yaitu Jalan Ir. H. Juanda Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur dan Jalan Jenderal ahmad yani Kelurahan Kayuringinjaya Kecamatan Bekasi Selatan didukung dengan pelayanan pemerintahan di lokasi lainnya di luar Jalan Ir. Juanda dan Jalan Ahamd Yani.
- B. Pusat utama pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa, merupakan kegiatan perekonomian penduduk Kota Bekasi dan difungsikan sebagai pusat orientasi pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa guna melayani kebutuhan penduduk Kota Bekasi dan sekitarnya, yang dilengkapi oleh fasilitas penunjang. Pusat pelayanan perdagangan dan jasa ini pengembangnny dialokasikan terpusat di Jalan Kalimalang, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Pekayon Jaya, Jalan Cikunir, Jalan Kartini, Jalan Cut

Meutia, Jalan Siliwangi (Narogong), Jalan Agus Salim, Jalan Pahlawan, dan Jalan Ahmad Yani, Jalan Sultan Agung, Jalan Sudirman dan di kelurahan harapanmulya, Kelurahan Jatiasih dan Kelurahan Jatimekar, Kelurahan Jatiwaringin, Kelurahan Mustikajaya, Kelurahan Pedurenan, Kelurahan Jatimelati, Jatisampurna dan Kelurahan Jatikarya dengan skala pelayanan kota/ regional dan nasional.

- C. Pusat utama pelayanan kegiatan pariwisata terutama yang berkaitan dengan wisata belanja di kombinasikan dengan budaya serta wisata pendidikan, dan wisata olah raga dengan skala pelayanan kota/ regional/nasional.

Dari Peta Pola Ruang Kota Bekasi maka dapat disimpulkan di dalam RTRW Kota Bekasi 2011-2031

- Pengembangan perumahan kepadatan rendah di Kecamatan Jatisampurna, Pondok Melati, dan Jatiasih
- Pengembangan perumahan kepadatan tinggi dengan mengutamakan pengembangan hunian vertikal di kecamatan Pondok Gede, Bekasi Timur, Rawalumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medan Satria dan Bekasi Utara
- Pengembangan hunian vertikal di Kelurahan Margahayu, Bekasi Jaya, Duren Jaya dan Aren Jaya, Marga

Jaya, Pekayon Jaya, Kayuringin Jaya, Kranji dan Kota Baru, Sepanjang Jaya dan Pengasinan, Medan Satria dan Harpan Mulya

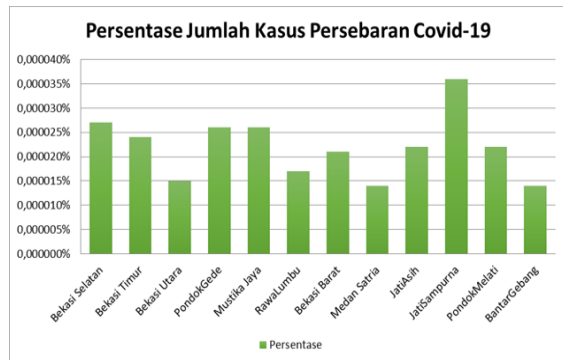
- Pengembangan perumahan Skala Besar/ Kasiba-Lisiba BS di Kawasan Jatisampurna dan Kawasan Jatiasih
- Peningkatan kualitas lingkungan di permukiman kumuh di Kecamatan Pondok Gede, Jatisampurna, Bantargebang, Mustikajaya, Bekasi Utara, Pondok Melati, Jatiasih, Rawalumbu, Bekasi Barat dan Medan Satria
- Sebaran kawasan peruntukan perumahan mencapai kurang lebih 11.321 hektar termasuk didalamnya peruntukan RTH.

4. Analisis Identifikasi

1. Identifikasi Tingkat Persebaran Covid-19 di Kota Bekasi

Identifikasi persebaran Covid-19 di Kota Bekasi ditinjau berdasarkan hasil pengamatan terhadap data orang yang terkonfirmasi, ODP (Orang Dalam Pengawasan), PDP (Pasien Dalam Pengawasan) secara simultan terhadap jumlah penduduk, maka jumlah kasus tertinggi berada di Kecamatan Jatisampurna, namun apabila ditinjau dari PDP kasus tertinggi berada di Kecamatan Bekasi Timur

Berikut tabel dari Kecamatan paling banyak mengalami kasus covid-19 ada di Kecamatan Bekasi Selatan dan paling sedikit



mengalami kasus covid-19 di Kecamatan BantarGebang.

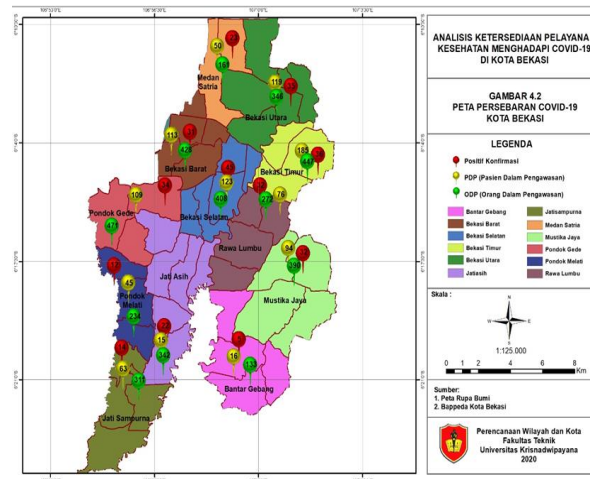
Gambar 4 Grafik Persentase Persebaran Covid-19 di Kota Bekasi

Jika dikaitkan dengan Struktur Ruang dan Pola Ruang Kota Bekasi maka didapatkan hasil penelitian sebagai Berikut :

- a. Bekasi Selatan menjadi paling banyak mengalami kasus Positif Covid-19 dengan Jumlah kasus 45 positif Covid19, 408 kasus ODP dan 123 kasus PDP, yaitu Kecamatan Bekasi Selatan memiliki 211,44 penduduk dengan persentase penduduk 8,63 dan kepadatan penduduk per km² 13.163 penduduk dan di dalam peta pola ruang termasuk klasifikasi perumahan penduduk tinggi, serta di dalam struktur ruang terdapat stasiun Bekasi.
- b. Untuk kasus ODP tertinggi terdapat di wilayah PondokGede yaitu sebanyak 471 kasus.
- c. Kasus PDP tertinggi terdapat di wilayah Bekasi Timur yaitu sebesar 185 kasus.

Gambar 4 Peta Persebaran Covid-19 di Kota Bekasi

Analisis Korelasi Dari Sisi Ruang Kota Bekasi Terhadap Jumlah Pasien Covid-19



Gambar 5 Peta Persebaran Covid-19

Dasar pengambilan keputusan dalam Analisis Korelasi Bivariate Pearson, yaitu:

1. Berdasarkan Nilai Signifikansi Sig. (2-tailed):
 - Nilai Sig (2-tailed) < 0,05 = Terdapat korelasi.
 - Nilai Sig. (2-tailed) > 0,05 = Tidak terdapat korelasi.
2. Berdasarkan Nilai r hitung (Pearson Correlations)
 - Nilai r hitung > r tabel = Terdapat korelasi antar variabel.
 - Nilai r hitung < r tabel = Tidak ada korelasi antar variabel.
3. Berdasarkan Tanda Bintang (*) yang diberikan SPSS:
 - Jika terdapat tanda bintang (*) atau (**)= Terjadi korelasi.
 - Jika tidak terdapat tanda bintang = Tidak terjadi korelasi.
 - *Tanda bintang satu (*) menunjukkan korelasi pada signifikansi 1% atau 0,01. Sedangkan tanda bintang dua

(**) menunjukkan korelasi pada signifikansi 5% atau 0,05.

Uji Normalitas

Uji normalitas yang digunakan pada penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Pedoman yang digunakan adalah apabila nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05, maka artinya data berdistribusi normal dan sebaliknya.

		Unstandardized Residual
N		12
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	72.76259569
Most Extreme Differences	Absolute	.160
	Positive	.130
	Negative	-.160
Kolmogorov-Smirnov Z		.554
Asymp. Sig. (2-tailed)		.919

a. Test distribution is Normal.

Gambar 6 Sampel Data Korelasi Dari Sisi Ruang Kota Terhadap Jumlah Pasien Covid-19 di Kota Bekasi

Berdasarkan tabel output SPSS tersebut, diketahui bahwa nilai signifikan Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0.919 yang lebih besar dari 0.05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogorov-smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

Uji Korelasi

		Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Fasilitas Transportasi	Pasien Covid
Jumlah Penduduk	Pearson Correlation	1	.097	.458	.739**
	Sig. (2-tailed)		.765	.134	.006
	N	12	12	12	12
Luas Wilayah	Pearson Correlation	.097	1	-.143	.197
	Sig. (2-tailed)	.765		.659	.540
	N	12	12	12	12
Fasilitas Transportasi	Pearson Correlation	.458	-.143	1	.734**
	Sig. (2-tailed)	.134	.659		.007
	N	12	12	12	12
Pasien Covid	Pearson Correlation	.739**	.197	.734**	1
	Sig. (2-tailed)	.006	.540	.007	
	N	12	12	12	12

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

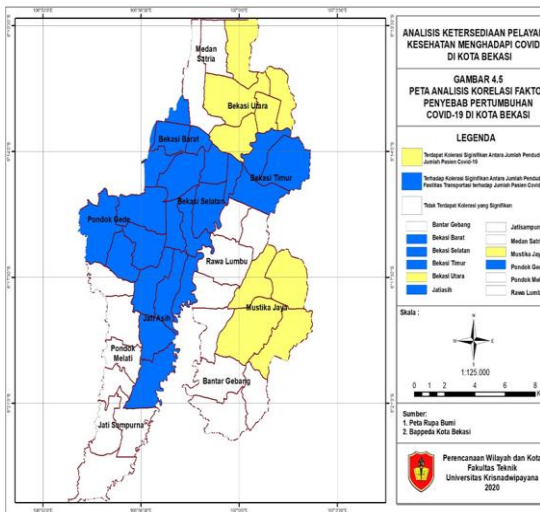
Gambar 7 Uji Korelasi

Berdasarkan tabel output di atas, dapat ditarik kesimpulan:

- Berdasarkan Nilai Signifikasi Sig. (2-tailed) :
 1. Hubungan antara Jumlah Penduduk (X1) dengan Pasien Covid (Y) sebesar $0.006 < 0.05$ artinya terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah penduduk terhadap pasien covid.
 2. Hubungan antara Luas Wilayah (X2) dengan Pasien Covid (Y) sebesar $0.540 < 0.05$ artinya tidak terdapat korelasi yang signifikan antara luas wilayah terhadap pasien covid.
 3. Hubungan antara Fasilitas Transportasi (X3) dengan Pasien Covid (Y) sebesar $0.007 < 0.05$ artinya terdapat korelasi yang

signifikan antara fasilitas transportasi terhadap pasien covid.

- Berdasarkan Nilai r hitung (Pearson Correlations) :
 - Nilai r hitung Jumlah Penduduk (X1) dengan Pasien Covid (Y) sebesar $0.739 > r$ tabel 0.576 artinya terdapat hubungan atau korelasi signifikan.
 - Nilai r hitung Luas Wilayah (X2) dengan Pasien Covid (Y) sebesar $0.197 < r$ tabel 0.576 artinya tidak terdapat hubungan atau korelasi signifikan.
 - Nilai r hitung Fasilitas Transportasi (X3) dengan Pasien Covid (Y) sebesar $0.734 > r$ tabel 0.576 artinya terdapat hubungan atau korelasi signifikan.



Gambar 8 Peta Analisis Kolerasi Faktor Penyebab Pertumbuhan Covid-19

Analisis Ratio Rumah Sakit Rujukan

$$RRS = \frac{JRS}{JP} \times 100$$

Keterangan :

RRS : Rasio Rumah Sakit

JRS : Jumlah Rumah Sakit Rujukan Covid

JP : Jumlah Pasien

Klasifikasi

- = Tinggi 1,0 – 1,5
- = Sedang 0,5 – 1,0
- = Rendah 0 – 0,5

KECAMATAN	DATA RS Rujukan Covid		RASIO	Klasifikasi
	Jumlah Paslen			
Pondokgede	3	612	0,490196078	Rendah
Jatisampurna	4	388	1,030927835	Tinggi
Pondok Melati	1	291	0,343642612	Rendah
Jatiasih	2	519	0,385356455	Rendah
Bantargebang	2	154	1,298701299	Tinggi
Mustika Jaya	3	516	0,581395349	Sedang
Bekasi Timur	10	668	1,497005988	Tinggi
Rawa Lumbu	3	380	0,789473684	Sedang
Bekasi Selatan	7	576	1,215277778	Tinggi
Bekasi Barat	3	572	0,524475524	Sedang
Medansatria	4	234	1,709401709	Tinggi
Bekasi Utara	4	500	0,8	Sedang

Gambar 9 Rasio Rumah Sakit Terhadap Jumlah Pasien Covid-19 di Kota Bekasi

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka ditarik beberapa kesimpulan.

- Berdasarkan studi epidemiologi dan virologi saat ini membuktikan bahwa COVID-19 utamanya ditularkan dari orang yang bergejala (simptomatik) ke orang lain yang berada jarak dekat melalui droplet.

2. Daerah yang Jumlah Penduduk Padat dan Memiliki Fasilitas Transportasi Keluar masuk lebih banyak mengalami jumlah kasus Covid-19 yaitu Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi Utara, Mustika Jaya dan Jati Asih
3. Berdasarkan Hasil perhitungan Rumah Sakit terhadap jumlah pasien maka dapat ditarik kesimpulan :
 - 1) Klasifikasi Ratio Tinggi : Kecamatan Jatisampurna, Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Medan Satria
 - 2) Klasifikasi Ratio Sedang : Kecamatan Mustika Jaya, Kecamatan Rawa Lumbu, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Utara.
 - 3) Klasifikasi Ratio Rendah : Kecamatan Pondok Gede, Kecamatan Jati Asih, Kecamatan Pondok Melati

6. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah dilakukan maka didapatkan beberapa Saran.

1. Membuat Team Petugas Protokol Kesehatan Covid-19 pada daerah yang memiliki kasus tinggi Covid-19 dan Pada jalur keluar masuk wilayah serta pada titik fasilitas transportasi publik seperti Terminal Bus dan Stasiun Kereta Api

2. Agar kedepannya pemerintah dapat membuat mitigasi bencana non alam dalam pembuatan Kebijakan Baik Rencana Detail Tata Ruang Maupun Rencana Tata Ruang Wilayah.
3. Penambahan Fasilitas Kesehatan untuk Kecamatan yang memiliki perhitungan ratio Rumah Sakit Rendah yaitu Kecamatan Pondok Gede, Kecamatan Jati Asih, Kecamatan Pondok Melati

Daftar Pustaka

- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020 *Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 Di Indonesia*
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Mei 2020 *Protokol-Area-dan-Transportasi-Publik-COVID-19FINAL - COVID-19 Indonesia Cross Sectoral Guidance*
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Maret 2020 *Rekomendasi Standar Penggunaan APD untuk Penanganan COVID-19 di Indonesia*
- Protokol Tatalaksana Covid-19 *Bekasi.corona.go.id*
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020 *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah- Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis Dan Manajemen* (Disusun Oleh Kementerian Dalam Negeri Untuk Dukungan Gugus Tugas Covid-19), Jakarta.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 27 Maret 2020 *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19)* (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) Rev-04

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Juli 2020 *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19)* (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) Rev-05

Protokol Tatalaksana Covid-19
Bekasi.corona.go.id

Jurnal dan Tugas Akhir

Engkus, Nanang Suparman, Fajar Tri Sakti, Husen Saeful Anwar, 2020 *Penyebaran Dan Dampak Sosial Ekonomi Di Indonesia*. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung.

Muhyiddin, Juni 2020, *Perubahan Yang Terjadi Pada Kota Pasca Pandemi*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Republik Indonesia.

Dr, IR, DEA, *Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia*. 11 Maret 2020. Ketua Jurusan PWK (Perencanaan Wilayah & Kota) Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, Pontianak.:

Erlina Burhan, 2020 *Corona Meresahkan Dunia* Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/ Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, Jakarta

[Www.Semestapsikometrika.com/2018/12/analisis-korelasi-pearson-dan-korelasi.html](http://www.semestapsikometrika.com/2018/12/analisis-korelasi-pearson-dan-korelasi.html)
<http://www.spssindonesia.com/2014/02/analisis-korelasi-dengan-spss.html>

Tugas Akhir

Aditya Satrya Nugroho - *Analisis Sebaran Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Guna Meningkatkan Pelayanan Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat* Universitas Krisnadwipayana PWK 2020

Vega Haryanto 2007. *Analisis Penataan Fasilitas Kesehatan Kecamatan Kota Bogor Dalam Pembangunan Wilayah*, Program Studi Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

Dewi Sartika 2018. *Analisis Ketersediaan Dan kebutuhan Fasilitas Sosial Di Pinggiran Kota Kabupaten Pinrang (Studi Kasus : Kawasan Perkotaan Tiroang Kecamatan Tiroang, kabupaten Pinrang*. Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

Peraturan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kegawad daruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan Realokasi

- Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020 Pemberlakuan Pembatasan Skala Besar Dalam Penanganan Wabah Covid-19 Di Kota Bekasi.
- Keputusan Wali Kota Bekasi No. 360/Kep/160-BPBD/III/2020 Siaga Darurat Bencana Penyebaran Covid-19 Di Kota Bekasi.
- Keputusan Wali Kota Bekasi No 440/Kep/162-Dinkes/III/2020 Pembiayaan Pasien Covid-19 Di Kota Bekasi.
- Keputusan Wali Kota Bekasi No 440/kep/172-DINKES/III/2020 Penetapan Rumah Sakit Swasta Kelas B,C Dan D Untuk Penanganan Pasien Covid-19 dan Non Covid-19 Pada Siaga Bencana Covid-19 Di Kota Bekasi

**JURNAL ILMIAH
PLANO KRISNA**

NO. ISSN PLANO KRISNA
2302-9307

**Penerbit
Prodi Teknik PWK
Fakultas Teknik
Universitas Krisnadwipayana**

